

Nomor : B/ 844 /AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2022

6 Desember 2022

Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang**
di

Lubuk Pakam

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Kabupaten Deli Serdang, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kabupaten Deli Serdang. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Kabupaten Deli Serdang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan reviu terhadap dokumen RKPD 2021 dan RKPD 2022 serta perubahannya dan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi;
- b. Pemetaan (*Logical Framework*) perencanaan terintegrasi terhadap Tujuan dan Sasaran dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
- c. Penyusunan pohon kinerja dan *cascading* renstra pada setiap Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- d. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus melakukan perbaikan implementasi SAKIP untuk pencapaian Reformasi Birokrasi, salah satunya dengan melakukan *updating* aplikasi e-SAKIP untuk menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
- e. Inspektorat telah melakukan reviu LKIP dan Evaluasi SAKIP seluruh Perangkat Daerah.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa nilai sebesar **70,18** dengan predikat “**BB**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**sangat baik**”, yaitu mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,30
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,87
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,61
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,40
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,18
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Hasil evaluasi tahun 2022 “**tidak diperbandingkan**” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen

dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 sebagai berikut:

1) **Perencanaan kinerja**

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat Perangkat Daerah (PD). Penyusunan dokumen ini berdasarkan hasil reuiu bersama yang berfokus pada penghapusan sub kegiatan yang tidak memberikan kontribusi langsung kepada sasaran organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan kualitas dokumen perencanaan level Pemda dan sebagian besar PD yang sudah baik. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/*measurable*, relevan dan cukup. Sebagai contoh pada indikator Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang memiliki sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pencegahan pemadaman kebakaran dan penyelamatan dengan indikator tingkat waktu tanggap (*response time*) dan cakupan pelayanan wilayah;
- b. Penjabaran kinerja belum menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja. Hal tersebut terlihat pada penjenjangan kinerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang indikator kinerja pada level eselon II memiliki level terlalu rendah yaitu Persentase Masyarakat yang berolahraga;
- c. Terdapat beberapa target tahun 2022 pada level pusat maupun PD yang lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

2) **Pengukuran Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut, telah digunakan aplikasi *e-sakip* dalam kegiatan monitoring evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;

- b. Belum terdapat pedoman mengenai pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang lengkap termasuk mekanisme pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja;
- c. Pemerintah daerah telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasilnya belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
- d. Pemantauan kinerja telah menggunakan aplikasi *e-sakip*, namun belum terlihat secara langsung pencapaian secara berkala atas target Bupati.

3) **Pelaporan Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 baik tingkat pemda maupun tingkat perangkat daerah (PD). Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan serta sudah dipublikasi secara umum melalui *website* pemda. Sebagian besar perangkat daerah telah memiliki Laporan Kinerja yang berkualitas.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja yaitu Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu indikator skor pola pangan harapan mencapai 68,5% pada tahun 2021, namun penetapan target indikator tersebut pada tahun 2022 lebih rendah dibanding capaian tahun 2021.

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah (PD). Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi yang belum disesuaikan dengan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD;
- b. Belum ada kebijakan *reward* dan *punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar indikator di level PD berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut;
- 2) Mendorong perangkat daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- 3) Memperbaiki penjabaran kinerja sesuai dengan PermenPANRB No.89 Tahun 2021;
- 4) Menyusun pedoman SAKIP Kabupaten Deli Serdang dengan memastikan minimal aspek perencanaan, pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta evaluasi internal secara komprehensif;
- 5) Menerapkan kebijakan *reward and punishment* dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi dengan kinerja masing-masing individu;
- 6) Mengoptimalkan aplikasi *e-sakip* sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap perangkat daerah sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya;
- 7) Menjadikan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan dokumen perencanaan selanjutnya;
- 8) Meningkatkan kualitas SDM inspektorat agar hasil evaluasi akuntabilitas yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Utara;
4. Bupati Deli Serdang.

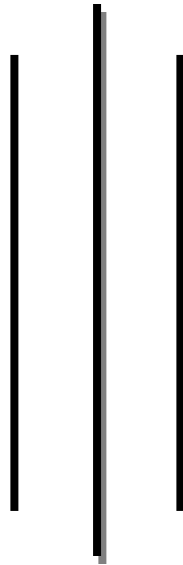
**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2022**



**KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2023**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



**KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2023**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



**KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 yang merupakan amanat konstitusional telah dapat disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/9136/OTDA tanggal 19 Desember 2022 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 dan Laporan Hasil Pra Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2022 yang memuat capaian kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, tugas pembantuan, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kita ketahui bahwa pada tahun 2022 masih terdapat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19). Situasi masyarakat dan negara mengalami perubahan dari akibat

yang ditimbulkan bencana non alam Covid 19. Dampak pandemi ini tentunya mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk pemerintah daerah. Target sasaran pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah berdampak dengan dilakukannya penyesuaian program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah. Belanja daerah diarahkan pada percepatan penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Akan tetapi kondisi ini tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memenuhi segala kewajiban yang diamanahkan.

Kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak terutama dari Pemerintah atasan dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dan melakukan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kinerja ke depan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara, dengan memohon ridho dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa kiranya senantiasa menyertai dan membimbing kita semua dalam melanjutkan cita-cita masyarakat Kabupaten Deli Serdang dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lubuk Pakam, 24 - 03 - 2023



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



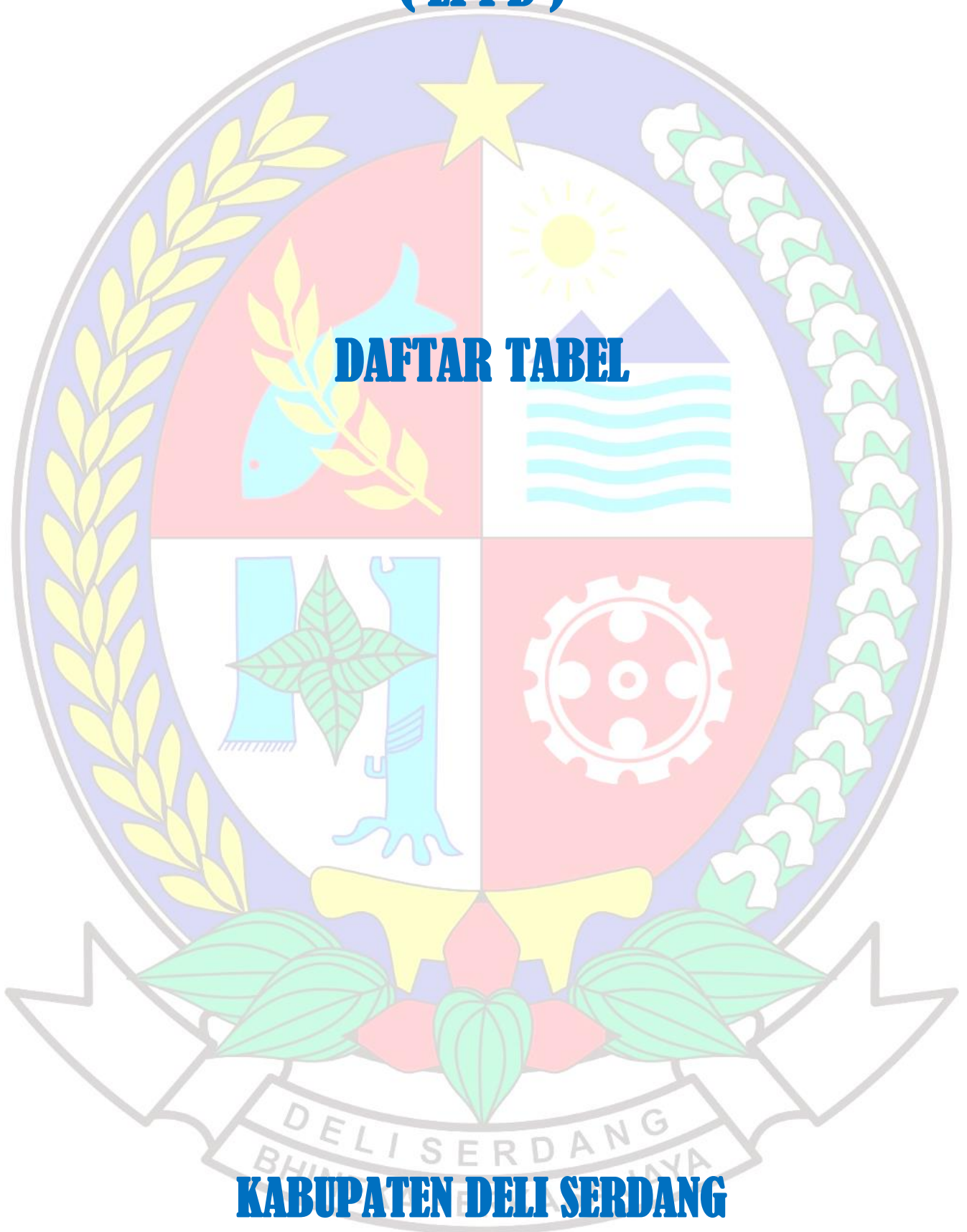
DAFTAR ISI

**KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
A. Latar Belakang	I - 1
1. Kondisi Geografis Daerah	I - 2
2. Kondisi Demografis	I - 3
3. Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang	I - 4
4. Realisasi APBD	I - 8
B. Perencanaan Pembangunan Daerah	I - 30
1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I - 30
2. Visi dan Misi Bupati Deli Serdang Tahun 2019-2024 ...	I - 32
3. Program Pembangunan Daerah	I - 34
4. Kegiatan Pembangunan Daerah	I - 42
C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I - 73
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	II - 1
A. Capaian Kinerja Makro.....	II - 1
B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II - 3
1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	II - 4
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II - 47
3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	II - 73
C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II - 78
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN....	III - 1
A. Tugas Pembantuan	III - 1
B. Hambatan dan Permasalahan	III - 14
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	IV - 1
A. Urusan Pendidikan	IV - 1
B. Urusan Kesehatan	IV - 10
C. Urusan Pekerjaan Umum	IV - 47
D. Urusan Perumahan Rakyat	IV - 53
E. Urusan Trantibumlinmas	IV - 59
F. Urusan Sosial	IV - 78
BAB V PENUTUP	V - 1

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



DAFTAR TABEL

KABUPATEN DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Deli Serdang	I -	2
Tabel 1.2	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	I -	3
Tabel 1.3	Banyaknya Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin	I -	4
Tabel 1.4	Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin	I -	6
Tabel 1.5	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 s.d.Tahun 2022	I -	9
Tabel 1.6	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli serdang Tahun 2021	I -	12
Tabel 1.7	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022	I -	13
Tabel 1.8	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaen Deli Serdang Tahun 2022	I -	15
Tabel 1.9	Target dan Realisasi Bagian Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang DipisahkanTahun 2022	I -	24
Tabel 1.10	Target dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022	I -	25
Tabel 1.11	Anggaran dan Realisasi Dana PerimbanganTahun 2020 dan 2021	I -	27
Tabel 1.12	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 dan 2021	I -	29
Tabel 1.13	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif	I -	34
Tabel 1.14	Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Deli Serdang	I -	42
Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Makro	II-	2
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II-	4
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci Hasil	II-	47
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	II-	73
Tabel 2.5	Target Kinerja	II-	79
Tabel 2.6	Skala Pengukuran Capaian Kinerja	II-	82
Tabel 2.7	Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	II-	83
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Sasaran 1	II-	85
Tabel 2.9	Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara Tahun 2022	II-	86
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Sasaran 2	II-	88

Tabel 2.11	Umur Harapan Hidup Kabupaten dan Kota Sumatera Utara Tahun 2022	II-	90
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Sasaran 3	II-	91
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Sasaran 4	II-	95
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Sasaran 5	II-	97
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Sasaran 6	II-	99
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Sasaran 7	II-	101
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Sasaran 8	II-	106
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Sasaran 9	II-	108
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Sasaran 10	II-	109
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Sasaran 11	II-	109
Tabel 2.21	Capaian Program Pada Persentase Perencanaan Tata Ruang	II-	110
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Sasaran 12	II-	112
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Sasaran 13	II-	113
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Sasaran 14	II-	114
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Sasaran 15	II-	117
Tabel 2.26	Capaian Sasaran 1 dengan Target RPJMD	II-	119
Tabel 2.27	Capaian Sasaran 2 dengan Target RPJMD	II-	120
Tabel 2.28	Capaian Sasaran 3 Terhadap Target RPJMD	II-	121
Tabel 2.29	Capaian Sasaran 4 Terhadap Target RPJMD	II-	122
Tabel 2.30	Capaian Sasaran 5 Terhadap Target RPJMD	II-	123
Tabel 2.31	Capaian Sasaran 6 Terhadap Target RPJMD	II-	123
Tabel 2.32	Capaian Sasaran 7 Terhadap Target RPJMD	II-	125
Tabel 2.33	Capaian Sasaran 8 Terhadap Target RPJMD	II-	126
Tabel 2.34	Capaian Sasaran 9 Terhadap Target RPJMD	II-	126
Tabel 2.35	Capaian Sasaran 10 Terhadap Target RPJMD	II-	127
Tabel 2.36	Capaian Sasaran 11 Terhadap Target RPJMD	II-	127
Tabel 2.37	Capaian Sasaran 12 Terhadap Target RPJMD	II-	128
Tabel 2.38	Capaian Sasaran 13 Terhadap Target RPJMD	II-	128
Tabel 2.39	Capaian Sasaran 14 Terhadap Target RPJMD	II-	129
Tabel 2.40	Capaian Sasaran 15 dengan Target RPJMD	II-	130
Tabel 2.41	Realisasi APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	II-	131
Tabel 3. 1	Rincian Kegiatan tugas Pembantuan Tahun 2022	III-	4
Tabel 4.1	Target Capaian SPM Dinas Pendidikan	IV-	1
Tabel 4.2	Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2022	IV-	2
Tabel 4.3	Jumlah Sumber Daya Kependidikan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	IV-	3

Tabel 4.4	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Berdasarkan Jabatan	IV-	3
Tabel 4.5	Capaian Standar Pelayanan Minimal	IV-	4
Tabel 4.6	Penerima Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	IV-	11
Tabel 4.7	Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022	IV-	12
Tabel 4.8	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	IV-	14
Tabel 4.9	Capaian Standar Pelayanan Minimal	IV-	16
Tabel 4.10	Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	IV-	26
Tabel 4.11	Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	IV-	47
Tabel 4.12	Alokasi Anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2022	IV-	48
Tabel 4.13	Komposisi Personil Berdasarkan Golongan Tahun 2022	VI-	50
Tabel 4.14	Capaian Standar Pelayanan Minimal	IV-	51
Tabel 4.15	Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	IV-	54
Tabel 4.16	Alokasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022	IV-	55
Tabel 4.17	Jumlah SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	IV-	56
Tabel 4.18	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	IV-	57
Tabel 4.19	Capaian Standar Pelayanan Minimal	IV-	57
Tabel 4.20	Target Pencapaian SPM dan Perangkat Daerah yang Menangani	IV-	60
Tabel 4.21	Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja	IV-	61
Tabel 4.22	Alokasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IV-	62
Tabel 4.23	Alokasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	IV-	64
Tabel 4.24	Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Pendidikan	IV-	66
Tabel 4.25	Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Golongan	IV-	66
Tabel 4.26	Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Pendidikan	IV-	67
Tabel 4.27	Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Jabatan	IV-	68
Tabel 4.28	Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Golongan	IV-	68
Tabel 4.29	Capaian Standar Pelayanan Minimal	IV-	69
Tabel 4.30	Permasalahan dan Solusi Penerapan	IV-	75
Tabel 4.31	Permasalahan dan Solusi Penerapan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	IV-	77
Tabel 4.32	Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2022	IV-	79
Tabel 4.33	Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM	IV-	80
Tabel 4.34	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2022	IV-	81
Tabel 4.35	Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Struktural dan	IV-	82

	Jabatan Fungsional		
Tabel 4.36	Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan	IV-	82
Tabel 4.37	Capaian Standar Pelayanan Minimal	IV-	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Rata-rata Lama Sekolah 2020-2022	II -	88
Grafik 2.2	Umur Harapan Hidup Kab.Deli Serdang Tahun 2020 s/d 2022	II-	89
Grafik 2.3	LajuPertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 s/d 2022	II -	92
Grafik 2.4	Nilai Realisasi PMDN Tahun 2020-2022	II -	96
Grafik 2.5	Nilai Realisasi PMA Tahun 2020-2022	II -	96
Grafik 2.6	Persentase Kemiskinan 2020 s/d 2022	II -	98
Grafik 2.7	Jalan Dalam Kondisi Baik 2020 s/d 2022	II -	100
Grafik 2.8	Irigasi Dalam Kondisi Baik 2020 s/d 2022	II -	101

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



BAB I

PENDAHULUAN

**KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TAHUN 2022

B A B I

PENDAHULUAN

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*” Selanjutnya pada Pasal 70 ayat (4) disebutkan bahwa LPPD disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sejak tahun 2020, penyusunan LPPD dan Ringkasan LPPD serta pelaksanaan EPPD mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran serta penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal selama tahun 2022 yang kesesuaian materinya disusun berpedoman pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/9136/OTDA tanggal 19 Desember 2022 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 dan Laporan Hasil Pra Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.

Tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan mampu memberikan gambaran keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah secara keseluruhan.

A. Latar Belakang

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan Kesultanan Deli dan Serdang. Kesultanan Deli berkedudukan di Medan dan Kesultanan Serdang berkedudukan di Perbaungan. Kedua wilayah tersebut dalam masa penjajahan merupakan Karesidenan Sumatera Timur. Sejak proklamasi, kekuasaan kesultanan berakhir

dan struktur pemerintahan disesuaikan dengan Pemerintah Indonesia dan Kesultanan Deli dan Serdang dijadikan daerah Kabupaten Deli Serdang.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kota Medan sebagai ibu kota provinsi. Pembentukan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Deli Serdang terletak pada titik koordinat 2^o57' sampai dengan 3^o16' Lintang Utara, dan 98^o33' sampai dengan 99^o27' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut. Batas – batas administrasi Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Binjai, Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat.

Wilayah Kabupaten Deli Serdang seluas 2.497,72 km², secara administratif Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan.

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi
Kabupaten Deli Serdang

KECAMATAN	JUMLAH	
	DESA	KELURAHAN
1. Gunung Meriah	12	--
2. STM Hulu	20	--
3. Sibolangit	30	--
4. Kutalimbaru	14	--
5. Pancur Batu	25	--
6. Namo Rambe	36	--
7. Biru-biru	17	--
8. STM Hilir	15	--
9. Bangun Purba	24	--
10. Galang	28	1
11. Tanjung Morawa	25	1
12. Patumbak	8	--
13. Deli Tua	3	3
14. Sunggal	17	--
15. Hamparan Perak	20	--
16. Labuhan Deli	5	--
17. Percut Sei Tuan	18	2

KECAMATAN	JUMLAH	
	DESA	KELURAHAN
18. Batang Kuis	11	--
19. Pantai Labu	19	--
20. Beringin	11	--
21. Lubuk Pakam	6	7
22. Pagar Merbau	16	--
Jumlah	380	14

Sumber Data: Bag.Tata Pemerintahan Setdakab Deli Serdang

2. Kondisi Demografis

Populasi penduduk di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari berbagai jenis etnis dan suku bangsa yang tersebar di 22 kecamatan. Penduduk Kabupaten Deli Serdang berdasarkan DKB (Data Konsolidasi Bersih) semester II tahun 2022 berjumlah 2.012.850 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.010.007 jiwa dan perempuan 1.002.843 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jlh Penduduk
1	Gunung Meriah	1.028	1.491	1.591	3.082
2	Tanjung Morawa	71.923	118.459	116.867	235.317
3	Sibolangit	7.312	10.644	10.907	21.551
4	Kutalimbaru	12.679	19.271	19.938	39.209
5	Pancurbatu	31.011	48.541	49.284	97.825
6	Namo Rambe	13.131	20550	20.815	41.365
7	Biru-Biru	12.764	20.038	10.025	40.063
8	STM Hilir	10.863	17.064	17.173	34.237
9	Bangun Purba	7.985	12.578	12.627	25.205
10	Galang	23.557	37.130	36.718	73.848
11	STM Hulu	4.608	7.304	7.535	14.839
12	Patumbak	30.877	51.782	50.903	102.685
13	Deli Tua	18.863	30.547	30.425	60.972
14	Sunggal	76.634	123.801	124.518	248.319
15	Hamparan Perak	54.354	88.395	85.756	174.151
16	Labuhan Deli	20.458	34.504	33.539	68.043
17	Percut Sei Tuan	124.417	205.592	203.521	409.513
18	Batang Kuis	21.264	35.814	35.074	70.888
19	Lubuk Pakam	28.753	45.819	46.563	92.382
20	Pagar Merbau	13.125	21.007	20.904	41.911
21	Pantai Labu	15.742	26.776	25.748	52.524
22	Beringin	20.103	32.383	32.267	64.650
	Jumlah	621.349	1.010.007	1.002.843	2.012.850

Sumber Data: DKB Semester 2 - Dinas Dukcapil Kab. Deli Serdang 2022

Komposisi penduduk Kabupaten Deli Serdang berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Banyaknya Penduduk menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin

No	Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan
1	0 – 5 Tahun	85.068	78.740
2	6 – 10 Tahun	100.900	93.771
3	11 - 15 Tahun	103.476	96.311
4	16 – 20 Tahun	75.785	74.001
5	21 – 25 Tahun	88.081	85.956
6	26 – 30 Tahun	84.935	82.647
7	31 – 35 Tahun	79.509	76.069
8	36 – 40 Tahun	80.838	80.155
9	41 -45 Tahun	73.754	74.101
10	46 – 50 Tahun	63.739	67.588
11	51 – 55 Tahun	54.920	58.333
12	56 – 60 Tahun	43.702	48.100
13	61 – 65 Tahun	33.285	36.158
14	66 – 70 Tahun	21.768	23.985
15	71 – 75 Tahun	10.583	12.557
16	≥76 Tahun	9.664	14.358

Sumber Data: DKB Semester 2 - Dinas Dukcapil Kab. Deli Serdang 2022

Komposisi penduduk Kabupaten Deli Serdang berdasarkan banyaknya penduduk menurut agama per desa/kelurahan :

3. Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah adalah Urusan Pemerintahan Konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui Urusan Konkuren yang terdiri dari Ringkasan Urusan Wajib dan Ringkasan Urusan Pilihan, serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 24 Urusan Wajib dan 5 Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 061 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari Sekretariat Daerah dengan 10 (sepuluh) bagian, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas sebanyak 23 dinas, kecamatan sebanyak 22 (dua puluh dua) dan unsur penunjang lainnya sebanyak 7 OPD. Dinas daerah di Kabupaten Deli Serdang sebagai pelaksana teknis urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan terdiri dari 23 dinas yakni:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Sosial.
8. Dinas Ketenagakerjaan.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Pertanian
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian
23. Dinas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sedangkan unsur penunjang daerah lainnya yakni terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Deli Serdang, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan UPT RSUD H. Amri Tambunan. Perangkat daerah didukung dengan sejumlah personil baik yang berasal dari PNS dan non PNS. Jumlah PNS di Kabupaten Deli Serdang

berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Informasi Kepegawaian per tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 10.505 personil. Jumlah perangkat daerah dan jumlah pegawai pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Jenis Kelamin	
			Lk	Pr
1	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	8	1	7
2	Sekretariat Daerah	118	72	46
3	Staf Ahli Bupati Deli Serdang	8	8	0
4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	29	15	14
5	Inspektorat	77	52	25
6	Dinas Pendidikan	5.606	1.327	4.279
7	Dinas Kesehatan	2.404	196	2.208
8	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H. Amri Tambunan	299	60	239
9	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	98	70	28
10	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	34	23	11
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	43	32	11
12	Satuan Polisi Pamong Praja	63	55	8
13	Dinas Sosial	27	11	16
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	55	9	46
15	Dinas Ketahanan Pangan	34	13	21
16	Dinas Lingkungan Hidup	36	19	17
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	46	24	22
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35	21	14
19	Dinas Perhubungan	52	47	5
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25	9	16
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	42	20	22
21	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	31	18	13
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	30	12	18

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Jenis Kelamin	
			Lk	Pr
23	Dinas Perikanan	28	13	15
24	Dinas Pertanian	165	74	91
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	98	40	58
26	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika dan Persandian	32	17	15
27	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	58	53	5
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	34	14	20
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42	20	22
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	39	16	23
31	Badan Pendapatan Daerah	101	56	45
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48	38	10
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15	11	4
34	Kantor Camat STM Hulu	15	13	2
35	Kantor Camat STM Hilir	21	13	8
36	Kantor Camat Pantai Labu	20	16	4
37	Kantor Camat Beringin	19	10	9
38	Kantor Camat Bangun Purba	14	9	5
39	Kantor Camat Pagar Merbau	17	12	5
40	Kantor Camat Galang	34	21	13
41	Kantor Camat Lubuk Pakam	75	42	33
42	Kantor Camat Tanjung Morawa	32	20	12
43	Kantor Camat Batang Kuis	19	7	12
44	Kantor Camat Hamparan Perak	30	21	9
45	Kantor Camat Sunggal	31	13	18
46	Kantor Camat Labuhan Deli	25	12	13
47	Kantor Camat Percut Sei Tuan	53	29	24
48	Kantor Camat Sibolangit	34	24	10
49	Kantor Camat Pancur Batu	38	14	24
50	Kantor Camat Deli Tua	38	17	21
51	Kantor Camat Namorambe	26	17	9
52	Kantor Camat Patumbak	17	10	7

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Jenis Kelamin	
			Lk	Pr
53	Kantor Camat Biru-Biru	20	10	10
54	Kantor Camat Kutalimbaru	23	15	8
55	Kantor Camat Gunung Meriah	10	7	3
56	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	3	
T O T A L		10,505	2.838	7.667

Sumber data: BKPSDM Kab. Deli Serdang per 30 Desember 2022

4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu masa tahun anggaran tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember.

Penyusunan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran atau output dan hasil atau outcome dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang berikut merupakan data sementara dan belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

1) Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Jumlah Target Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 4.179.153.051.919,00 terealisasi Rp. 3.731.001.039.641,21 atau 89,28% dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.5
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2021 s.d. Tahun 2022

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
	Hasil Pajak Daerah	1.188.522.247.055,00	672.462.837.506,00	56,583	1.201.597.247.055,00	767.662.597.323,40	63,89
	Hasil Retribusi Daerah	103.861.219.220,00	32.397.075.320,00	31,19	109.625.530.700,00	29.221.518.926,00	26,66
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	30.780.000.000,00	22.228.03.613,00	72,22	21.867.488.711,00	21.867.488.711,00	100,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	196.630.473.456.,00	199.049.842.714,33	101,23	171.874.097.366,00	222.920.913.124,81	129,70
JUMLAH		1.519.793.939.731,00	926.137.759.153.,33	60,94	1,504.964.363.832,00	1.041.668.145.481,21	69,22
2.	DANA PERIMBANGAN						
	Dana Bagi Hasil Pajak	51.127.881.000,00	117.966.880.041,00	230,73	64.543.149.000,00	112.302.844.850,00	174,00
	Dana Bagi Hasil bukan Pajak	3.916.683.000,00	7.692.893.493,00	196,41	7.693.268.000,00	11.272.418.029,00	146,52

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%
	Dana Alokasi Umum	1.354.889.566.000,00	1.354.889.566.000,00	100,00	1.352.573.416.000,00	1.348.515.058.970,00	99,70
	Dana Alokasi Khusus	439.055.028.000,00	393.975.208.610,00	89,73	693.357.936.000,00	477.795.498.429,00	68,91
	JUMLAH	1.848.989.158.000,00	1.874.524.548.144,00	101,38	2.118.167.769.000,00	1.949.885.820.278,00	92,06
3.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA						
	DID	43.678.973.000,00	43.678.973.000,00	100,00			
	Dana Desa	312.546.966.000,00	312.042.280.840,00	99,83	323.958.125.000,00	323.862.404.000,00	99,97
	JUMLAH	356.225.939.000,00	355.703.253.840,00	99,85	323.958.125.000,00	323.862.404.000,00	99,97
4	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH						
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	232.063.094.087,00	260.828.890.656,00	112,40	203.994.821.770,00	221.427.331.492,00	108,55
	JUMLAH	232.063.094.087,00	260.828.890.656,00	112,40	203.994.821.770,00	221.427.331.492,00	108,55
5	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
	Pendapatan Hibah	2.650.000.000,00	2.680.000.000,00	101,13	-	1.623.000.000,00	
	Pendapatan Lainnya-Sumbangan Pihak ketiga	-	-	-	-	-	
	Lain-Lain Pendapatan-Pendapatan Hibah Dana BOS	172.726.500.000,00	158.807.735.000,00	91,94		151.740.759.226,00	
	SUB TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN	175.376.500.000,00	161.487.735.000,00	92,08	-	153.363.579.226,00	

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%
	YANG SAH						
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	4.104.380.358.501,00	3.539.280.627.629,33	86,23	4.179.153.051.919,00	3.731.001.039.641,21	89,28

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang (data sebelum audit BPK)

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan tabel 1.5 di atas dapat diketahui bahwa target PAD tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 1,504.964.363.832,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.041.668.145.481,21 atau 69,22%. Secara keseluruhan penerimaan PAD hampir dapat tercapai melebihi target yang ditentukan, namun terdapat beberapa penerimaan PAD yang tidak dapat mencapai target. Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 767.658.224.719,40 dari target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 29.221.518.926,00 dari target yang ditetapkan. Adapun perincian pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.6
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
	Pajak Daerah	1.188.522.247.055,00	672.462.837.506,00	56,583	1.201.597.247.055,00	767.658.224.719,40	63,89
	Retribusi Daerah	103.861.219.220,00	32.397.075.320,00	31,19	109.625.530.700,00	29.221.518.926,00	26,66
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	30.780.000.000,00	22.228.03.613,00	72,22	21.867.488.711,00	21.867.488.711,00	100,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	196.630.473.456.,00	199.049.842.714,33	101,23	171.874.097.366,00	222.920.913.124,81	129,70
	JUMLAH	1.519.793.939.731,00	926.137.759.153.,33	60,94	1.504.964.363.832,00	1.041.668.145.481,21	69,22

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang (data sebelum audit BPK)

(1) Pajak Daerah

Tabel 1.7
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan			Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	7.647.975.000,00	4.568.731.781,00	59,74	8.247.975.000,00	5.997.886.543,00	72,72
2	Pajak Restoran	38.000.000.000,00	21.692.359.275,00	57,09	38.750.000.000,00	35.612.706.786,00	91,90
3	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	1.451.776.607,00	36,29	5.200.000.000,00	6.231.245.474,00	119,83
4	Pajak Reklame	15.000.000.000,00	10.996.152.449,00	73,31	17.500.000.000,00	11.283.642.306,00	64,48
5	Pajak Penerangan Jalan	295.105.000.000,00	183.793.206.292,00	62,28	295.105.000.000,00	203.334.563.003,00	68,90
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	36.000.000.000,00	5.182.008.132,00	14,39	30.000.000.000,00	1.042.473.810,00	3,47
7	Pajak Parkir	11.000.000.000,00	4.111.433.217,00	37,38	13.000.000.000,00	6.645.503.456,00	51,12
8	Pajak Sarang Burung	50.000.000,00	17.700.000,00	35,40	75.000.000,00	10.600.000,00	14,13
9	Pajak Air Tanah	19.000.000.000,00	6.390.450.844,00	33,63	18.000.000.000,00	22.128.115.376,40	122,93
10	Pajak PBB Perdesaan/Perkotaan	512.719.272.055,00	192.217.130.174,00	37,49	507.219.272.055,00	217.199.292.039,00	42,82
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	250.000.000.000,00	242.041.888.735,00	96,82	268.500.000.000,00	258.172.195.926,00	96,15
Jumlah		1.188.522.247.055,00	672.462.837.506,00	56,58	1.201.597.247.055,00	767.658.224.719,40	63,89

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang (data sebelum audit BPK)

Target Pajak daerah pada Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp.**1.201.597.247.055,00** dapat terealisasi sebesar Rp.**767.658.224.719,40** atau 63,89 %. Adapun rincian Pajak Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Hotel dari target Rp. 8.247.975.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 5.997.886.543,00 atau sebesar 72,72 % dari target.
- 2) Pajak Restoran dari target Rp. 38.750.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 35.612.706.786,- atau sebesar 91,90 % dari target.
- 3) Pajak Hiburan dari target Rp. 5.200.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 6.231.245.474,- atau sebesar 119,83 % dari target.
- 4) Pajak Reklame dari target Rp. 17.500.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 11.283.642.306,- atau sebesar 64,48 % dari target.
- 5) Pajak Penerangan Jalan dari target Rp. 295.105.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 203.334.563.003,- atau sebesar 68,90% dari target.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target Rp. 30.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.042.473.810,- atau sebesar 3,47 % dari target.
- 7) Pajak Parkir dari target Rp. 13.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.6.645.503.456,- atau sebesar 51,12% dari target.
- 8) Pajak Sarang Burung dari target Rp.75.000.000,00,- dapat terealisasi sebesar Rp.10.600.000,00,- atau sebesar 14,13% dari target.
- 9) Pajak Air Tanah dari target Rp. 18.000.000.000,00,- dapat terealisasi sebesar Rp. 22.128.115.376,40,- atau sebesar 122,93% dari target.
- 10) Pajak PBB Perdesaan/Perkotaan dari target Rp. 507.219.272.055,- dapat terealisasi sebesar Rp. 217.199.292.039,- atau sebesar 42,82% dari target.

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target Rp. 268.500.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 258.172.195.926,- atau sebesar 96,15% dari target.

(2) Retribusi Daerah

**Tabel 1.8
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan			Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
I	Retribusi Daerah						
	DINAS KESEHATAN						
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	685.609.220,00	576.932.977,00	84,15	5.475.170.700,00	1.379.923.702,00	25,20
2	Ret. Jasa Pemakaian sarana dan prasarana kesehatan	20.000.000,00	18.200.000,00	91,00	20,000,000.00	-	0,00
	DINAS SUMBER DAYA AIR,BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI						
1	Ret pemakaian kekayaan daerah penyewaaan tanah dan bangunan	130.000.000,00	160.903.850,00	123,77	-	-	-
2	Ret Pemakaian Alat						
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN				180.000.000,00	197.972.589,00	109,98
1	Retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran	-	-	-	-	-	-
2	Retribusi penyediaan atau peyedotan kakus	90.000.000,00	101.250.000,00	112,50	-	-	-
3	Retribusi izin mendirikan bangunan	-	-	-	-	-	-

	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG						
1	Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	-	-	105.000.000,00	125.000.000,00	119,05
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						
1	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	250.000.000,00	285.763.000,00	114,31
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
	Ret Pemakaian Kekayaan Daerah Pemakaian Laboraturium	200.000.000,00	148.143.250,00	74,07	200,000,000.00	161.067.500,00	80,53
	DINAS PERHUBUNGAN						
1	Ret Pengujian Kendaraan Bermotor	1.800.000.000,00	1.568.339.000,00	87,13	2.050.000.000,00	1.895.315.000,00	
2	Ret Terminal	621.450.000,00	196.128.000,00	31,56	621.450.000,00	187.674.000,00	
3	Ret Tempat Kusus Parkir	110.000.000,00	112.768.000,00	102,52	120.000.000,00	143.405.000,00	
4	Ret Ijin Trayek	11.600.000,00	140.000,00	1,20	11.660.000,00	595.000,00	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
1	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	87,000,000,000.00	21,417,284,000.00	24,62	-	-	-
2	Ret Persetujuan Bangunan Gedung	-	-	-	90.375.500,000.00	17.449.911.000,00	19,31
	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA						
	Ret Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00	271.000,00	0,54	60.000.000,00	18.009.000,00	30,02
	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH						
1	Ret Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00	1.500.000,00	1,00	150.000.000,00	14.450.000,00	9,63
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN						

	PERSANDIAN						
1	Ret Menara Telekomunikasi	3,153,500,000,00	3.340.540.000,00	105,93	3.200.000.000,00	2.569.406.000,00	80,29
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
1	Ret tera ulang	264.000.000,00	264.042.422,00	100,02	264.000.000,00	264.041.560,00	100,02
2	Ret pelayanan persampahan/kebersihan	500.000.000,00	253.358.300,00	50,67	500.000.000,00	254.853.400,00	50,97
3	Ret pelayanan pasar	2.000.000.000,00	1.475.011.700,00	73,75	2.000.000.000,00	1.453.660.000,00	72,68
4	Ret pemakaian kekayaan daerah pemakaian ruangan	7.500.000,00	10.000.000,00	133,33	20.000.000,00	66.044.000,00	330,22
	KECAMATAN LABUHAN DELI						
1	Ret pelayanan persampahan/kebersihan	83.750.000,00	83.900.000,00	100,18	88.750.000,00	88.750.000,00	100,00
2	Ret izin mendirikan bangunan(IMB)	14.000.000,00	5.979.200,00	42,71	-	-	
3	Penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum	184.800.000,00	72.550.000,00	39,26	80.000.000,00	40.250.000,00	50,31
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung				-	2.089.020,00	
	KECAMATAN PERCUT SEI TUAN						
1	Ret pelayanan pesampahan/kebersihan	430.000.000,00	439.070.000,00	102,11	430.000.000,00	430.000.000,00	100,00
2	Ret izin mendirikan bangunan (IMB)	55.000.000,00	55.210.800,00	100,38	-	-	-
3	Penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum	1.047.200.000,00	245.450.000,00	23,44	410.000.000,00	258.150.000,00	62,96
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung				-	14.858.220,00	
	KECAMATAN SUNGGAL						
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	30.000.000,00	49.874.000,00	166,25	-	-	-
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	767.200.000,00	46.900.000,00	6,11	400.000.000,00	40.000.000,00	10,00

4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung					-	14.589.000,00	
KECAMATAN TANJUNG MORAWA								
1	Ret Pelayanan Persampahan/Keberihan	270.000.000,00	175.124.000,00	64,86		280.000.000,00	225.890.000,00	80,68
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	40.000.000,00	29.456.500,00	73,64		-	-	-
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	699.600.000,00	107.100.000,00	15,31		300.000.000,00	99.900.000,00	33,30
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung					-	3.856.725,00	
KECAMATAN LUBUK PAKAM								
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	262.500.000,00	188.600.000,00	71,85		262.500.000,00	207.977.000,00	79,23
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	20.000.000,00	14.617.785,00	73,09		-	-	
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	559.200.000,00	61.817.000,00	11,05		300.000.000,00	97.768.000,00	32,59
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung						5.079.970,00	
KECAMATAN NAMORAMBE								
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	90.000.000,00	95.705.000,00	106,34		105.000.000,00	97.301.000,00	92,67
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	17.000.000,00	1.683.250,00	9,90		-	-	
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	74.000.000,00	2.000.000,00	2,70		20.000.000,00	4.000.000,00	20,00
KECAMATAN PANCUR BATU								
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00		175.000.000,00	175.000.000,00	100,00
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	22.000.000,00	27.573.120,00	125,33		-	-	
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	205.000.000,00	43.000.000,00	20,98		43.000.000,00	43.000.000,00	100,00
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung					-	10.419.240,00	

	KECAMATAN DELI TUA						
1	Ret Pelayanan Pesampahan/Kebersihan	105.000.000,00	35.000.000,00	33,33	110.000.000,00	35.000.000,00	31,82
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	12.000.000,00	3.990.500,00	33,25	-	-	
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	158.800.000,00	36.000.000,00	22,67	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
4	Ret pelayanan tempat khusus parkir	-	-	-	-	572.000,00	
	KECAMATAN GALANG						
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	85.000.000,00	85.428.000,00	100,50	100.000.000,00	100.100.000,00	100,10
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan(IMB)	15.000.000,00	16.418.400,00	109,46	-	-	-
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	168.000.000,00	64.000.000,00	38,10	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
4	Ret pelayanan tempat khusus parkir				-	7.263.300,00	
	KECAMATAN BANGUN PURBA						
1	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	8.000.000,00	3.079.800,00	38,50	-	-	-
2	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	30.800.000,00	4.000.000,00	12,99	20.000.000,00	10.500.000,00	52,50
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung				-	1.359.200,00	
	KECAMATAN HAMPARAN PERAK						
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	41.000.000,00	42.000.000,00	102,44	50.000.000,00	54.000.000,00	108,00
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	12.000.000,00	15.016.875,00	125,14	-	-	
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	168.800.000,00	14.500.000,00	8,59	50.000.000,00	17.800.000,00	35,60
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	-	-	-	-	3.587.600,00	
	KECAMATAN BATANG KUIS						
1	Ret Pelayanan	28.750.000,00	28.750.000,00	100,00	57.500.000,00	57.600.000,00	100,17

	Persampahan/Kebersihan						
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14.500.000,00	15.473.832,00	106,72	-	-	-
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	168.200.000,00	48.000.000,00	28,54	71.000.000,00	68.500.000,00	96,48
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	-	-	-	-	1.699.200,00	
KECAMATAN BERINGIN							
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	23.000.000,00	23.402.000,00	101,75	30.000.000,00	30.016.000,00	100,05
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	13.000.000,00	8.612.900,00	66,25	-	-	-
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	83.200.000,00	9.050.000,00	10,88	40.000.000,00	10.830.000,00	27,08
KECAMATAN PANTAI LABU							
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	21.000.000,00	20.500.000,00	97,62	23.000.000,00	22.675.000,00	98,59
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	13.000.000,00	15.496.200,00	119,20	-	-	-
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	32.800.000,00	9.900.000,00	30,18	22.000.000,00	10.000.000,00	45,45
KECAMATAN PATUMBAK							
1	Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000,00	19.400.000,00	64,67	45.000.000,00	44.250.000,00	98,33
2	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	20.000.000,00	17.623.000,00	88,12	-	-	-
3	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	202.000.000,00	3.950.000,00	1,96	40.000.000,00	7.700.000,00	19,25
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung				-	6.174.000,00	
KECAMATAN BIRU-BIRU							
1	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	9.000.000,00	7.024.000,00	78,04	-	-	-
2	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	63.200.000,00	7.410.000,00	11,72	20.000.000,00	6.640.000,00	33,20
3	Retribusi Persetujuan Bangunan				-	4.410.000,00	

	Gedung						
	KECAMATAN KUTALIMBARU						
1	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	10.000.000,00	4.883.050,00	48,83	-	-	-
2	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	30.000.000,00	15.400.000,00	51,33	20.000.000,00	18.200.000,00	91,00
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung				-	1.961.700,00	
	KECAMATAN SIBOLANGIT						
1	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	8.000.000,00	586.300,00	7,33	-	-	-
2	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	84.800.000,00	4.000.000,00	4,72	20.000.000,00	11.500.000,00	57,50
	KECAMATAN STM HILIR						
1	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	8.000.000,00	3.953.894,00	49,42	-	-	-
2	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	20.000.000,00	7.000.000,00	35,00	20.000.000,00	6.600.000,00	33,00
	KECAMATAN STM HULU						
1	Ret Izin Mendirikan Bangunan(IMB)	6.000.000,00	-		-	-	-
2	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	20.000.000,00	4.000.000,00	20,00	20.000.000,00	1.000.000,00	5,00
	KECAMATAN PAGAR MERBAU						
1	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	12.000.000,00	5.073.015,00	42,28	-	-	-
2	Penyediaan Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum	52.400.000,00	2.825.000,00	5,39	20.000.000,00	5.612.000,00	28,06
	KECAMATAN GUNUNG MERIAH						
1	Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-	-	-
	Jumlah	103.861.219.220,00	32.411.169.920,00	31,21	109.625.530.700,00	29.221.518.926,00	26,66

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang (data sebelum audit BPK)

Retribusi Daerah dari target sebesar Rp. **109.625.530.700,00** terealisasi sebesar Rp. **29.221.518.926,00** atau 26,66% dari target. Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Adapun perincian Retribusi sebagai berikut :

(1) Retribusi Jasa Umum dari target Rp.8.822.750.000,00,- dapat terealisasi sebesar Rp.6.561.100.400,00,- atau sebesar 74,36% dari target. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

(a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Dari target sebesar Rp. 2.506.750.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.068.412.400,00 atau sebesar 82,51 %

(b) Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum

Dari target Rp. 2.016.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.857.950.000,00 atau sebesar 42,55 % dari target yang telah ditetapkan. Rendahnya capaian retribusi ini disebabkan belum optimalnya pengawasan petugas pemungut parkir tepi jalan umum.

(c) Retribusi Pelayanan Pasar

Dari target sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.453.660.000,00 atau sebesar 72,68%

(d) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran. Dari target sebesar Rp. 250.000.000,00 dapat teralisasi sebesar Rp 285.763.000,00 atau sebesar 119,05%.

(e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dari target sebesar Rp. 2.050.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.895.315.000,00 atau sebesar 92,45% dari target yang telah ditetapkan.

(2) Retribusi Jasa Usaha dari target sebesar Rp.1.111.450.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.572.640.500,00 atau sebesar 51,52% dari target yang telah ditetapkan. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Dari target sebesar Rp. 370.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 241.561.500,00 atau sebesar 65,28% dari target yang telah ditetapkan.

- Retribusi Terminal

Dari target sebesar Rp. 621.450.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 187.674.000,00 atau sebesar 30,20% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan semakin menurunnya jumlah penumpang bis umum.

- Retribusi Tempat Khusus Parkir

Dari target sebesar Rp. 120.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 143.405.000,00 atau sebesar 119,50% dari target yang telah ditetapkan.

(3) Retribusi Perizinan Tertentu target sebesar Rp. 90.387.160.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 17.528.424.875,00 atau sebesar 10,39% dari target yang telah ditetapkan. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Dari target sebesar Rp. 0,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 0,00.

- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Dari target sebesar Rp. 90.375.500.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 17.527.829.875,00 atau sebesar 19,39% dari target yang telah ditetapkan

- Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

Dari target sebesar Rp. 0,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 0,00.

- Retribusi Izin Perusahaan Perikanan kepada Orang Pribadi

Dari target sebesar Rp. 0,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 0,00.

- Retribusi Izin Trayek

Dari target sebesar Rp. 11.660.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 595.000,00 atau sebesar 5,10% dari target yang telah ditetapkan.

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada tabel 1.9 berikut :

Tabel 1.9
Target dan Realisasi Bagian Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan			Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah	30.780.000.000,00	22.228.003.613,00	72,22	21.867.488.711	21.867.488.711	100,00
JUMLAH		30.780.000.000,00	22.228.003.613,00	72,22	21.867.488.711	21.867.488.711	100,00

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang (data sebelum audit BPK)

Adapun target dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan milik Swasta terealisasi sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 21.867.488.711,00 .

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. **171.874.097.366,00** terrealisasi sebesar Rp. **222.920.913.124,81** atau **129.70%** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.10
Target dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022

No	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	-	-		-	1.615.000.000,00	
2	Jasa giro kas daerah	10.517.604.959,00	7.136.656.295,91	67,85	5.737.469.285,00	6.348.299.878,78	110,65
3	Hasil pengelolaan Dana Bergulir	-	17.223.000,00		-	28.357.000,00	
4	Pendapatan BLUD	130.861.609.918,00	162.469.304.981,04	124,15	153.636.628.081,00	199.161.652.954,55	129,63
5	Pendapatan dana kapitasi JKN	17.751.258.579,00	14.988.941.500,00	84,44	-	-	
6	Pendapatan dari pengembalian	7.500.000.000,00	2.904.245.733,06	38,72	7.500.000.000,00	3.705.512.330,89	49,41
7	Penerimaan atas tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	-	258.645.640,00	0,00	-	1.003.264.030,34	
8	Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain	-	4.685.034.915,40	0,00	-	3.900.852.655,32	

No	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
9	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	-	4.359.011.734,47	0,00	-	3.717.697.152,59	
10	Pendapatan denda pajak daerah	30.000.000.000,00	4.766.183.164,45	15,89	5.000.000.000,00	3.440.277.122,34	68,81%
	Jumlah	96.630.473.456,00	201.585.246.964,33	102,52	171.874.097.366,00	222.920.913.124,81	129,70%

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang (data sebelum audit BPK)

b. Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Daerah

Target Dana Perimbangan Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.118.167.469.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp1.949.904.820.260,00 atau sebesar 92,06% dari target. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Target Dana Bagi Hasil Pajak ditetapkan sebesar Rp 72.236.417.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 123.594.262.861,00 atau sebesar 171,09%, target Dana Alokasi Umum ditetapkan sebesar Rp 1.352.573.416.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 1.348.515.058.970,00 atau sebesar 99,70%, target Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 693.357.636.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 477.795.498,00 atau sebesar 68,91%.

Tabel 1.11
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2021 dan 2022

No	DANA PERIMBANGAN	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak, terdiri dari:	51.127.881.000,00	117.966.880.041,00	230,73	64.543.149.000,00	112.312.844.850,00	174,01
	a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.943.875.000,00	74.425.624.337,00	324,38	33.711.797.000,00	71.776.911.259,00	212,91
	- PBB Bagian Pemerintahan Pusat yang dibagikan ke Daerah	-	-	-	-	-	-
	- PBB Sektor Perkebunan	-	-	-	-	-	-
	- PBB Sektor Pertambangan	-	-	-	-	-	-
	- Bagi Hasil dari sektor panas bumi	-	-	-	-	-	-
	- PBB Sektor Lainnya	-	-	-	-	-	-
	- PBB biaya pemungutan sektor perkebunan	-	-	-	-	-	-
	- PBB biaya pemungutan sektor pertambangan	-	-	-	-	-	-
	- PBB biaya pemungutan sektor panas bumi	-	-	-	-	-	-
	b. Pajak Penghasilan orang Pribadi						
	- PPh WPOPDN	1.522.093.000,00	3.098.909.518,00	203,60	1.743.201.000,00	3.504.183.769,00	201,02
	- PPh Pasal 21	26.527.764.000,00	40.245.749.153,00	151,71	28.907.828.000,00	36.845.445.929,00	127,46
	c. Dana bagi hasil Cukai Tembakau	134.149.000,00	196.597.033,00	146,55	180.323.000,00	186.303.893,00	103,32
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, terdiri dari :	3.916.683.000,00	7.692.893.493,00	196,41	7.693.268.000,00	11.281.418.011,00	146,64
	a. Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan	222.373.000,00	317.623.220,00	142,83	247.617.000,00	281.080.418,00	113,51
	b. Bagi hasil pungutan hasil perikanan	1.128.319.000,00	1.674.500.150,00	148,41	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00
	c. Bagi hasil pertambangan minyak bumi	3.192.000,00	4.379.000,00	137,19	10.021.000,00	38.402.911,00	383,22
	d. Bagi hasil pertambangan gas bumi	20.744.000,00	21.276.500,00	102,57	24.653.000,00	44.125.308,00	178,99
	e. Bagi hasil pertambangan panas bumi	214.198.000,00	251.183.239,00	117,27	261.948.000,00	271.608.324,00	103,69
	f. Dana Bagi Hasil Tera Ulang						
	g. Bagi hasil dari Mineral dan Batubara-Landrent	296.000,00	296.000,00	100,00	-	-	
	h. Bagi hasil dari mineral dan Batubara-Royalti	2.327.561.000,00	5.423.635.384,00	233,02	5.190.718.000,00	8.687.890.050,00	167,37 %
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.354.889.566.000,00	1.354.889.566.000,00	100,00	1.352.573.416.000,00	1.348.515.058.970,00	99,70%
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	439.055.028.000,00	393.975.208.610,00	89,73	693.357.636.000,00	477.795.498.429,00	68,91%

No	DANA PERIMBANGAN	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
JUMLAH		1.848.989.158.000,00	1.874.524.548.144,00	101,38	2.118.167.469.000,00	1.949.904.820.260,00	92,06%
NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA							
1	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0,00	0	0	0
	Dana Insentif Daerah	43.678.973.000,00	43.678.973.000,00	100,00	-	-	
	Dana Desa	312.546.966.000,00	312.024.280.840,00	99,83	323.958.125.000,00	323.862.404.000,00	99,97
SUB TOTAL TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT LAINNYA		356.225.939.000,00	355.703.253.840,00	99,85	323.958.125.000,00	323.862.404.000,00	99,97
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH							
1	Bagi Hasil Pajak dari provinsi, terdiri dari:						
	a. Pajak kendaraan bermotor	46.779.999.760,00	51.779.999.760,00	110,69	34.568.404.082,00	44.951.954.811,00	130,04
	b. BBNKB	11.559.460.716,00	13.059.460.716,00	112,98	20.770.111.823,00	20.770.111.823,00	100,00
	c. Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	55.834.358.653,00	69.334.358.653,00	124,18	73.791.844.585,00	73.791.844.585,00	100,00
	d. pajak pemanfaatan air permukaan (PAP)	1.472.096.973,00	1.472.096.973,00	100,00	1.079.597.372,00	1.079.597.372,00	100,00
	e. Pajak Rokok	88.348.905.668,00	85.781.415.390,00	97,09	74.364.908.705,00	96.551.265.478,00	129,83
	f. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	0,00%	-	-	
SUB TOTAL TRANSFER PEMERINTAHAN DAERAH		203.994.821.770,00	221.427.331.492,00	108,55	204.574.866.567,00	237.144.774.069,00	115,92
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER		560.220.760.770,00	577.130.585.332,00	103,02	528.532.991.567,00	561.007.178.069,00	106,14

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang (data sebelum audit BPK)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp.**153.363.579.226,00** dapat. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Lainnya Sumbangan Pihak Ketiga dan Lain-Lain Pendapatan Hibah Dana Bos.

Tabel 1. 12

Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 dan 2021

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH							
1.	Dana Hibah	2,650,000,000	2,680,000,000	101,13	-	1.623.000.000,00	
2.	Pendapatan Lainnya – Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0.00		0	0
3.	Lain-lain pendapatan Hibah Dana Bos	172.726.500.000,00	158.807.735.000,00	91,94	-	151.740.579.226,00	
SUB TOTAL LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		175.376.500.000,00	161.487.735.000,00	92,08	-	153.363.579.226,00	

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang (data sebelum audit BPK)

B. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Permasalahan Pembangunan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan faktor penghambat untuk keberhasilan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, untuk menanggulangi faktor itu, maka diperlukan analisa perumusan masalah pembangunan. Analisa dilakukan pada setiap bidang urusan pemerintah daerah yang menghasilkan permasalahan utama dari Kabupaten Deli Serdang. Mengetahui permasalahan utama ini dapat membantu mewujudkan visi dan misi dari setiap kepala daerah terpilih.

Analisa perumusan masalah di Kabupaten Deli Serdang dijelaskan ke dalam empat pokok permasalahan, yaitu: (1) Dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Lebih Berkualitas; (2) Kurangnya Inovasi dan Daya Saing dalam Sektor Ekonomi; (3) Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar yang Terbatas; dan (4) Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal.

1. Dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Lebih Berkualitas

Kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki posisi penting yang dapat menentukan keberhasilan dari pembangunan daerah karena kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh secara positif terhadap capaian kinerja pembangunan. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini terdiri atas beberapa aspek, yaitu: akses pelayanan sosial, ketenagakerjaan hingga pelayanan infrastruktur dasar. Berdasarkan aspek tersebut, sumber daya manusia dapat dibentuk dengan kualitas yang mampu berdaya saing secara lokal dan nasional hingga global. Akan tetapi, ketika kualitas aspek tersebut tidak tersedia dengan optimal dan merata maka kualitas sumber daya manusia akan rendah tidak mampu bersaing dan menghambat pembangunan di daerah.

Permasalahan utama yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah masih belum meratanya taraf Pendidikan, serta akses Pendidikan yang terbatas, hal ini dapat dilihat dari rendahnya ketersediaan ruang kelas yang dibangun, serta kualifikasi guru yang masih kurang menyebabkan output yang dihasilkan kurang kompeten. Indikator rata-rata lama sekolah pada Tahun 2020 adalah sebesar 10,09 tahun yang berarti tingkat Pendidikan yang dicapai secara umum sampai pada tingkat kelas 1 SMA. Tidak hanya mengenai pendidikan, pelayanan kesehatan juga menjadi permasalahan utama yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang masih terbatas untuk tenaga medis, sarana dan prasarana layanan kesehatan.

2. Kurangnya Inovasi dan Daya Saing dalam Sektor Ekonomi

Perekonomian menjadi tolak ukur untuk kesejahteraan masyarakat daerah, baik dari sudut pandang makro maupun mikro. Terciptanya

pertumbuhan ekonomi yang sehat di suatu daerah dapat menggambarkan bahwa kebutuhan hidup masyarakat telah terpenuhi dengan baik dan cukup. Akan tetapi, perekonomian yang sehat tidak mudah untuk dimiliki setiap daerah, karena terdapat beberapa masalah yang mampu menghambat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Kabupaten Deli Serdang sendiri masih memiliki masalah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,78 persen. Beberapa permasalahan yang dihadapi seperti: ketahanan pangan, sektor pertanian, penanaman modal, koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri, dan ekonomi kreatif. Dari segi pertanian dan perikanan masih perlu adanya inovasi dan fasilitas teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produksi pertanian dan perikanan, kemudian perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku UMKM, serta permodalan untuk UMKM.

3. Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar yang Terbatas

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang sama pentingnya sebagaimana kualitas sumber daya manusia karena merupakan faktor yang memiliki pengaruh secara bentuk fisik atau bangunan dalam mempercepat pembangunan daerah. Infrastruktur yang layak dan merata menjadi pendukung untuk masyarakat mendapatkan seluruh akses pelayanan publik dan juga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Bentuk dari infrastruktur yang selalu menjadi kebutuhan dari setiap pembangunan daerah adalah konektivitas (jalan dan jembatan), transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang setiap tahun selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, namun hingga saat ini, selalu ada permasalahan yang menghambat ketersediaan infrastruktur. Untuk kawasan perumahan dan permukiman masih terdapat permasalahan infrastruktur dasar yang memadai, seperti kurangnya pemeliharaan sarana dan pra sarana air limbah, tidak adanya peningkatan dan pengembangan SPAM, serta kurangnya perawatan dan pemeliharaan lingkungan.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Tata kelola pemerintah dalam pembangunan daerah juga memiliki peranan yang penting. Tanpa ada tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan untuk kehidupan masyarakat daerah akan sulit untuk dilaksanakan. Mewujudkan hal itu, pemerintah perlu menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabilitas, transparansi, dapat diprediksi, efektivitas, efisiensi dan melibatkan masyarakat secara langsung ketika pengambilan keputusan. Walaupun telah disadari bahwa tata kelola

pemerintahan yang baik tersebut dibutuhkan, Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi permasalahan dan hambatan. Kurangnya aparatur pengawas yang terlatih, terbatasnya sistem dan Prosedur pengawasan, kurangnya bimbingan teknis pada aparatur pengawas, terbatasnya penerbitan laporan hasil pemeriksaan, belum optimalnya evaluasi kinerja Perangkat Daerah, dan lain-lain. Meskipun nilai AKIP Tahun 2020 sudah melebihi target, namun perlu ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.

2. Visi dan Misi Bupati Deli Serdang Tahun 2019 – 2024

Visi Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

“Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan.”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Deli Serdang sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari :

Misi I Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang Mampu Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Misi ini dimaksudkan guna menciptakan masyarakat Deli Serdang yang berwawasan luas dan maju, peduli akan kesehatan, serta kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam akselerasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta informasi dan teknologi yang handal.

Misi 2 Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian dalam Memantapkan Struktur Ekonomi yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat sehingga memberikan dampak kesempatan bekerja dan kemandirian dalam berusaha.

Misi 3 Meningkatkan Sarana dan Prasarana sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berorientasi kepada Kebijakan Tata Ruang serta Berwawasan Lingkungan.

Misi ini dimaksudkan agar pembangunan dan pengembangan wilayah dilakukan secara merata dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta peningkatan pendapatan masyarakat secara merata.

Misi 4 Meningkatkan Tatahidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Berakhlakul Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Dapat Memelihara Kerukunan, Ketenteraman dan Ketertiban.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan suasana kehidupan yang aman dan nyaman, rukun, bermoral tinggi, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.

Misi 5 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah untuk Mewujudkan Tata Pemerintah yang Baik, Bersih, Berwibawa, dan Bertanggung Jawab.

Misi ini berguna untuk mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan kepercayaan yang penuh kepada masyarakat. Indikator yang mencerminkan profesionalisme aparatur pemerintah adalah meningkatnya efektifitas pelayanan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam upaya pencapaian lima (5) misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan pada masing-masing misi tersebut. Merumuskan tujuan merupakan tahapan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya menjadi pondasi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan bisa dikatakan sebagai dampak (*impact*) pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi serta menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Rumusan tujuan ini adalah hakikatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Kabupaten Deli Serdang secara lebih detail, terinci serta terukur, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dalam rangka mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan maupun urusan fungsi penunjang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut. Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil

pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.13
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

NO	MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	8
	Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi	
	Tujuan 1	
	Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	
	Sasaran 1	
	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	
1	Program pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan
2	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP)	
3	Program pendidikan non formal	
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
5	Program Manajemen Layanan Pendidikan	
6	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
7	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata
	Sasaran 2	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
8	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Dinas Kesehatan,
		UPT.RSUD H.Amri Tambunan Deli Serdang
9	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	
10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
11	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
13	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
14	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
15	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	
17	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan	

	Makanan	
18	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	
19	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	
20	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
21	Program Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	
22	Program Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	
23	Program Penetapan dan Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	
24	Program Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan	
25	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata
26	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	
27	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	
28	Program Keluarga Berencana	Dinas P3AP2KB
29	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	
30	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	
31	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	
32	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	
	Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif	
	Tujuan 1	
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	
	Sasaran 1	
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	
33	Program Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
34	Program Promosi dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
35	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	
36	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
37	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	
38	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	
39	Program Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat BersNI	
40	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
41	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Pedagang Kaki Lima dan Asongan	
42	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Sekretariat Daerah - Perekonomian dan SDA
43	Program peningkatan pemasaran hasil produksi Peternakan	
44	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
45	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian
46	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	

47	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	
48	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	
49	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	
50	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	
51	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	
52	Program peningkatan produksi hasil peternakan	
53	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	
54	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	
55	Program Peningkatan Produksi Pertanian	
56	Program Peningkatan Populasi Peternakan	
57	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Dinas Perikanan
58	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	
59	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	
60	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	
61	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	
62	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat	
63	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	
64	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penegakan hukum dan pendayagunaan sumber daya perikanan	
65	Program peningkatan kapasitas masyarakat terhadap budaya kelautan dan wawasan maritim	
66	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	
67	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata
68	Program Pengembangan Kemitraan	
69	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
70	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
71	Program Penciptan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	
72	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	
73	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
74	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
75	Program Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa	
76	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
77	Program peningkatan peran perempuan dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	
	Sasaran 2	
	Meningkatnya investasi	
78	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Sekretariat Daerah - Perekonomian dan SDA
79	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

80	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terpadu Satu Pintu
	Tujuan 2	
	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	
	Sasaran 1	
	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat	
81	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
82	Program Penanganan Fakir Miskin	
83	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
84	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
85	Program Peningkatan kesejahteraan petani	Dinas Ketahanan Pangan
86	Program peningkatan ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	
87	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
88	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
89	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	
	Misi 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan	
	Tujuan 1	
	Mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan	
	Sasaran 1	
	Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi	
90	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas SDA BMBK
91	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
92	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	
93	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	
94	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
95	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	
96	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
97	Program pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
98	Program rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	
99	Program pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
100	Program peningkatan Pelayanan Angkutan	
101	Program peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	
102	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas SDA BMBK
103	Program Pengembangan; Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	
104	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Sasaran 2	
	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman	

105	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/air limbah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
106		
107	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
108	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	
	Sasaran 3	
	Meningkatnya ketersediaan RTH publik	
109	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Tujuan 2	
	Mewujudkan kawasan yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan	
	Sasaran 1	
	Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	
110	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah - Perekonomian dan SDA
111	Program Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup
112	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
113	Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
	Sasaran 2	
	Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan	
114	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
115	Program pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun	Dinas Lingkungan Hidup
	Sasaran 3	
	Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang	
116	Program Konflik-konflik Pertanahan	Sekretariat Daerah - Pemerintahan dan Otonomi Daerah
117	Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
118	Program Pemanfaatan Ruang	
119	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
120	Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
121	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
122	Program pengembangan sistem informasi pertanahan yang handal	
	Misi 4 : Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	
	Tujuan 1	
	Mewujudkan masyarakat yang religius dan taat hukum	
	Sasaran 1	

	Meningkatnya nilai-nilai keagamaan, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	
123	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Sekretariat Daerah - PMTL
124	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Satpol PP
125	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	
126	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kesbangpol
127	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
128	Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Sekretariat Daerah - PMTL
	Tujuan 2	
	Mewujudkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	
	Sasaran 1	
	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal	
129	Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata
130	Program Pengembangan Kekayaan Budaya	
131	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
	Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (good & clean governance), berwibawa dan bertanggung jawab	
	Tujuan 1	
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	
	Sasaran 1	
	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	
132	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Sekretariat Daerah - Adm Pembangunan
133	Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	
134	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Sekretariat Daerah - Hukum
135	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	
136	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretariat Daerah - Pengadaan Barang dan Jasa
137	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat
138	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
139	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	
140	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	
141	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
142	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	

143	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	
144	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD
145	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah - Tata Usaha Pimpinan
		Sekretariat Daerah - Umum
146	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah - Pemerintahan dan Otonomi Daerah
147	Program Peningkatan Kapasitas Aparat Kecamatan	
148	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
149	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	
150	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah - Hukum
151	Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah - Organisasi
152	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah
153	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Sekretariat Daerah - PMTL
154	Program perencanaan pembangunan daerah	Sekretariat Daerah - Pemerintahan dan Otonomi Daerah
155	Program pengembangan data/informasi pembangunan daerah	
156	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
157	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	
158	Program penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi	
159	Program perencanaan pembangunan ekonomi	
160	Program perencanaan sosial dan budaya	
161	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	
162	Program peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi	
163	Program diseminasi hasil-hasil kelitbangan	
164	Program penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	
	Sasaran 2	
	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	
165	Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah - Organisasi
166	Program penataan administrasi kependudukan	Sekretariat Daerah - PMTL
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
167	Program Pembinaan dan Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah - Pengadaan Barang dan Jasa
168	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	

169	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
170	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi	
171	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	
172	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	
173	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Dinas Perpustakaan dan Arsip
174	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	
175	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	
176	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	
177	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Satpol PP
178	Program pelayanan informasi rawan bencana	BPBD
179	Program pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
180	Program pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
181	Program rehabilitasi dan rekonstruksi atas kerusakan sarana dan prasarana korban bencana	

Sumber data: data diolah dari RPJMD Kab. Deli Serdang 2019-2024

4. Kegiatan Pembangunan Daerah

Program pembangunan sebagaimana pada tabel 1.13 di atas selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (RKPD) sebagai berikut:

Tabel 1.14
Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Deli Serdang

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
1	2
DINAS PENDIDIKAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengelolaan Pendidikan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
III	Program Pengembangan Kurikulum
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
IV	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1	Pemeritaan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
DINAS KESEHATAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
IV	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMO)
2	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, Depot Air Minum (DAM)
3	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota
RSUD Drs.H AMRI TAMBUNAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota
2.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
III	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
IV	Program Penyelenggaraan Jalan
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
V	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
4	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Jasa Konstruksi
VI	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota

II	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota
III	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota
IV	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota
V	Program Pengembangan Pemukiman
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota
VI	Program Penataan Bangunan Gedung
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
VII	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
VIII	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
I	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota
II	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota
III	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota
IV	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota
V	Program Penataan Bangunan Gedung
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
VI	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
VII	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
1	Pencapaian Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
VIII	Program Pengembangan Perumahan
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota
IX	Program Kawasan Permukiman
1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
X	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
XI	Program Penatagunaan Tanah
1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
XII	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
IV	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
3	Investigasi Kejadian Kebakaran
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Penanggulangan Bencana
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana
4	Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan bencana
DINAS KETENAGAKERJAAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Perencanaan Tenaga Kerja
1	Penyusunan rencana tenaga kerja (rtk)
III	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
1	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
2	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
IV	Program Penempatan Tenaga Kerja
1	Pengelolaan informasi pasar kerja
V	Program Hubungan Industrial
1	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota
DINAS KETAHANAN PANGAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
1	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota
III	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
1	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
2	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota
3	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi
IV	Program penanganan kerawanan pangan
1	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota
V	Program pengawasan keamanan pangan
1	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
III	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
1	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
VI	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
VII	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2	Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah
VIII	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan Sampah
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pendaftaran Penduduk
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
III	Program Pencatatan Sipil
1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
V	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
1	Penyusunan Profil Kependudukan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Peningkatan Kerjasama Desa
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
III	Program Administrasi Pemerintahan Desa
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
IV	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Sosial
1	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota
III	Program Rehabilitasi Sosial
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
2	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya bukan korban hiv/aids dan napza di luar panti sosial
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
V	Program Penanganan Bencana

1	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
1	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota
DINAS PERTANIAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
1	Pengawasan penggunaan sarana pertanian
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota
3	Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota
4	Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota
III	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
1	Pengembangan prasarana pertanian
2	Pembangunan prasarana pertanian
IV	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
1	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota
2	Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota
3	Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota
V	Program Penyuluhan Pertanian
1	Pelaksanaan penyuluhan pertanian
DINAS PERHUBUNGAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
2	Pengelolaan terminal penumpang tipe c
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
4	Pengujian berkala kendaraan bermotor
5	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
6	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
7	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan
8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik
1	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemerintah Daerah
III	Program Aplikasi Informatika
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG STATISTIK	
I	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
I	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
II	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
III	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
IV	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
V	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
VI	Program Pengembangan UMKM
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
DINAS PERIKANAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
4	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
III	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
2	Pengelolaan pembudidayaan ikan
IV	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1	Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota
V	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
1	Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil
2	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
3	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
1	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
2	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
3	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Luar Negeri
4	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
5	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan
III	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
1	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
IV	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota
3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota
V	Program Pengembangan Ekspor
1	Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota
VI	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
VII	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	
I	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
1	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota
II	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (PUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
III	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
1	Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota
SEKRETARIAT DAERAH	
BAG. TATA PEMERINTAHAN	
I	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1	Administrasi tata pemerintahan
2	Fasilitasi kerjasama daerah
BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
I	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
I	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
BAG. HUKUM	
I	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
BAG. PEREKONOMIAN DAN SDA	
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	
I	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
I	Program Perekonomian dan Pembangunan
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
BAG. ADM. PEMBANGUNAN	
I	Program Perekonomian dan Pembangunan
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA	

I	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
BAG. ORGANISASI	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	Penataan Organisasi
BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BAG. UMUM	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
BAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
10	Layanan Administrasi DPRD

II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4	Peningkatan Kapasitas DPRD
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah
8	Fasilitasi Tugas DPRD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
1	Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
2	Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota
III	Program Promosi Penanaman Modal
1	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal
1	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
1	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
1	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (P3AP2KB)	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
I	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
1	Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota
2	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota
3	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota

II	Program Perlindungan Perempuan
1	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
2	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota
3	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota
III	Program Pengelolaan Sistem Data Gende dan Anak
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
IV	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
1	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota
2	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
IV	Program Perlindungan Khusus Anak
1	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota
2	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2	Administrasi keuangan perangkat daerah
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4	Administrasi umum perangkat daerah
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pengendalian Penduduk
1	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
2	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota
III	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
1	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal
2	Pendayagunaan tenaga penyuluh kb/petugas lapangan kb (pkb/plkb)
3	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan kb di daerah kabupaten/kota
4	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-kb
IV	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
1	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

2	Administrasi keuangan perangkat daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
2	Inspeksi peralatan proteksi kebakaran
3	Investigasi kejadian kebakaran
4	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
5	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia
DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA (DISBUDPORAPAR)	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda Dan Olahraga	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2	Administrasi keuangan perangkat daerah
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4	Administrasi umum perangkat daerah
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
1	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota
2	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota
III	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
1	Penyadaran Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
IV	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
V	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	
I	Program Pengembangan Kebudayaan

1	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
2	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
3	Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota
II	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
1	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
III	Program Pembinaan Sejarah
1	Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
IV	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
1	Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota
2	Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota
V	Program Pengelolaan Permuseuman
1	Pengelolaan museum kabupaten/kota
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	
I	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
1	Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota
II	Program Pemasaran Pariwisata
1	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
III	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)	
Keuangan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
1	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
2	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
3	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
1	Pengelolaan barang milik daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)	
Perencanaan	

I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2	Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
III	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Keuangan	
I	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Penelitian dan Pengembangan	
I	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pembinaan Perpustakaan
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2	Pembudidayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
III	Program Pelestarian Koleksi Nasionak dan Naskah Kuno
1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	
I	Program Pengelolaan Arsip
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
II	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
BADAN PENDAPATAN DAERAH	
Keuangan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
1	Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)	
Kepegawaian	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
II	Program Kepegawaian Daerah
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2	Mutasi dan Promosi ASN
3	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan	

I	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
1	Pengembangan Kompetensi Teknis
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
INSPEKTORAT DAERAH	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
2	Pendampingan dan Asistensi
KECAMATAN LABUHAN DELI	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan Sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN	

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2	Administrasi keuangan perangkat daerah
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4	Administrasi umum perangkat daerah
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN BATANG KUIS	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan Sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

KECAMATAN TANJUNG MORAWA	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Administrasi keuangan perangkat daerah
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
3	Administrasi umum perangkat daerah
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN LUBUK PAKAM	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Administrasi keuangan perangkat daerah
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
3	Administrasi umum perangkat daerah
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
7	Layanan Administrasi DPRD
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN BERINGIN	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah

Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Administrasi keuangan perangkat daerah
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
3	Administrasi umum perangkat daerah
4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN PANTAI LABU	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
II	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi keuangan perangkat daerah
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4	Administrasi umum perangkat daerah
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
KECAMATAN PATUMBAK	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi keuangan perangkat daerah
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4	Administrasi umum perangkat daerah

5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN BIRU-BIRU	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Administrasi keuangan perangkat daerah
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
3	Administrasi umum perangkat daerah
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN NAMORAMBE	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi keuangan perangkat daerah
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4	Administrasi umum perangkat daerah
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN PANCUR BATU	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi keuangan perangkat daerah
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4	Administrasi umum perangkat daerah
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN DELI TUA	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Administrasi keuangan perangkat daerah
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
3	Administrasi umum perangkat daerah
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan

IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN SIBOLANGIT	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
I	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
1	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Administrasi keuangan perangkat daerah
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
3	Administrasi umum perangkat daerah
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN STM. HILIR	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Administrasi keuangan perangkat daerah
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
3	Administrasi umum perangkat daerah
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN STM. HULU	

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Administrasi keuangan perangkat daerah
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
3	Administrasi umum perangkat daerah
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN PAGAR MERBAU	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi keuangan perangkat daerah
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4	Administrasi umum perangkat daerah
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN BANGUN PURBA	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	

I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi keuangan perangkat daerah
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4	Administrasi umum perangkat daerah
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN GALANG	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Administrasi keuangan perangkat daerah
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
3	Administrasi umum perangkat daerah
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN GUNUNG MERIAH	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi keuangan perangkat daerah

3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4	Administrasi umum perangkat daerah
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN HAMPARAN PERAK	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Administrasi keuangan perangkat daerah
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
3	Administrasi umum perangkat daerah
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN KUTALIMBARU	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Administrasi keuangan perangkat daerah
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
3	Administrasi umum perangkat daerah
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
KECAMATAN SUNGGAL	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
I	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan sampah
Unsur Kewilayahan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Administrasi keuangan perangkat daerah
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
3	Administrasi umum perangkat daerah
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

Sumber data: Bappeda Kab. Deli Serdang 2022

C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya pada Pasal 298 disebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Sehingga penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan

Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Pengertian SPM secara tekstual yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah meliputi 6 (enam) urusan sesuai dengan kementerian masing-masing yaitu :

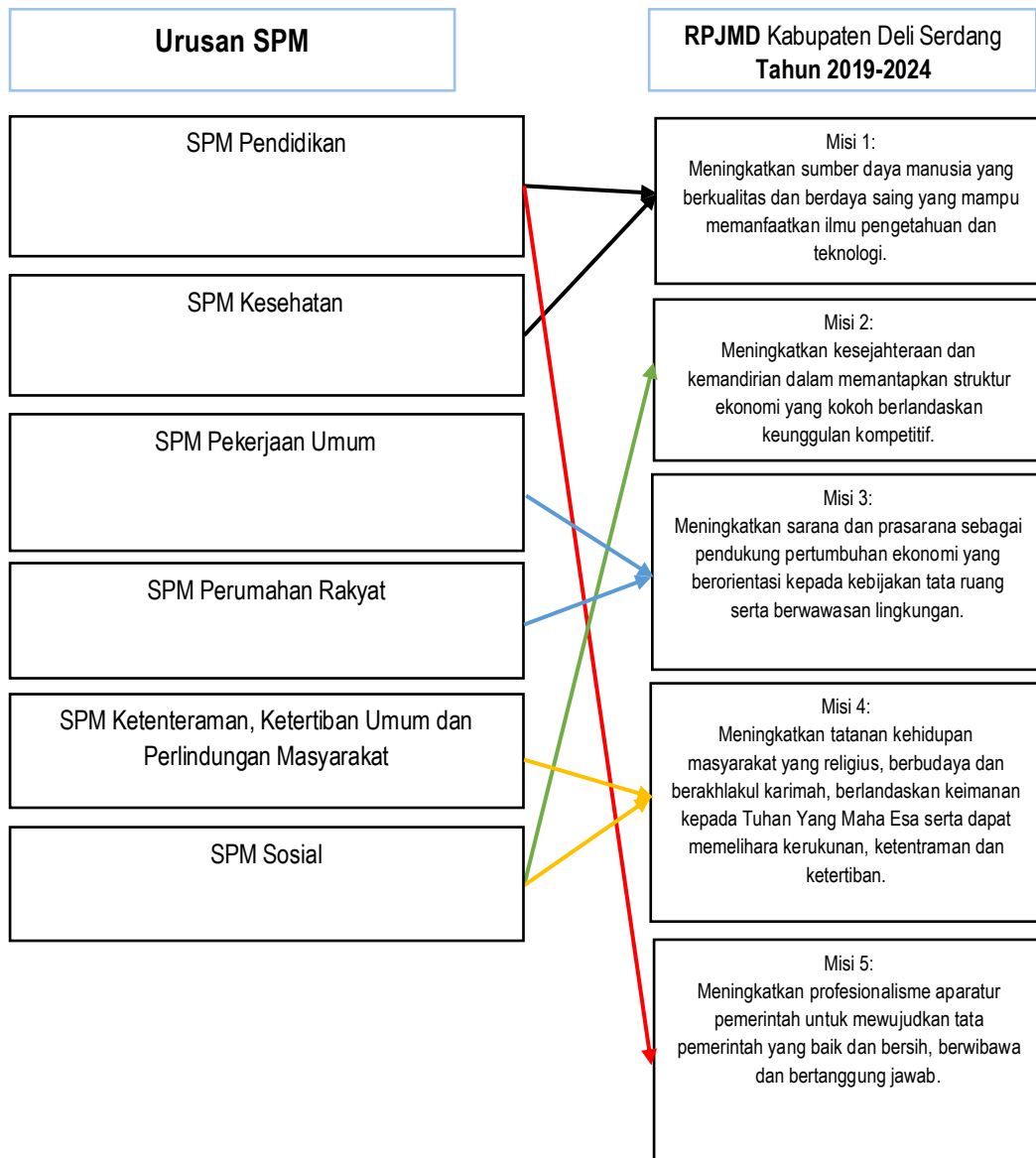
1. Urusan Pendidikan;
2. Urusan Kesehatan;
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Urusan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pasal 14 ayat (2) menjelaskan Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan ayat tersebut disampaikan bahwa yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah” meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diperkuat dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 8 ayat (1) menyatakan Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka mewajibkan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 perlu memuat 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang selanjutnya ditetapkan sebagai SPM terdiri atas: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan (6) Sosial. Pada fungsinya SPM menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dengan SPM menjadi penting utamanya untuk menjamin sinergitas dan mendukung ketercapaian program pembangunan nasional. Keterkaitan kedua dokumen tersebut sebagaimana dalam diagram di bawah ini:

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dengan
Standar Pelayanan Minimal (SPM)



Prioritas pembangunan tahun 2022 sebagai bagian dari tahun pembangunan kedua periode RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 diharapkan dapat menjawab permasalahan yang berkembang dengan memperhatikan berbagai masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Dengan keterbatasan sumber daya dan tetap mengacu pada kebijakan pembangunan maka prioritas pembangunan tahun 2022 terfokus pada pemulihan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan ekonomi dan infrastruktur terintegrasi dengan mengutamakan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2022, dilakukan melalui :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung teknologi
2. Pemulihan Kesejahteraan Masyarakat dan Transformasi ekonomi berbasis Sumber Daya Manusia
3. Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah, dan

4. Pemantapan peran pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam rangka mendukung ketercapaian Standar Pelayanan Minimal maka arah kebijakan belanja daerah tahun 2022 yang terdapat dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 salah satunya adalah membiayai belanja pemenuhan pelayanan dasar minimal (SPM).

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



**BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

**KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2022**

B A B II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Capaian Kinerja Makro

Pengukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal digunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator). Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. IPM merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Indikator IPM terdiri atas Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran perkapita. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Deli Serdang mencapai angka 76,19 pada tahun 2022 dengan laju kinerja 0,874 poin dari dibandingkan tahun 2021 yang besarnya 75,53. Capaian IPM Kabupaten Deli Serdang telah semakin membaik dan sudah dalam status IPM yang tinggi (di atas 70).

Angka Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dengan melihat persentase tingkat kemiskinan suatu daerah. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi.

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut

termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, kurangnya air bersih, perumahan yang kurang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 sebesar 3,62% mengalami penurunan laju kinerja sebesar -9,726% dibanding Tahun 2021 sebesar 4,01. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022.

Angka Pengangguran atau tingkat pengangguran terbuka, mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran (tidak bekerja). Pandemi Covid-19 yang sudah mulai mereda membuat masyarakat kembali bangkit maju menuju pemulihan dapat kita lihat dari tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 berada di posisi 9,13% dan angka menurun menjadi 8,79% pada tahun 2022 mengalami penurunan laju kinerja sebesar -3,724%.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 di angka 2,23% menjadi 4,7% atau naik sebesar 110,762%. Demikian juga dengan **Angka Pendapatan Per Kapita** yang diperoleh dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mengalami penurunan dari 59,39% pada tahun 2021 menjadi 38,67 pada tahun 2022 dengan laju kinerja sebesar -34,888. Sedangkan angka ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan yakni dari 0,263 pada tahun 2021 menjadi 0,27 pada tahun 2022 dengan laju kinerja sebesar 2,662%.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Laju Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,53	76,19	0,874
2	Angka Kemiskinan	Persen	4,01	3,62	-9,726
3	Angka Pengangguran	Persen	9,13	8,79	-3,724
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,23	4,7	110,762
5	Pendapatan Per Kapita*	Juta Rp.	59,39	38,67	-34,888
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)*	Ratio	0,263	0,27	2,662

Sumber data: BPS Kab. Deli Serdang

B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada sub bab ini terdapat tiga indikator kinerja kunci yaitu Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Berikut ini adalah Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	397	Dinas Pendidikan	
2	Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	10181	Dinas Pendidikan	
3	Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1109	Dinas Pendidikan	
4	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	1549	Dinas Pendidikan	
5	Pendidikan	Jumlah pendidik pada PAUD	2105	Dinas Pendidikan	
6	Pendidikan	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	239	Dinas Pendidikan	
7	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	82	Dinas Pendidikan	
8	Pendidikan	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	644	Dinas Pendidikan	
9	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	195268	Dinas Pendidikan	
10	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	80411	Dinas Pendidikan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
11	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	123219	Dinas Pendidikan	
12	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	34307	Dinas Pendidikan	
13	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12367	Dinas Pendidikan	
14	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	4356	Dinas Pendidikan	
15	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	10624	Dinas Pendidikan	
16	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	4523	Dinas Pendidikan	
17	Pendidikan	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1844	Dinas Pendidikan	
18	Pendidikan	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	674	Dinas Pendidikan	
19	Pendidikan	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	922	Dinas Pendidikan	
20	Pendidikan	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	337	Dinas Pendidikan	
21	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3818	Dinas Pendidikan	
22	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2457	Dinas Pendidikan	
23	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	502	Dinas Pendidikan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
24	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	176	Dinas Pendidikan	
25	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	349	Dinas Pendidikan	
26	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	310	Dinas Pendidikan	
27	Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	30	Dinas Pendidikan	
28	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5484	Dinas Pendidikan	
29	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5187	Dinas Pendidikan	
30	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	188	Dinas Pendidikan	
31	Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	386	Dinas Pendidikan	
32	Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	200	Dinas Pendidikan	
33	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	502	Dinas Pendidikan	
34	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	42	Dinas Pendidikan	
35	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	5	Dinas Kesehatan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
36	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	22	Dinas Kesehatan	
37	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	34	Dinas Kesehatan	
38	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1799	Dinas Kesehatan	
39	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	34	Dinas Kesehatan	
40	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1799	Dinas Kesehatan	
41	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	34	Dinas Kesehatan	
42	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1799	Dinas Kesehatan	
43	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	34	Dinas Kesehatan	
44	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1853	Dinas Kesehatan	
45	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	34	Dinas Kesehatan	
46	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1969	Dinas Kesehatan	
47	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	34	Dinas Kesehatan	
48	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1969	Dinas Kesehatan	
49	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	34	Dinas Kesehatan	
50	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1969	Dinas Kesehatan	
51	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	34	Dinas Kesehatan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
52	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1915	Dinas Kesehatan	
53	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	34	Dinas Kesehatan	
54	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1915	Dinas Kesehatan	
55	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	34	Dinas Kesehatan	
56	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1510	Dinas Kesehatan	
57	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	34	Dinas Kesehatan	
58	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	764	Dinas Kesehatan	
59	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	34	Dinas Kesehatan	
60	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1958	Dinas Kesehatan	
61	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
62	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
63	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
64	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
65	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
66	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PKP serta Pertanahan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
67	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
68	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	64,22	Dinas SDA BM BK	
69	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	58,71	Dinas SDA BM BK	
70	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	Dinas SDA BM BK	
71	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada/Tidak)	Ada	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
72	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Tidak	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
73	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Ada	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
74	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
75	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
76	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	731	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
77	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	400	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
78	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	1131	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
79	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	386	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
80	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	386	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
81	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	386	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
82	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	85,5	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
83	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	85,5	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
84	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0.08	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
85	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0,15	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
86	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0,9	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
87	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	1	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
88	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0,808	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
89	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	1	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
90	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	15	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
91	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	441	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
92	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
93	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
94	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	459	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
95	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	6	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
96	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	103	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
97	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	83	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
98	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	3670,70	Dinas SDA BM BK	
99	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dibangun	32,63	Dinas SDA BM BK	
100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dibangun	245,8	Dinas SDA BM BK	
101	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	6,48	Dinas SDA BM BK	
102	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dinas SDA BM BK	
103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	0	Dinas SDA BM BK	
104	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Dinas SDA BM BK	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
105	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dipelihara	65,27	Dinas SDA BM BK	
106	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dipelihara	1684	Dinas SDA BM BK	
107	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas SDA BM BK	
108	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	172	Dinas SDA BM BK	
109	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas SDA BM BK	
110	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1	Dinas SDA BM BK	
111	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1	Dinas SDA BM BK	
112	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	1	Dinas SDA BM BK	
113	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	1	Dinas SDA BM BK	
114	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	343	Dinas SDA BM BK	
115	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	Dinas SDA BM BK	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
116	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	7	Dinas SDA BM BK	
117	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	28	Dinas SDA BM BK	
118	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	28	Dinas SDA BM BK	
119	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	20	Dinas SDA BM BK	
120	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPMPPTSP	
121	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas SDA BM BK	
122	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	34	Dinas SDA BM BK	
123	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas SDA BM BK	
124	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	540	Dinas SDA BM BK	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
125	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas SDA BM BK	
126	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	190	Dinas SDA BM BK	
127	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	20	Dinas SDA BM BK	
128	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas SDA BM BK	
129	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas SDA BM BK	
130	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	34	Dinas SDA BM BK	
131	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas SDA BM BK	
132	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
133	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	81	Dinas PKP serta Pertanahan	
134	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	12771	Dinas PKP serta Pertanahan	
135	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	60	Dinas PKP serta Pertanahan	
136	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	3	Dinas PKP serta Pertanahan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
137	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	18	Dinas PKP serta Pertanahan	
138	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
139	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	81	Dinas PKP serta Pertanahan	
140	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	69491	Dinas PKP serta Pertanahan	
141	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
142	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
143	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
144	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	81	Dinas PKP serta Pertanahan	
145	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
146	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
147	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	437,7	Dinas PKP serta Pertanahan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
148	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	18	Dinas PKP serta Pertanahan	
149	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	50,86	Dinas PKP serta Pertanahan	
150	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah di kab/kota	465776	Dinas PKP serta Pertanahan	
151	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit PK RTLH	448	Dinas PKP serta Pertanahan	
152	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tidak layak huni	10534	Dinas PKP serta Pertanahan	
153	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang tidak dihuni	23289	Dinas PKP serta Pertanahan	
154	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rasio rumah dan KK	0,76	Dinas PKP serta Pertanahan	
155	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah pembangunan baru	9080	Dinas PKP serta Pertanahan	
156	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	293	Dinas PKP serta Pertanahan	
157	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
158	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	162747	Dinas PKP serta Pertanahan	
159	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
160	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	1006	Dinas PKP serta Pertanahan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
161	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	Dinas SDA BM BK	
162	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	165	Dinas PKP serta Pertanahan	
163	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang terregistrasi	165	Dinas PKP serta Pertanahan	
164	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	18	Dinas PKP serta Pertanahan	
165	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1133	Satpol PP	
166	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0	Satpol PP	
167	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	4	Satpol PP	
168	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	6	Satpol PP	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
169	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1	Satpol PP	
170	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya sarana prasarana minimal	1	Satpol PP	
171	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	BPBD	
172	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	BPBD	
173	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	BPBD	
174	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100	BPBD	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
175	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	100	BPBD	
176	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100	BPBD	
177	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100	BPBD	
178	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	BPBD	
179	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	BPBD	
180	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	BPBD	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
181	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	BPBD	
182	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	BPBD	
183	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	264	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
184	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
185	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	114	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
186	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
187	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	177	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
188	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
189	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	19	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
190	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
191	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	50	Dinas Sosial	
192	Sosial	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	5	Dinas Sosial	
193	Sosial	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	Dinas Sosial	
194	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	103	Dinas Sosial	
195	Sosial	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	Dinas Sosial	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
196	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	41	Dinas Sosial	
197	Sosial	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinas Sosial	
198	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	31	Dinas Sosial	
199	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	48	Dinas Sosial	
200	Sosial	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	1	Dinas Sosial	
201	Sosial	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial	
202	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinas Sosial	
203	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	1	Dinas Sosial	
204	Sosial	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	4	Dinas Sosial	
205	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia	18	Dinas Sosial	
206	Sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	2	Dinas Sosial	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
207	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	19	Dinas Sosial	
208	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	13	Dinas Sosial	
209	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	23	Dinas Sosial	
210	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	15	Dinas Sosial	
211	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	30	Dinas Sosial	
212	Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	7863	Dinas Sosial	
213	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	4263	Dinas Sosial	
214	Sosial	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1	Dinas Sosial	
215	Sosial	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	10682	Dinas Sosial	
216	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dinas Sosial	
217	Sosial	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	35	Dinas Sosial	
218	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	0	Dinas Tenaga Kerja	
219	Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0	Dinas Tenaga Kerja	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
220	Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	Dinas Tenaga Kerja	
221	Tenaga Kerja	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	81,82	Dinas Tenaga Kerja	
222	Tenaga Kerja	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100	Dinas Tenaga Kerja	
223	Tenaga Kerja	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	0,04	Dinas Tenaga Kerja	
224	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi	19	Dinas Tenaga Kerja	
225	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	Dinas Tenaga Kerja	
226	Tenaga Kerja	Jumlah penganggur yang dilatih	496	Dinas Tenaga Kerja	
227	Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	Dinas Tenaga Kerja	
228	Tenaga Kerja	Persentase penyerapan lulusan	31,45	Dinas Tenaga Kerja	
229	Tenaga Kerja	Lulusan bersertifikat kompetensi	275	Dinas Tenaga Kerja	
230	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Dinas Tenaga Kerja	
231	Tenaga Kerja	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Dinas Tenaga Kerja	
232	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Dinas Tenaga Kerja	
233	Tenaga Kerja	Data tingkat produktivitas total	0	Dinas Tenaga Kerja	
234	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	23,84	Dinas Tenaga Kerja	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
235	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	89,89	Dinas Tenaga Kerja	
236	Tenaga Kerja	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	990	Dinas Tenaga Kerja	
237	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	27,04	Dinas Tenaga Kerja	
238	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	85,88	Dinas Tenaga Kerja	
239	Tenaga Kerja	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	5,8	Dinas Tenaga Kerja	
240	Tenaga Kerja	Jumlah mogok kerja	3	Dinas Tenaga Kerja	
241	Tenaga Kerja	Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	
242	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan kepentingan	3	Dinas Tenaga Kerja	
243	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	
244	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan PHK	103	Dinas Tenaga Kerja	
245	Tenaga Kerja	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	356	Dinas Tenaga Kerja	
246	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	12	Dinas Tenaga Kerja	
247	Tenaga Kerja	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Dinas Tenaga Kerja	
248	Tenaga Kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	37,34	Dinas Tenaga Kerja	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
249	Tenaga Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Tenaga Kerja	
250	Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	3257	Dinas Tenaga Kerja	
251	Tenaga Kerja	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	5	Dinas Tenaga Kerja	
252	Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Dinas Tenaga Kerja	
253	Tenaga Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1	Dinas Tenaga Kerja	
254	Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	Dinas Tenaga Kerja	
255	Tenaga Kerja	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	4430	Dinas Tenaga Kerja	
256	Tenaga Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Dinas Tenaga Kerja	
257	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	2460	Dinas Tenaga Kerja	
258	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	2460	Dinas Tenaga Kerja	
259	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	Dinas Tenaga Kerja	
260	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	Dinas Tenaga Kerja	
261	Tenaga Kerja	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	40	Dinas Tenaga Kerja	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
262	Tenaga Kerja	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	1	Dinas Tenaga Kerja	
263	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	33	Dinas PPPAPPKB	
264	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	88	Dinas PPPAPPKB	
265	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	33	Dinas PPPAPPKB	
266	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4	Dinas PPPAPPKB	
267	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Dinas PPPAPPKB	
268	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	4	Dinas PPPAPPKB	
269	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	7	Dinas PPPAPPKB	
270	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	5	Dinas PPPAPPKB	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
271	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	46	Dinas PPPAPPKB	
272	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1	Dinas PPPAPPKB	
273	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3	Dinas PPPAPPKB	
274	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	3	Dinas PPPAPPKB	
275	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	2	Dinas PPPAPPKB	
276	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas PPPAPPKB	
277	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan	
278	Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1	Dinas Ketahanan Pangan	
279	Pangan	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	Dinas Ketahanan Pangan	
280	Pangan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1	Dinas Ketahanan Pangan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
281	Pangan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan	
282	Pangan	Tertanganinya kerawanan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan	
283	Pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan	
284	Pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1	Dinas Ketahanan Pangan	
285	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	3	Dinas PKP serta Pertanahan	
286	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
287	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
288	Pertanahan	Dokumen Izin membuka tanah	0	Dinas PKP serta Pertanahan	
289	Pertanahan	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	4	Dinas PKP serta Pertanahan	
290	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	59,23	DLH	
291	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	69,68	DLH	
292	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	31,42	DLH	
293	Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	100	DLH	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
294	Lingkungan Hidup	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	45	DLH	
295	Lingkungan Hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	5	DLH	
296	Lingkungan Hidup	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	DLH	
297	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	DLH	
298	Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	8	DLH	
299	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	100	Disdukcapil	
300	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perceraian	100	Disdukcapil	
301	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta kematian	100	Disdukcapil	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
302	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan	100	Disdukcapil	
303	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	380	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
304	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
305	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	2231	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
306	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	225	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
307	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	Dinas PPPAPPKB	
308	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	61421	Dinas PPPAPPKB	
309	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	1428	Dinas PPPAPPKB	
310	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBP (advokasi dan KIE)	100	Dinas PPPAPPKB	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
311	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	7	Dinas PPPAPPKB	
312	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	82	Dinas PPPAPPKB	
313	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,23	Dinas PPPAPPKB	
314	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	4	Dinas PPPAPPKB	
315	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	20,6	Dinas PPPAPPKB	
316	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0,26	Dinas PPPAPPKB	
317	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	3,5	Dinas PPPAPPKB	
318	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	82,35	Dinas Perhubungan	
319	Perhubungan	Terlaksananya pelayanan uji berkala	78	Dinas Perhubungan	
320	Perhubungan	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	Dinas Perhubungan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
321	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	66,67	Dinas Perhubungan	
322	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Kominfo	
323	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	Dinas Kominfo	
324	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1	Dinas Kominfo	
325	Komunikasi dan Informatika	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	94	Dinas Kominfo	
326	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	94	Dinas Kominfo	
327	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	50	Dinas Kominfo	
328	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	93	Dinas Kominfo	
329	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	7,14	Dinas Kominfo	
330	Komunikasi dan Informatika	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	Dinas Kominfo	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
331	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	5,55	Dinas Kominfo	
332	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	94	Dinas Kominfo	
333	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	94	Dinas Kominfo	
334	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	Dinas Kominfo	
335	Komunikasi dan Informatika	Persentase data yang dapat berbagi pakai	33	Dinas Kominfo	
336	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	Dinas Kominfo	
337	Komunikasi dan Informatika	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0	Dinas Kominfo	
338	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	Dinas Kominfo	
339	Komunikasi dan Informatika	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	25	Dinas Kominfo	
340	Komunikasi dan Informatika	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Dinas Kominfo	
341	Komunikasi dan Informatika	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Dinas Kominfo	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
342	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,248	Dinas Koperasi dan UKM	
343	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi dan UKM	
344	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6,76	Dinas Koperasi dan UKM	
345	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,21	Dinas Koperasi dan UKM	
346	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5,18	Dinas Koperasi dan UKM	
347	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,12	Dinas Koperasi dan UKM	
348	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	13,06	Dinas Koperasi dan UKM	
349	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	Dinas Koperasi dan UKM	
350	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	24,32	Dinas Koperasi dan UKM	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
351	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi dan UKM	
352	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,22	Dinas Koperasi dan UKM	
353	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	32,65	Dinas Koperasi dan UKM	
354	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,22	Dinas Koperasi dan UKM	
355	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	63,06	Dinas Koperasi dan UKM	
356	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0	Dinas Koperasi dan UKM	
357	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	9,08	Dinas Koperasi dan UKM	
358	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1,59	Dinas Koperasi dan UKM	
359	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,9	Dinas Koperasi dan UKM	
360	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2,68	Dinas Koperasi dan UKM	
361	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	9,1	Dinas Koperasi dan UKM	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
362	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	DPMPTSP	
363	Penanaman Modal	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1	DPMPTSP	
364	Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	6	DPMPTSP	
365	Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	DPMPTSP	
366	Penanaman Modal	Kegiatan pameran penanaman modal	3	DPMPTSP	
367	Penanaman Modal	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	DPMPTSP	
368	Penanaman Modal	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	449	DPMPTSP	
369	Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3354	DPMPTSP	
370	Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	3910567,94	DPMPTSP	
371	Penanaman Modal	Pembinaan aparaturnya penanaman modal tingkat kabupaten/kota	280	DPMPTSP	
372	Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	125	DPMPTSP	
373	Penanaman Modal	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	3354	DPMPTSP	
374	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
375	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
376	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
377	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
378	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	211	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
379	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	8	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
380	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas Kominfo	
381	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	30	Dinas Kominfo	
382	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	30	Dinas Kominfo	
383	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Dinas Kominfo	
384	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Dinas Kominfo	
385	Statistik	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	91	Dinas Kominfo	
386	Statistik	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	91	Dinas Kominfo	
387	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	Dinas Kominfo	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
388	Persandian	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100	Dinas Kominfo	
389	Persandian	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100	Dinas Kominfo	
390	Persandian	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	92	Dinas Kominfo	
391	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	58	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
392	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	58	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
393	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	58	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
394	Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	155	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
395	Kebudayaan	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	15	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
396	Kebudayaan	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	15	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
397	Kebudayaan	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	15	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
398	Kebudayaan	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	1	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
399	Kebudayaan	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	15	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
400	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	431	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
401	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	3	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
402	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
403	Kebudayaan	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	431	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
404	Kebudayaan	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	1	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
405	Kebudayaan	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	1	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
406	Kebudayaan	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	14	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
407	Kebudayaan	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	4	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
408	Kebudayaan	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
409	Kebudayaan	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	3	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
410	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	12,7	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
411	Perpustakaan	Persentase kermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	21,7	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
412	Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,001	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
413	Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1,13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
414	Perpustakaan	Jumlah pasyarakatangemar membaca di masyarakat	190	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
415	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
416	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
417	Perpustakaan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	304	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
418	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	97,3	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
419	Kearsipan	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	92,08	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
420	Kearsipan	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
421	Kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,34	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
422	Kearsipan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	12	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
423	Kearsipan	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
424	Kearsipan	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
425	Kearsipan	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
426	Kearsipan	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
427	Kearsipan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
428	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	13016	Dinas Perikanan	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
429	Kelautan dan Perikanan	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100	Dinas Perikanan	
430	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Dinas Perikanan	
431	Kelautan dan Perikanan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	30	Dinas Perikanan	
432	Kelautan dan Perikanan	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	66581000	Dinas Perikanan	
433	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	130	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
434	Pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	8	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
435	Pariwisata	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	423	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
436	Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	50	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
437	Pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	51	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
438	Pariwisata	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
439	Pariwisata	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	5	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
440	Pariwisata	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	95	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
441	Pariwisata	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	30	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
442	Pariwisata	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	14	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
443	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	128	Dinas Pertanian	
444	Pertanian	Prasarana pertanian yang digunakan	223369	Dinas Pertanian	
445	Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian	41	Dinas Pertanian	
446	Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan	57,7	Dinas Pertanian	
447	Pertanian	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0	Dinas Pertanian	
448	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	64,35	Dinas Pertanian	
449	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Bukan Urusan Pilihan	Kewenangan Provinsi

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
450	Kehutanan	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	Bukan Urusan Pilihan	Kewenangan Provinsi
451	Kehutanan	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	Bukan Urusan Pilihan	Kewenangan Provinsi
452	Kehutanan	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	Bukan Urusan Pilihan	Kewenangan Provinsi
453	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	Bukan Urusan Pilihan	Kewenangan Provinsi
454	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
455	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
456	Perdagangan	Persentase penerbitan TDG	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
457	Perdagangan	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
458	Perdagangan	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
459	Perdagangan	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
460	Perdagangan	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
461	Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
462	Perdagangan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
463	Perdagangan	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0	Dinas Perindag	

No.	Urusan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
464	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
465	Perdagangan	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
466	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
467	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
468	Perindustrian	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
469	Perindustrian	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
470	Perindustrian	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
471	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Bukan Urusan Pilihan	Kewenangan Provinsi
472	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Bukan Urusan Pilihan	Kewenangan Provinsi
473	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Bukan Urusan Pilihan	Kewenangan Provinsi

2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 69274. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 72281	95,8398473	Dinas Pendidikan	
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 243869. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 238120	102,4143289	Dinas Pendidikan	
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 116914. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 118233	98,8844062	Dinas Pendidikan	
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum	87,4822558	Dinas Pendidikan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
		pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 6779. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 7749			
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 2914. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 2012850	0,1447699	Dinas Kesehatan	
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 19. Jumlah RS di kabupaten/kota = 22	86,3636364	Dinas Kesehatan	
1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 44219. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 46599	94,8925943	Dinas Kesehatan	
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 43322. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 44482	97,3922036	Dinas Kesehatan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 40146. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 42363	94,7666596	Dinas Kesehatan	
1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 146577. Jumlah balita di kabupaten/kota = 164145	89,2972677	Dinas Kesehatan	
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 351825. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 366214	96,0708766	Dinas Kesehatan	
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 1347666. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 1562484	86,2515072	Dinas Kesehatan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 186948. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 191651	97,5460603	Dinas Kesehatan	
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 501073. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 550798	90,9721894	Dinas Kesehatan	
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 40628. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 43853	92,6458851	Dinas Kesehatan	
1.b.12	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2573. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 3314	77,6403138	Dinas Kesehatan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.b.13	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 48563. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 38485	126,186826	Dinas Kesehatan	
1.b.14	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 29065. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 59160	49,1294794	Dinas Kesehatan	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 1	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota;	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 1. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi;	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 18002. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 23068	78,0388417	Dinas SDA BM BK	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 396199. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh	86,7476342	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
			kabupaten/kota tersebut. = 456726			
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic;	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 429176. Jumlah rumah di Kabupaten A = 456726	93,967937	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = 556. Jumlah IMB yang berlaku = 556	100	DPMPTSP	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota;	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 1515,296. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 2040,951	74,2446046	Dinas SDA BM BK	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi;	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 28. Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 884	3,1674208	Dinas SDA BM BK	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 292. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 326	89,5705521	Dinas SDA BM BK	
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 81. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 81	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 18. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 18	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani;	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 50,86. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 437,7	11,6198309	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 12603. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 456776	2,7058071	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.d.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 8269. Jumlah unit rumah kab/kota = 465776	1,7753169	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan;	Jumlah pengaduan yang ditangani = 1121. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 1133	98,940865	Satpol PP	
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan = 4. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuatsanksi = 4	100	Satpol PP	
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 1747767. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 1921144	90,9753251	BPBD	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 4524. Jumlah	0	BPBD	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
			warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 1921144			
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 83922. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 83922	100	BPBD	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 148. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 200	74	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	7,8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.f.1	Sosial	 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 732. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 732	100	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota;	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 2811. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 2811	100	Dinas Sosial	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.a.1	Tenaga Kerja	 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 4. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 4	100	Dinas Tenaaga Kerja	
2.a.2	Tenaga Kerja	 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 104. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 1042338	0,0099776	Dinas Tenaaga Kerja	
2.a.3	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 702173,62. Jumlah tenaga kerja = 1042338	6,924205	Dinas Tenaaga Kerja	
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 1776. Jumlah Perusahaan = 2068	85,8800774	Dinas Tenaaga Kerja	
2.a.5	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota;	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 2460. Jumlah pencaker yang terdaftar = 3257	75,5296285	Dinas Tenaaga Kerja	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD = 365710325893. Jumlah seluruh belanja langsung APBD = 3786875976957	9,6573093	Dinas PPPAPPKB	
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 144. Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 144	100	Dinas PPPAPPKB	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 45. Jumlah penduduk perempuan = 964335	4,6664282	Dinas PPPAPPKB	
2.h.1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan);	Jumlah cadangan pangan = 29,928. Jumlah kebutuhan pangan = 20	149,64	Dinas Ketahanan Pangan	
2.i.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi = 0. seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi = 0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
2.i.2	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan	75	Dinas Perumahan dan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
			fasilitas umum = 3. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 4		Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
2.i.3	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal;	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 0. Luas tanah diatas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang diterbitkan = 0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
2.i.4	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 0. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
2.i.5	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 0. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
2.i.6	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi;	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 0. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.j.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		57,37	Dinas Lingkungan Hidup	
2.j.2	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 209750,57. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalankabupaten/kota = 408129.86	513930958	Dinas Lingkungan Hidup	
2.j.3	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 25. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 258	9,6899225	Dinas Lingkungan Hidup	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman = 1416363. Jumlah penduduk wajib KTP-el = 1454589	97,3720412	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.k.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 120234. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 438009	27,4501209	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.k.1.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 491949. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 596849	82,4243653	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.k.1.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama;	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 4. Jumlah PD = 32	12,5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.1.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 14. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 26	53,8461538	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.1.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 15. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 258	5,8139535	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,87	Dinas PPPAPKB	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 124335. Jumlah Pasangan Usia Subur = 233697	53,2035071	Dinas PPPAPPKB	
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 85277. Jumlah Pasangan Usia Subur = 233692	36,4911935	Dinas PPPAPPKB	
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota		1	Dinas Perhubungan	
2.n.2	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0,41	Dinas Perhubungan	
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo;	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 53. Jumlah PD = 53	100	Dinas Kominfo	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 81. Jumlah Layanan Publik = 81	100	Dinas Kominfo	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota;	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 20124. Jumlah penduduk = 1332081	1,5107189	Dinas Kominfostan	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas;	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 58. Jumlah seluruh koperasi = 444	13,0630631	Dinas Koperasi dan UKM	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha;	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 268. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 27186	0,9858015	Dinas Koperasi dan UKM	
2.q	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota;	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = 3910567,94 Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 3602000,12	8,5665688	DPMPSTP	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.r.1	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 1115. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 482517	0,2310799	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
2.r.2	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 117321. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 482517	24,3143765	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
2.r.3	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga		41	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
2.s.1	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 33. jumlah PD = 33	100	Dinas Kominfo	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.s.2	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah;	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 33 jumlah PD = 33	100	Dinas Kominfostan	
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah;	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 53. Jumlah area penilaian = 53	100	Dinas Kominfostan	
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 1. Jumlah cagar budaya yang terdata = 15	6,6666667	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
2.v.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		63,45	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2.v.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		34,75	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2.w.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)		72,3	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
2.w.2	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		5,83	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
3.a	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan = 102388. Target Produksi Perikanan = 99786	102,6075802	Dinas Perikanan	
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1) = 100. \text{ Jumlah wisatawan tahun } n-1 = 0$	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota;	$(\text{Jumlah wisatawan tahun } n) = 1260000. \text{ Jumlah wisatawan tahun } n-1 = 1010057$	24,7454352	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
3.b.3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi;	Jumlah kamar yang terjual = 19103. Jumlah kamar yang tersedia = 281415	6,7881954	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
3.b.4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 3357,47. Total PDRB berlaku = 127546,55	2,6323487	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
3.b.5	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realisasi PAD dari sektor pariwisata = 47841838803. Total Realisasi PAD = 771170171550,26	6,2037979	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
3.c.1	Pertanian	Produktivitas; pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun;	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 468336. luas panen = 74724	626,7544564	Dinas Pertanian	
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota;	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 2268. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular	-45,8969466	Dinas Pertanian	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
			tahun sebelumnya (t-1) = 4192			
3.d	Kehutanan			0		Sudah menjadi kewenangan Provinsi
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota;	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 0	0		Sudah menjadi kewenangan Provinsi
3.f.1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan);	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 0. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.f.2	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk;	Realisasi = 27131. RDKK = 29464	92,0818626	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
3.f.3	Perdagangan	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku;	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 14946. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 15702	95,1853267	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota;	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 2297. Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 2043	12,432697	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 38. Jumlah izin yang dikeluarkan = 2297	1,6543317	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait;	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota;	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini;		27,82	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.h	Transmigrasi			0		Sudah menjadi kewenangan Provinsi

3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan;	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 736115261945. Jumlah APBD = 3748620273210,9	19,6369653	BKAD	
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD = 1041668145481,2. Jumlah Pendapatan APBD = 3731001039641,2	27,9192671	BKAD	
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);		3,018	Inspektorat	
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);		3	Inspektorat	
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures);	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 2484125518046. jumlah belanja APBD = 3748620273201,9	66,2677288	BKAD	
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan;		4	BKAD	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama;	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 258	0	Bagian PBJ	
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif;	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 113. Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif = 6038	1,8714806	Bagian PBJ	
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 2288231670436. total belanja operasi dan modal = 4353532665140	52,5603423	BKAD	
4.b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) – Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 2043469374443. Jumlah Nilai	89,0897049		

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 186000000. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 186000000	100	Bapenda	
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 9. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12	75	BKAD	

C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu menunjukkan upaya pertanggung jawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang di tetapkan dalam dokumen RPJMD 2019-2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja

tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2022 penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berisikan Target Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja. Definisi Perjanjian Kinerja berdasarkan PermenPAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Kesepakatan Kinerja yang terukur antara pemberi amanah dengan penerima amanah.

Secara umum tujuan perjanjian kinerja Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya.
3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Kabupaten Deli Serdang.
5. Sebagai dasar dalam pengukuran sasaran kinerja, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.
6. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam pemberian penghargaan (*Reward*) maupun sanksi (*Punishment*).

Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan adalah Indikator Kinerja Utama. Dengan telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 181.A Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 2019-2024, hal ini sebagai indikator keberhasilan Kabupaten Deli Serdang, maka IKU harus terdapat dalam perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 :

Tabel 2.5
Target Kinerja

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	10,00

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	71,70
3.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,50
		2. PDRB	146,04
			78,79
		3. PDRB per Kapita	62,69
			35,75
4.	Meningkatnya Investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala PMDN dan PMA	1.563.837,20
			184.996,80
5.	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat	Persentase Kemiskinan	4,08
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,34
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi	Jalan dalam Kondisi baik	74
		Irigasi Kabupaten dalam kondisi Baik	78
7.	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman	Cakupan Pelayanan Air Minum	77,50
		Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,14
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	87,50
8.	Meningkatnya ketersediaan RTH publik	Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	16,6
9.	Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan	Persentase Sampah Terkelola 3R	30
11.	Meningkatnya keterpaduan rencana tata Ruang	Persentase Perencanaan Tata Ruang	58

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
12.	Meningkatnya nilai-nilai keagamaan, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	85
13.	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal	Persentase seni budaya dan tradisi yang dilestarikan	45
14.	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	71,55
15.	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	71,69

Sumber data: Bagian Organisasi Setdakab Deli Serdang 2022

2. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *Reward* (penghargaan) dan *Punishment* (hukuman). Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dasar yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD dilingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama dilingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 15 sasaran dan 22 indikator kinerja.

Tabel 2.6
Skala Pengukuran Capaian Kinerja

NO.	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	> 90 – 100	Memuaskan
2.	A	> 80 – 90	Sangat Baik
3.	BB	> 70 – 80	Baik
4.	B	>60 - 70	Cukup Baik
5.	CC	>50 – 60	Agak Kurang
6.	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase Pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rencana Tingkat Capaian

Sedangkan dalam pengukuran target perjanjian kinerja mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan – kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dapat dilihat dari alat ukur keberhasilan

dalam pencapaian target perjanjian kinerja yaitu sasaran dan indikator kinerja utama.

Tabel 2.7
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	%	10,00	10,27	102,70
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup	Angka	71,70	72,07	100,52
3.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50	4,70	85,45
		2. PDRB	ADHB/ Triliun	146,04	127,55	87,34
			ADHK/ Triliun	78,79	75,58	95,93
		3. PDRB per Kapita	ADHB/ JutaRupiah	62,69	65,28	104,13
			ADHK/ JutaRupiah	35,75	38,68	108,20
4.	Meningkatnya investasi	1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PDMN dan PMA)	PDMN/Rp.Juta	1.563.837,20	2.718.192,00	173,82
			PMA/US \$	184.996,80	83.092,40	44,92
5.	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat	1. Persentase kemiskinan	%	4,08	3,62	111,27
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,34	5,47	97,57
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi	1. Jalan dalam Kondisi Baik	%	74	74,24	100,32
		2. Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	78	78,04	100,05
7.	Meningkatnya infrastruktur dasar	1. Cakupan Pelayanan Air Minum	%	77,50	77,29	99,73

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	permukiman	2. Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,14	0,15	92,86
		3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	87,50	86,75	99,14
8.	Meningkatnya ketersediaan RTH Publik	Luasan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	%	16,60	15,46	93,13
9.	Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,00	57,37	89,64
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan	Persentase Sampah Terkelola 3R	%	30,00	28,00	93,33
11.	Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang	Persentase Perencanaan Tata Ruang	%	58,00	64,28	110,83
12.	Meningkatnya nilai-nilai keagamaan, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	85,00	84,50	99,41
13.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya local	Persentase Seni Budaya dan Tradisi yang Dilestarikan	%	45,00	56,41	125,36
14.	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	71,55	70,18	98,09
15.	Meningkatnya pelayanan prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	71,69	83,58	116,59

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	pemerintah daerah					116,59

Sumber data: Bagian Organisasi Setdakab Deli Serdang 2022

Keterangan :

- * : Data BPS Pada Tahun 2022

3. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022, berdasarkan pengukuran kinerja dan IKU sebagai acuan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 untuk mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 15 sasaran dan 22 indikator kinerja dari 5 Misi dan 8 tujuan. Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan beserta Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2022 telah menetapkan 1 indikator kinerja sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut yaitu :

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Rata-rata lama sekolah	%	10,00	10,27	102,70	10,09	10,10
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1				102,70		

Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang 2022

Berdasarkan tabel 2.8 diatas maka tingkat capaian rata-rata pada tahun 2022 untuk Sasaran 1, *Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat* sebesar 102,70 % yang berarti bermakna Memuaskan.

Indikator Kinerja *Rata-Rata Lama Sekolah* hal ini di dapat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), yang mana data yang digunakan data tahun 2022, *Rata-Rata Lama Sekolah* merupakan salah satu komponen pembentuk IPM dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas di Deli Serdang bersekolah selama **10,27** tahun atau mencapai SMU kelas I pada tahun 2022. Rata-rata lama sekolah (MYS) di Deli Serdang cukup tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara yang hanya 9,71 tahun. Hasil yang cukup menggembirakan, MYS Deli Serdang berada di urutan ke-delapan di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tertuang pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Rata rata lama Sekolah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara Tahun 2022

No	Kabupaten dan Kota	Rata-Rata Lama Sekolah
1	Medan	11.50
2	Pematangsiantar	11.31
3	Binjai	11.18
4	Padangsidempuan	11.11
5	Tebing Tinggi	10.65
6	Toba Samosir	10.58
7	Sibolga	10.43
8	Deli Serdang	10.27
9	Karo	10.02

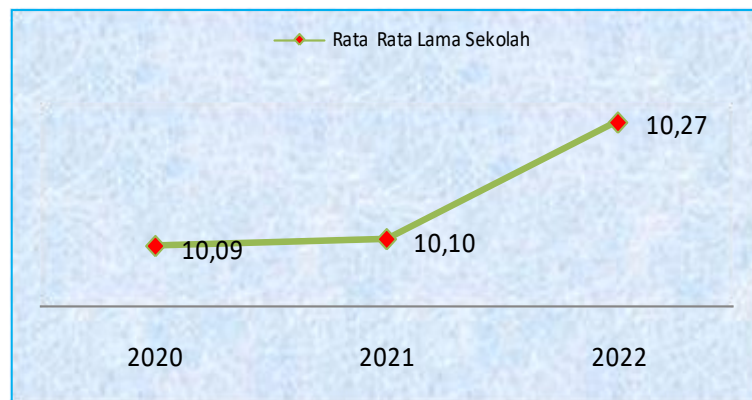
No	Kabupaten dan Kota	Rata-Rata Lama Sekolah
10	Humbang Hasundutan	10.00
11	Tapanuli Utara	10.00
12	Dairi	9.72
13	Sumatera Utara	9.71
14	Simalungun	9.63
15	Tanjungbalai	9.55
16	Samosir	9.46
17	Padang Lawas Utara	9.46
18	Labuhan Batu	9.40
19	Pakpak Bharat	9.39
20	Tapanuli Selatan	9.34
21	Padang Lawas	9.31
22	Labuhanbatu Selatan	8.92
23	Tapanuli Tengah	8.86
24	Asahan	8.82
25	Mandailing Natal	8.76
26	Serdang Bedagai	8.71
27	Langkat	8.68
28	Labuanbatu Utara	8.64
29	Gunungsitoli	8.64
30	Batu Bara	8.26
31	Nias Barat	6.97
32	Nias Utara	6.78
33	Nias Selatan	6.23
34	Nias	5.88

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2022

Sedangkan capaian Rata rata Lama Sekolah di Kabupaten Deli Serdang selama kurun waktu 2020-2022 menunjukkan tren peningkatan yang cukup berarti dan signifikan, sebagaimana pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.1

Rata rata Lama Sekolah 2020 -2022



Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang 2022

Sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2022 telah menetapkan 1 indikator kinerja sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut yaitu :

Tabel 2.10

Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Umur Harapan Hidup	%	71,70	72,07	100,52	71,73	71,77
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2				100,52		

Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang 2022

Berdasarkan tabel 2.10 diatas maka tingkat capaian pada tahun 2022 untuk Sasaran 2, *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* capaiannya sebesar 100,52 % pada tahun 2022 yang bermakna Memuaskan.

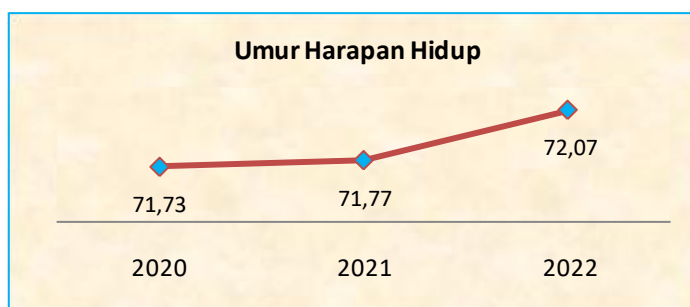
Indikator Kinerja Umur Harapan Hidup merupakan indikator yang menggunakan data hasil pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar Perangkat Daerah, yaitu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Umur Harapan Hidup pada tahun 2022 sebesar 72,07. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator Umur Harapan Hidup adalah Memuaskan dengan capaian 100,52 %.

Umur Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu

tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Sumber data lain untuk mendapatkan variabel penyusun indikator ini adalah Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Umur Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Faktor yang mempengaruhi Umur Harapan Hidup yaitu : faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan mulai dari kandungan sampai lanjut usia. Oleh karena itu pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan mulai dari kandungan sampai lanjut usia tentunya akan mempengaruhi keberhasilan Umur Harapan Hidup. Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para lanjut usia, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang juga membentuk dan memberdayakan Posyandu Lanjut Usia di masyarakat. Selain itu Dinas Kesehatan juga mengintegrasikan Posyandu Lanjut Usia dengan lintas sektor. Ada beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target peningkatan Umur Harapan Hidup adalah (1) Meningkatnya sosial ekonomi masyarakat; (2) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan; (3) Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat seiring dengan semakin giatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); (4) Meningkatnya kualitas lingkungan (rumah sehat, air bersih, sarana sanitasi (pembuangan air limbah, tempat sampah, dan kepemilikan jamban), tempat umum dan pengelolaan makanan, serta sarana pengolahan limbah di sarana pelayanan kesehatan. Umur Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2.2
Umur Harapan Hidup Kab.Deli Serdang Tahun 2020 s/d 2022



Sumber : *BPS Kabupaten Deli Serdang 2022*

Umur Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang **72,07** tahun yang merupakan realisasi pada tahun 2022. Umur Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang cukup tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara yang hanya 69,61 tahun. Hasil yang cukup menggembirakan bahwa Kabupaten Deli Serdang berada di urutan ke-empat di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tertuang pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Umur Harapan Hidup Kabupaten dan Kota
Sumatera Utara Tahun 2022

No	Kabupaten dan Kota	Umur Harapan Hidup
1	Pematangsiantar	74.25
2	Medan	73.58
3	Binjai	72.79
4	Deli Serdang	72.07
5	Karo	72.03
6	Samosir	71.82
7	Simalungun	71.78
8	Gunungsitoli	71.71
9	Tebing Tinggi	71.29
10	Toba Samosir	70.76
11	Labuhan Batu	70.37
12	Nias	70.06
13	Humbang Hasundutan	70.02
14	Labuanbatu Utara	69.91
15	Nias Utara	69.90
16	Padangsidempuan	69.84
17	Sibolga	69.77
18	Dairi	69.64
19	Sumatera Utara	69.61
20	Nias Barat	69.43
21	Langkat	69.39
22	Nias Selatan	69.21

No	Kabupaten dan Kota	Umur Harapan Hidup
23	Serdang Bedagai	69.21
24	Tapanuli Utara	69.16
25	Labuhanbatu Selatan	69.16
26	Asahan	68.73
27	Tapanuli Tengah	67.58
28	Batu Bara	67.55
29	Padang Lawas Utara	67.53
30	Padang Lawas	67.43
31	Pakpak Bharat	66.44
32	Tapanuli Selatan	65.28
33	Tanjungbalai	63.87
34	Mandailing Natal	63.05

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2022

Sasaran 3 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2022 telah menetapkan 3 indikator kinerja sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50	4,70	85,45	-1,78	2,23
PDRB	ADHB/Triliun	146,04	127,55	87,34	110,14	115,31
	ADHK/Triliun	78,79	75,58	95,93	70,6	72,18
PDRB per Kapita	ADHB/JutaRupiah	62,69	65,28	104,13	57,13	59,40
	ADHK/JutaRupiah	35,75	38,68	108,20	36,62	37,18
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3				96,21		

Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang 2022

Berdasarkan tabel 2.12 diatas maka tingkat capaian rata-rata pada tahun 2022 untuk Sasaran 3, *Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan* mempunyai rata-rata sebesar **96,21** % pada tahun 2022 dapat diklasifikasikan Memuaskan.

Grafik 2.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 s/d 2022



Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang 2022

Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dari target sebesar 5,50 terealisasi sebesar 4,70 maka capaian persentasenya 85,45 %. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang semakin membaik dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi mencapai 2,23 dan tahun 2020 mencapai titik terendah yaitu -1,78.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi pada tahun 2023 didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi melalui pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung konektivitas dan produksi diharapkan lebih menguat di tahun 2023, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja penanaman modal di Kabupaten Deli Serdang menjadi lebih baik. Letak Kabupaten Deli Serdang yang strategis dan ketersediaan infrastruktur yang sangat memadai dapat menjadi penarik bagi investor untuk menanamkan modal di wilayah ini. Dan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang diprediksi terus membaik pada tahun 2022, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang secara tidak langsung, mengingat membaiknya kinerja ekspor, investasi serta konsumsi rumah tangga yang secara perlahan sudah mulai tumbuh. Beberapa sektor utama penggerak ekonomi Kabupaten Deli Serdang seperti industri pengolahan dan konstruksi secara perlahan sudah semakin membaik seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi.

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Deli Serdang untuk mengatasi hal-hal diatas adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan pada sektor pendidikan;
2. Pembangunan Kesehatan masyarakat yang berkelanjutan;
3. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang cukup dan memadai;
Adapun arah penyediaan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang antara lain adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
 - b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku)
 - c. Meningkatkan infrastruktur air bersih
 - d. Meningkatkan penyediaan air bersih
 - e. Meningkatkan infrastruktur perumahan
 - f. Meningkatkan layanan angkutan darat
 - g. Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan budaya pelayanan umum yang prima bagi masyarakat;
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan yang lebih adil;
7. Mempertahankan kerukunan beragama dan menjunjung tinggi norma-norma kearifan lokal. Dalam upaya mempertahankan kerukunan beragama dan menjunjung tinggi norma-norma kearifan lokal, maka arah kebijakan yang ditempuh antara lain adalah:
 - a. Pembinaan kerukunan umat beragama dan wawasan kebangsaan
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
8. Penerapan teknologi dalam peningkatan daya saing daerah.

Indikator Kinerja PDRB dari target sebesar 146,04 dapat terealisasi sebesar 127,55 untuk PDRB ADHB Kabupaten Deli Serdang, angka ini bersumber dari BPS Sumatera Utara Tahun 2022, namun masih bersifat sementara. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp109,33 triliun menjadi Rp115,31 triliun. Peningkatan PDRB ADHB menunjukkan

terjadi perkembangan ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang semakin besar yang sesuai dengan harga yang berjalan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan sejauh mana kinerja berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyarakat dalam satu periode. Untuk mengetahui fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun, digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK 2010). Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian dan sebaliknya bila negatif menunjukkan terjadinya penurunan kinerja perekonomian yang dilaksanakan dibanding periode sebelumnya. PDRB ADHK Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 yaitu 75,58 angka ini bersumber dari BPS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022, namun masih bersifat sementara. Angka ini menunjukkan peningkatan dari pada tahun sebelumnya yang realisasinya hanya 72,18.

Ketika kasus Pandemi Covid-19 telah semakin menurun, dan membaiknya perekonomian global menyebabkan daya beli masyarakat mengalami perubahan pada tahun 2022. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan sebesar 4,70 %, dan hal ini juga berpengaruh terhadap PDRB ADHK Kabupaten Deli Serdang.

Indikator Kinerja PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari target sebesar 62,69 dapat terealisasi sebesar 65,28 maka persentase capaiannya adalah 104,13 %, artinya melebihi target yang di harapkan. Sedangkan *Indikator Kinerja PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK)* dari target sebesar 35,75 dapat terealisasi sebesar 36,68 maka persentase capaiannya adalah 108,20 %, artinya melebihi target yang di harapkan, angka ini bersumber dari BPS Sumatera Utara Tahun 2022, namun masih bersifat sementara. Tingkat pendapatan suatu wilayah selain dari kemampuan ekonomi wilayah tersebut juga tergantung jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut, jadi wilayah yang mempunyai nilai PDRB tertinggi belum tentu memiliki PDRB per kapita yang tinggi apabila jumlah penduduk wilayah tersebut sangat besar. Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap meningkatnya pendapatan dan tingkat kemakmuran masyarakat. Pendapatan masyarakat ini didekati dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa PDRB perkapita yang disajikan disini belum

memperhitungkan pendapatan yang keluar dan pendapatan yang masuk ke Kabupaten Deli Serdang (*Net Factor Income From Abroad*). Sehingga pendapatan perkapita yang disajikan disini belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat. Kesulitan memperoleh data pendapatan yang keluar-masuk Kabupaten Deli Serdang tersebut, menyebabkan PDRB per kapita tersebut digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk.

Sasaran 4 Meningkatnya Investasi

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Investasi*” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2022 telah menetapkan 1 indikator kinerja sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut yaitu :

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	PMDN/Rp.Juta	1.563.837,20	2.718.192,00	173,82	1.726.633,30	2.704.206,50
	PMA/US\$	184.996,80	83.092,40	44,92	111.287,90	61.492,70
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 4				109,37		

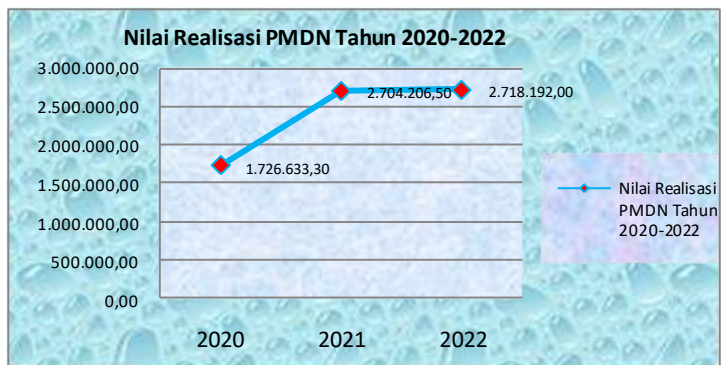
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang 2022

Berdasarkan tabel 2.13 diatas maka tingkat capaian rata-rata pada tahun 2022 untuk Sasaran 4, *Meningkatnya Investasi* memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 109,37 pada tahun 2022 dapat diklasifikasikan Memuaskan, yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA).

Capaian indikator kinerja *Nilai Realisasi Investasi PMDN* pada tahun 2022 telah melebihi target tahun 2022 sebesar 173,82 %. Jika dibandingkan nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.704.206,50 (juta) terhadap nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.718.192 (juta), maka terjadi kenaikan nilai investasi. Hal ini didukung dengan adanya program promosi dan kerjasama antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi. Dan juga mengundang investasi yang seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli, dan hambatan investasi lainnya dengan cara

menciptakan iklim investasi yang kondusif dan juga mengintensifkan promosi peluang investasi. Nilai investasi PMDN di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2020-2022 dapat dilihat secara jelas melalui grafik ini :

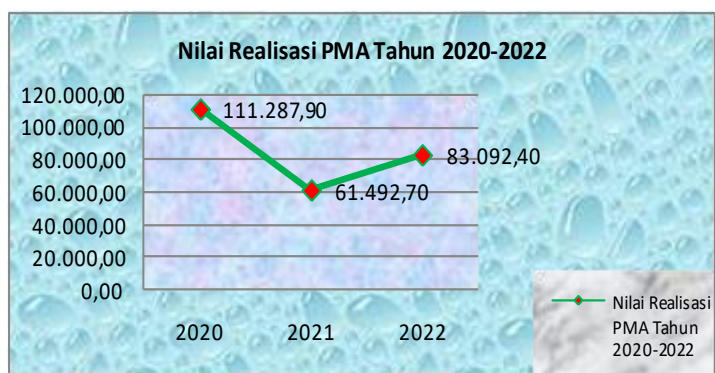
Grafik 2.4
 Nilai Realisasi PMDN Tahun 2020-2022



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang 2022

Sedangkan capaian indikator kinerja *Nilai Realisasi Investasi PMA* pada tahun 2022 tidak mencapai target tahun 2022 yaitu hanya 44,92 %. Jika dibandingkan nilai realisasi investasi PMA tahun 2020 sebesar US\$ 111.287,90 (ribu) terhadap nilai realisasi investasi PMA tahun 2021 sebesar US\$ 61.492,70 (ribu), maka terjadi penurunan investasi, akan tetapi mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 dengan realisasi US\$ 83.092,40 (ribu). Hal ini terjadi karena belum adanya pengawasan pengendalian PMA untuk tingkat Kabupaten. Hal ini dapat dilihat lebih jelas melalui grafik di bawah ini :

Grafik 2.5
 Nilai Realisasi PMA Tahun 2020-2022



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang 2022

Kebijakan arah pembangunan di Kabupaten Deli Serdang sangat berpengaruh terhadap kondisi iklim berinvestasi di Kabupaten Deli Serdang. Kebijakan arah pembangunan di Kabupaten Deli Serdang yang bertumpu pada 3 pilar pembangunan

yaitu: peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dukungan para stakeholders dari investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri sangat diharapkan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pengambilan kebijakan yang strategis dalam rangka untuk meningkatkan investasi daerah harus menjadi perhatian yang serius, seperti menciptakan iklim usaha yang sehat, pemberian kemudahan dan kejelasan prosedur perizinan, serta mempersiapkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah telah menerapkan layanan terpadu satu pintu dengan ketersediaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang. Melalui Dinas ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta mendorong percepatan penciptaan perluasan investasi bagi daerah dan juga tercipta iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Sasaran 5 Meningkatnya Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “ *Meningkatnya Perlindungan dan Kesejahteraan Bagi Masyarakat* ” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal tahun 2022 telah menetapkan 2 indikator kinerja sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut yaitu :

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Kemiskinan	%	4,08	3,62	111,27	3,88	4,01
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,34	5,47	97,57	9,50	9,13
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 5				104,42		

Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.14 di atas maka tingkat capaian rata-rata pada tahun 2022 untuk Sasaran 5, *Meningkatnya Perlindungan dan Kesejahteraan Bagi Masyarakat* memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar **104,42** pada tahun 2022 dapat diklasifikasikan Memuaskan, yang terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Kemiskinan dengan capaian 111,27 dan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan capaian 97,57.

Indikator kinerja *Persentase Kemiskinan* pada tahun 2022 merupakan indikator pada sasaran *Meningkatnya Perlindungan dan Kesejahteraan Bagi Masyarakat*. Berdasarkan data informasi yang didapat dari Badan Pusat Statistik

(BPS) Kabupaten Deli Serdang, pada tahun 2022 target 4,08 dengan realisasi 3,62 maka tingkat persentase capaiannya sebesar 111,27 %. Namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 4,01 terhadap realisasi tahun 2022 sebesar 3,62, maka terjadi penurunan sedikit tingkat kemiskinan. Hal ini dapat terlihat secara jelas dengan grafik di bawah ini :

Grafik 2.6
Persentase Kemiskinan 2020 s/d 2022



Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang 2022

Persentase kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan walaupun di tengah pandemi Covid-19, hal ini berakibat kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan nasional pada tahun 2021 mengalami penurunan meskipun dampak krisis dari pandemi COVID-19 masih belum sepenuhnya terpulihkan.

Adapun sangat diperlukan upaya penguatan jaring pengaman sosial, penyediaan akses kebutuhan dasar dan pemberdayaan warga miskin, serta peningkatan perlindungan masalah sosial melalui lembaga sosial dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman. Efektivitas program stimulus pada 2020 harus menjadi pelajaran bagi upaya perbaikan tahun ini. Program perlindungan sosial massal akan dilanjutkan. Di antaranya, memberikan program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM); program kartu sembako untuk 18,8 juta KPM; bansos tunai (10 juta KPM); dan siswa penerima bantuan program Indonesia pintar (PIP) sebanyak 20,1 juta anak. Terdapat pula program mahasiswa penerima kartu Indonesia pintar (KIP) sebanyak 1,2 juta orang; subsidi listrik terhadap 32,8 juta rumah tangga miskin dan penerima subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebanyak 29,9 juta debitur; serta plafon KUR kita naikan dari Rp 190 triliun menjadi Rp 220 triliun. Selain itu, program subsidi energi terus dilanjutkan. Misalnya, subsidi LPG sebanyak 7,5 juta metrik ton dan solar 15,8 juta kiloliter. Untuk meringankan beban petani, ada subsidi pupuk sebanyak 8,2 juta ton. Lalu, untuk membantu kebutuhan rumah layak dan sehat bagi rakyat, pemerintah memberikan subsidi bantuan uang muka 157,5 ribu unit rumah. Masih banyak lagi berbagai program stimulus seperti di sektor perpajakan, transportasi, dan pariwisata.

Indikator Kinerja Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan data informasi yang di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang, pada Tahun 2022 dengan target 5,34 dengan realisasi 5,47 maka tingkat persentase capaian 97,57 % berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 yang berarti sedikit lagi mencapai target yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 9,13 terhadap realisasi tahun 2022 sebesar 5,47, maka terjadi penurunan yang signifikan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini tentu saja sejalan dengan Tingkat Kemiskinan yang mengalami penurunan juga. Penduduk yang bekerja sebanyak 7,32 juta orang meningkat sebanyak 285 ribu orang. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (1,32%), sedangkan lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (1,16%). Untuk mengatasi dampak terhadap pengangguran, diperlukan dukungan program tahun 2023 yang dapat menyentuh sektor usaha mikro, kecil dan menengah serta mampu menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan terkini. Selain itu juga, dilakukan pelatihan yang mendukung kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja baru.

Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan dan Irigasi

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “ *Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan dan Irigasi* “ Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2022 telah menetapkan 2 indikator kinerja sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Jalan dalam kondisi baik	%	74	74,24	100,32	72,14	73,19
Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	78	78,04	100,05	75,8	76,65
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 6				100,19		

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang 2022

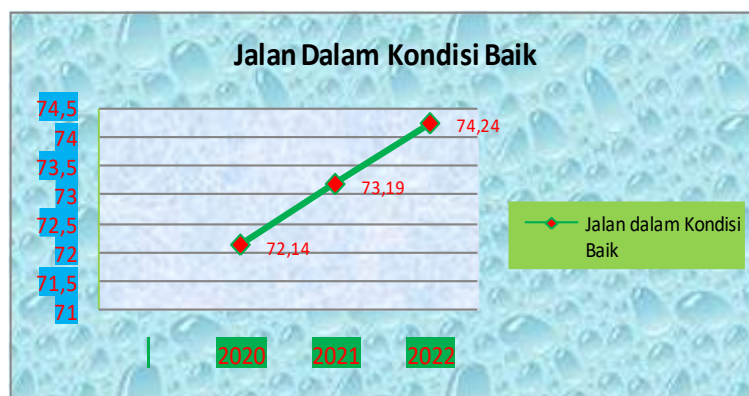
Berdasarkan tabel 2.16 diatas maka tingkat capaian rata-rata pada tahun 2022 untuk sasaran 6, *Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan dan Irigasi* sebesar 100,19 pada tahun 2022 dapat diklasifikasikan Memuaskan, yang terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Jalan dalam Kondisi Baik dengan capaian 100,32, dan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik dengan capaian 100,05.

Indikator Kinerja Jalan dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 merupakan indikator pada sasaran *Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan dan Irigasi*. Untuk memenuhi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana dimaksud. Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa persentase panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun 2020 s/d 2022 terjadi peningkatan diantara Tahun 2021 s/d 2022 sebesar 1,05%. Hal ini dapat dilihat dari capaian tahun 2021 sebesar 100,26% sedangkan tahun 2022 sebesar 100,32%. Jalan dalam kondisi baik tahun 2022 adalah penjumlahan dari panjang jalan dalam kondisi baik yaitu 1.472,357 Km dan panjang jalan dalam kondisi sedang yaitu 57,280 Km sehingga dihasilkan total panjang jalan dalam kondisi baik senilai 20 1.529,637 Km dibagi panjang seluruh jalan Kabupaten yaitu 2.060,292 Km sehingga didapatkan Persentase Capaian tahun 2022 sebesar 100,32 %.

Data kinerja tercapai sebesar 100,32 dikarenakan keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam menunjang Program Penyelenggaraan Jalan. Dan yang menjadi penyebab keberhasilannya adalah meningkatnya kinerja dan pemeliharaan jaringan jalan sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan jalan, serta peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan fungsi jaringan jalan. Adapun indikator kinerja jalan dalam kondisi baik sampai pada akhir priode RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022 dapat di lihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.7

Jalan Dalam Kondisi Baik 2020 s/d 2022



Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang 2022

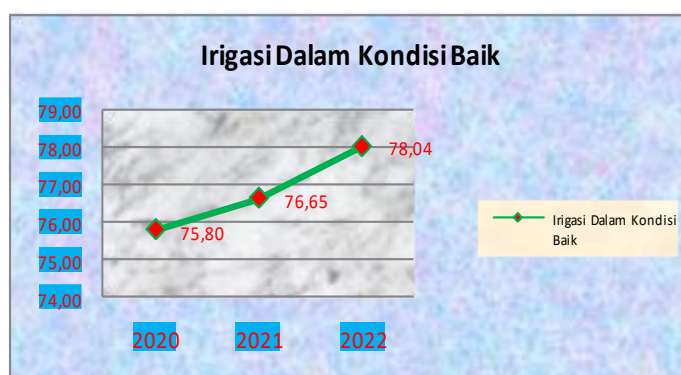
Indikator Kinerja Irigasi dalam kondisi baik memiliki target 78 dan realisasinya adalah sebesar 78,04 sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,05 pada tahun 2022 hal ini dapat di simpulkan capaian kinerja pada indikator ini dengan kriteria memuaskan. Persentase Capaian luas irigasi dalam kondisi baik tahun 2021 s/d 2022 terjadi peningkatan sebesar 1,39%, Luas irigasi dalam kondisi baik tahun 2022

yaitu 18.002 Ha dibagi luas irigasi Kabupaten yaitu 23.068 Ha sehingga didapatkan persentase capaian tahun 2022 sebesar 100,05%.

Dan yang menjadi penyebab keberhasilannya adalah meningkatnya kinerja dan pemeliharaan jaringan irigasi sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi, serta peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan fungsi jaringan irigasi. Kedepannya diupayakan agar pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menunjang hasil pertanian dalam hal ini akses irigasi dapat lebih ditingkatkan. Adapun indikator kinerja Irigasi dalam kondisi baik sampai pada akhir periode RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022 dapat di lihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.8

Irigasi Dalam Kondisi Baik 2020 s/d 2022



Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang 2022

Sasaran 7 Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2021 telah menetapkan 3 indikator kinerja Utama sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16

Capaian Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Cakupan Pelayanan Air Minum	%	77,50	77,29	99,73	75,12	76,17
Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,14	0,15	92,86	0,17	0,14
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	87,50	86,75	99,14	84,73	85,60
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 7				97,24		

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang 2022
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang 2022

Berdasarkan tabel 2.19 diatas maka tingkat capaian rata-rata pada tahun 2022 untuk Sasaran 7 *Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman* memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 97,24 pada tahun 2022 dapat diklasifikasikan Memuaskan, yang terdiri dari Indikator Kinerja yaitu Indikator Kinerja Cakupan pelayanan air minum dengan realisasi 77,29, Indikator Kinerja Persentase areal kawasan kumuh dengan realisasi 0,15 dan Indikator Kinerja Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dengan realisasi 86,75.

Indikator Kinerja Cakupan pelayanan air minum, pada tahun 2022 dengan capaian 99,73, *Cakupan pelayanan air minum* mendapatkan realisasi sebesar 77,29 dari target 77,50, pencapaian ini sangat mendekati namun bila berpedoman pada target nasional 100 % pada akhir tahun RPJMD 2019-2024, pencapaian ini masih sangatlah jauh. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah 590.955 rumah tangga. Dari jumlah tersebut rumah tangga yang telah berakses air minum untuk tahun 2022 mencapai 450.122 rumah tangga. Artinya capaian indikator persentase rumah tangga berakses air minum untuk tahun 2022 sebesar 77,29 % dengan tingkat capaian kinerja 99,73 % (kategori sangat tinggi). Keberhasilan capaian ini diperoleh melalui beberapa pelaksanaan kegiatan seperti :

1. Pembangunan Infrastruktur Air Minum Perdesaan. Pembangunan Infrastruktur Air Minum Perdesaan berupa pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (SPAM) di 6 wilayah perdesaan di 4 kecamatan dengan capaian 530 SR dan pengembangan/perluasan jaringan perpipaan perdesaan yang belum tersentuh oleh PDAM dengan hasil 270 SR akses air minum di 3 desa di 3 kecamatan. Ada pula pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pengadaan bahan material dan upah kerja pengelolaan air minum dengan capaian 1.966 m jaringan perpipaan yang mampu melayani 1.384 sambungan rumah.
2. Pelaksanaan DAK Bidang Air Minum. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum merupakan salah satu sumber pendanaan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk dapat mendukung pembangunan sektor air minum yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Di tahun 2022 hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Air Minum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu berupa peningkatan SPAM sebanyak 930 SR di 5 desa di 5 kecamatan.
3. Pelaksanaan program PAMSIMAS. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang

terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi). Di Kabupaten Deli Serdang sendiri, pada tahun 2022 yang merupakan tahap III dari pelaksanaan program PAMSIMAS telah berhasil menyediakan 774 SR akses air minum.

4. Pelaksanaan pengembangan jaringan distribusi DDUB NUWSP (Dana Bersama Urusan Daerah National Urban Water Supply Program). Sesuai mandat RPJMN Tahun 2020-2024, terjadi penyesuaian target akses air minum dari akses “layak” menjadi akses “aman” sesuai dengan standar Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk mendukung pencapaian target akses universal air minum, khususnya di wilayah perkotaan, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia melaksanakan Program NUWSP. Program ini akan memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dan PDAM untuk dapat meningkatkan dan memperluas cakupan pelayanan air minum perpipaan bagi masyarakat perkotaan, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di Tahun 2022, Program DDUB NUWSP ini telah berhasil menyediakan akses aman air minum sebanyak 2400 SR.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas telah berhasil menyediakan akses air minum dengan total 6.288 Sambungan Rumah. Kinerja yang sangat baik ini tentu saja harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya infrastruktur dasar permukiman yang layak dan aman.

Indikator Kinerja persentase areal kawasan kumuh realisasi kinerja sebesar 0,15 % dari target 0,14 % maka persentase capaian kinerja sebesar 92,86 % pada tahun 2022, hal ini menunjukkan menurunnya areal kawasan kumuh namun capaian kinerja belum memenuhi dari target yang direncanakan. Luasan permukiman kumuh di Kabupaten Deli Serdang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 247 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang, yang meliputi 58 (lima puluh delapan) lokasi di 14 (empat belas) kecamatan dengan total luas sebesar 533,5 (lima ratus tiga puluh tiga koma lima) hektar.

Berdasarkan klasifikasi kewenangan di atas, dari total 533,5 hektar luasan kawasan kumuh yang tertuang di Surat Keputusan Bupati Deli Serdang, luasan kawasan kumuh yang penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi seluas 437,7 hektar yang meliputi 50 (lima puluh) lokasi di 13 (tiga belas) kecamatan. Luas kawasan kumuh yang tertangani sampai dengan tahun 2022 adalah 50,86 Ha. Maka Luas kawasan kumuh sampai tahun 2022 menjadi 386,84 Ha. Dengan demikian dibandingkan total wilayah Kabupaten Deli Serdang

seluas 249.772 hektar, persentase areal kawasan kumuh untuk tahun 2022 adalah 0,15%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, dimana luasan kawasan kumuh adalah sebesar 432,41 hektar, artinya ada capaian penurunan luasan kawasan kumuh di 2022 sebesar 0,89 hektar. Berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2022 dalam menangani kawasan kumuh, maka persentase areal kawasan kumuh berkurang dan pencapaian kerjanya meningkat dari target capaian di 2022 sebesar 0,15%.

Capaian kinerja tercapai disebabkan oleh pencapaian penanganan kawasan kumuh yang terdiri dari beberapa faktor yang mempengaruhi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, antara lain adalah :

1. Indikator Bangunan Gedung
2. Indikator Jalan Lingkungan
3. Indikator Drainase Lingkungan
4. Indikator Penyediaan Air Minum
5. Indikator Pengelolaan Limbah
6. Indikator Pengelolaan Persampahan
7. Indikator Proteksi Kebakaran

Dari ketujuh indikator di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Kawasan Permukiman telah berperan serta dalam penanganan kumuh di beberapa aspek diantaranya terkait bangunan gedung, pada tahun 2022 telah dilaksanakan program bedah rumah, yaitu bantuan material perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 199 unit bagi masyarakat kurang mampu di 22 kecamatan. Perbaikan rumah tidak layak huni berasal dari dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dan APBD. Perbaikan yang sumber dananya berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebanyak 24 unit dan dari APBD sebanyak 175 unit. Pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini mencapai keberhasilan 100% dari target yang ditetapkan. Di aspek jalan lingkungan, pada tahun 2022 telah dilaksanakan pembangunan jalan lingkungan di kawasan kumuh sepanjang 82.324 m.

Pada aspek drainase lingkungan sejak tahun 2022 diampu oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi. Sedangkan penyediaan air minum, akses sanitasi, dan penyediaan infrastruktur persampahan diampu oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Untuk penanganan pengelolaan sampah wewenangnya berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan. Begitu juga terkait aspek proteksi kebakaran diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas

Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai penanganan kumuh kedepannya diperlukan koordinasi dan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat, baik dari masyarakat, aparat pemerintah, pihak swasta dan mitra kerja.

Indikator kinerja *Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi* realisasi kinerja sebesar 86,75% dari target 87,50% maka persentase capaian kinerja sebesar 99,14% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja yang hampir mendekati dari target yang direncanakan. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan dan pembuangan air limbah, air hujan/ drainase dan sampah.

Sanitasi merupakan salah satu sarana prasarana dasar permukiman yang harus dimiliki setiap rumah. Sanitasi pada setiap rumah tinggal juga menentukan tingkat kesehatan keluarga tersebut. Oleh karena itu, akses sanitasi layak sangat penting. Sanitasi juga menjadi satu program prioritas pemerintah pusat yang ditargetkan mencapai 100%. Hasil perhitungan capaian kinerja sanitasi di Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 belum memenuhi target yaitu 86,75% dengan target 87,50% dan capaian kinerja 99,14%. Jumlah seluruh rumah tinggal di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 yaitu 454.267 rumah tinggal. Sedangkan jumlah rumah tinggal yang sudah mengakses sanitasi layak berjumlah 388.800 rumah tinggal. Bantuan penyediaan tangki septik tahun 2022 ini berhasil menyediakan sarana air limbah domestik untuk 707 rumah tinggal di 24 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Untuk yang bersumber dari DAK, ada pembangunan 6 unit IPAL di 6 lokasi desa di 6 kecamatan yang per unitnya diperkirakan mampu menyediakan sarana air limbah domestik untuk ±50 rumah tinggal. Selain itu ada juga pembangunan MCK baik MCK di fasilitas umum maupun di permukiman.

Adapun yang menjadi permasalahan sehingga target kinerja tidak tercapai yaitu di tahun 2022 ada kesalahan dalam penetapan standar satuan harga untuk pembangunan tangki septik, sehingga dari pagu anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembangunan sesuai target, sehingga harus dilakukan penyesuaian realisasi unit di lapangan. Selain itu ketersediaan lahan juga masih menjadi kendala, sulitnya mendapatkan lokasi membuat pembangunan tidak menjangkau ke banyak desa dan kecamatan. Untuk tahun berikutnya hal-hal diatas perlu menjadi perhatian dan perbaikan sehingga kondisi tidak tercapainya target kinerja diharapkan tidak terjadi lagi. Namun jika dilihat dari pencapaian di tahun 2021, maka di tahun 2022 ini persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Deli

Serdang mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Deli Serdang.

Sasaran 8 Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik*” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2022 telah menetapkan 1 indikator kinerja utama sasaran. Indikator kinerja sasaran tersebut setelah melakukan reviu terhadap RPJMD pada tahun 2022. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini sesuai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Luasan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	%	16,60	15,46	93,13	14,67	15,46
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 8				93,13		

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang 2022

Berdasarkan tabel 2.20 diatas maka tingkat capaian pada tahun 2022 untuk Sasaran 8 *Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik* memiliki capaian kinerja Memuaskan pada tahun 2022, yang Indikator Kinerja Luasan RTH Publik di Wilayah Perkotaan dengan realisasi 15,46 % dari target 16,60 %.

Kualitas lingkungan hidup ditentukan dari kelayakan lingkungan yang menjadi tempat tinggal masyarakat. Salah satu kriteria kawasan yang nyaman adalah memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman atau area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

RTH merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan kota/kawasan perkotaan. Selain berfungsi sebagai sumber oksigen dan penyerap polusi udara yang ditimbulkan oleh pabrik-pabrik dan kendaraan, RTH juga berfungsi memperindah penampilan kota/kawasan perkotaan. RTH memiliki beragam fungsi meliputi fungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. RTH ditujukan untuk

menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Keberadaan RTH tidak hanya menjadikan kota sebagai tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman dan asri. Dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, maka pembangunan infrastruktur dan sarana kota merupakan faktor yang penting dalam pembangunan skala prioritas Kabupaten Deli Serdang, termasuk penataan dan pengelolaan RTH sebagai sarana publik. RTH selain mempunyai fungsi sebagai penyeimbang ekosistem kota yaitu fungsi ekologis, juga mempunyai fungsi sosial dan estetika kota sehingga dalam penataan maupun pengelolaannya harus dapat mencerminkan fungsi-fungsi tersebut, agar terbentuk kawasan Deli Serdang yang representatif dan mempunyai ciri khas yang dapat dibanggakan sehingga dapat meningkatkan "nilai jual" Kabupaten Deli Serdang.

Kabupaten Deli Serdang dengan luas 249.772 Ha sampai dengan tahun 2022 memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik seluas 99 Ha, bertambah 2,4 Ha di tahun 2022 yaitu melalui pembangunan taman bunga Sibolangit di Kecamatan Sibolangit seluas 1,4 Ha dan juga penataan RTH di kawasan Masjid Galang seluas 1 Ha. Dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang 249.772 Ha, luasan RTH publik yang semestinya tersedia adalah sebesar 20 % dari luas wilayah Deli Serdang yaitu 640,27 Ha. Walaupun luasan RTH publik mengalami peningkatan, namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 16,60%. Namun capaian kinerja masih dalam kategori sangat tinggi. Kedepannya perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kinerja dan perbaikan terutama di faktor-faktor yang masih menjadi penghambat seperti upaya memperluas ketersediaan lahan untuk pembangunan RTH publik dan juga upaya untuk melaksanakan peralihan PSU perumahan (dalam hal ini RTH) dari pengembang menjadi aset pemerintah daerah. Dan kinerja yang sampai saat ini sudah tercapai juga harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan cara :

- a. Pemerintah daerah harus dapat tetap mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada, serta tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain;
- b. Mempertahankan koordinasi yang baik antar instansi terkait dalam pengelolaan RTH bahkan memungkinkan pengembangan pola kemitraan mengenai pengelolaan RTH dengan berbagai stakeholder;
- c. Melibatkan peran serta aktif dari unsur kewilayahan (kecamatan/desa) dalam pengelolaan dan pengendalian RTH terutama yang berada di lingkungan sekitarnya;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan komunikasi tentang pentingnya peranan RTH yang memiliki fungsi ekologi, sosial dan estetika.

Sasaran 9 Meningkatnya Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan*” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2022 telah menetapkan 1 indikator kinerja utama sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,00	57,37	89,64	61,90	59,00
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 9				89,64		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang 2022

Berdasarkan tabel 2.21 diatas maka tingkat capaian rata-rata pada tahun 2022 untuk Sasaran 9 *Meningkatnya Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan* memiliki capaian kinerja sebesar 89,64 pada tahun 2022 dapat diklasifikasikan Memuaskan.

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berhasil mendapat capaian kinerja dengan klasifikasi Memuaskan namun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain :

- a. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- b. Belum sinerginya program penanggulangan dan pencemaran antar sektor terkait;
- c. Pemantauan kualitas lingkungan dan pengawasan terhadap analisis mengenai dampak lingkungan masih kurang;
- d. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha untuk mengelola limbahnya dengan baik;

Sasaran 10 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persampahan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persampahan*” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2022 telah menetapkan 1 indikator kinerja utama sasaran. Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Sasaran 10

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Sampah Terkelola 3R	%	30,00	28,00	93,33	20,17	18,09
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 10				93,33		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang 2022

Berdasarkan tabel 2.23 diatas maka tingkat capaian pada tahun 2022 untuk Sasaran 10 *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persampahan* memiliki capaian kinerja sebesar 93,33% pada tahun 2022 dapat diklasifikasikan Memuaskan, yang memiliki Indikator Kinerja Persentase Sampah Terkelola 3R dari target 30 terealisasi 28,00, data ini bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dengan capaian kinerja 93,33 mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 20,97% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain :

- Melaksanakan pembinaan dan pelatihan 3R (Reuse, Recycle, Reduce) kepada masyarakat dan melakukan pendampingan terhadap kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R);
- Meningkatkan pendampingan dengan pemberdayaan Bank Sampah oleh Lembaga Asosiasi Bank Sampah Indonesia Sumatera Utara (ASOBSI SUMUT) dan Asosiasi Bank Sampah Deli Serdang Sumatera Utara (ASOBSI) Deli Serdang;
- Melaksanakan pemeliharaan kebersihan meliputi penyapuan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah.

Sasaran 11 Meningkatkan Keterpaduan Rencana Tata Ruang

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Keterpaduan Rencana Tata Ruang*” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2022 telah menetapkan 1 indikator kinerja utama sasaran, pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Sasaran 11

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Perencanaan Tata Ruang	%	58,00	64,28	110,83	46,00	57,14
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 11				110,83		

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang 2022

Berdasarkan tabel 2.24, tingkat capaian rata-rata untuk sasaran 11 pada Sasaran *Meningkatnya Keterpaduan Rencana Tata Ruang* dengan kategori Memuaskan dengan kategori 110,83 % pada tahun 2022, adapun sasaran ini terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu Indikator Kinerja Persentase Perencanaan Tata Ruang dengan realisasi 64,28 % dari target 58 %.

Indikator *Persentase Perencanaan Tata Ruang* pada tahun 2022 dengan capaian 110,83 % berarti sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan melebihi target, hal ini dapat dilihat dengan telah disusunnya Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021-2041, kemudian telah disusunnya Ranperbup tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pantai Labu – Beringin tahun 2020-2040, dan telah disusunnya Ranperbup tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Prioritas Sekitar Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi di Kabupaten Deli Serdang. Ketercapaian program dan kegiatan pada Indikator Kinerja ini dapat dilihat sebagaimana yang tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.21
Capaian Program Pada Persentase Perencanaan Tata Ruang

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Perencanaan Tata Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Keg	1 Keg	100
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Keg	1 Keg	100
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dok	1 Dok	100
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Keg	1 Keg	100

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan dalam menunjang keberhasilan sasaran ke 11 yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota, Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang semuanya berhasil terealisasi 100 % sesuai dengan target yang ditentukan.

Berdasarkan RTRW 2019 – 2039 Kabupaten Deli Serdang dijelaskan bahwa terdapat tiga strategi penataan ruang yang dapat menunjang pembangunan dari RPJMD 2019 – 2024 yaitu:

1. Strategi untuk peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan yang produktif dan berdaya saing tinggi, meliputi:
 - a) Mengembangkan kawasan-kawasan agropolitan;
 - b) Mengembangkan kawasan peruntukkan industri;
 - c) Mendorong pengolahan komoditi sektor-sektor unggulan pada pusat-pusat produksi sektor unggulan;
 - d) Meningkatkan aksesibilitas dari pusat-pusat produksi sektor unggulan ke pusat pemasaran; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 IV-31;
 - e) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan.
2. Strategi untuk peningkatan luas dan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, meliputi:
 - a) Mempertahankan luasan lahan pertanian dan perkebunan serta mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan yang baru pada lahan yang kurang produktif;
 - b) Meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah menuju swasembada pangan;
 - c) Memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk semua aktivitas yang memberikan nilai tambah yang positif bagi pengembangan pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;

- d) Memanfaatkan morfologi wilayah dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi sebagai potensi dalam pengembangan kawasan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
3. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional, meliputi:
- Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam sebagai penggerak utama perekonomian wilayah;
 - Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - Mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Sasaran 12 Meningkatnya Nilai-Nilai Keagamaan, Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Nilai-Nilai Keagamaan, Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat*” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2022 telah menetapkan 1 indikator kinerja utama sasaran, Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Sasaran 12

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	%	85,00	84,50	99,41	93,50	96,56
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 12				99,41		

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang 2022

Berdasarkan tabel 2.26, tingkat capaian rata-rata untuk sasaran 12 pada Sasaran *Meningkatnya Nilai-Nilai Keagamaan, Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat* dengan kategori memuaskan dengan kategori 99,41 % pada tahun 2022, adapun sasaran ini terdiri 1 Indikator Kinerja yaitu Indikator

Kinerja Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan realisasi 84,50 dari target 85,00 yang berarti kurang dari target yang ditetapkan.

Keberhasilan capaian tersebut diukur dengan banyaknya jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Tahun 2022 didapat dari : 90 kegiatan penertiban PKL, 30 kegiatan penertiban Reklame, 50 kegiatan pemeriksaan IMB, 20 kegiatan Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT), 24 Kegiatan Pemeriksaan Galian C, 27 kegiatan Pemeriksaan Izin Peternakan, 132 kegiatan Operasi Yustisi Covid-19.

Adapun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli wilayah se Kabupaten Deli Serdang;
2. Jumlah PPNS dan PNS dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang yang minim/kurang memadai.

Dan untuk mengatasi permasalahan diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang telah mengajukan beberapa solusi seperti :

1. Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun pemerintah provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah;
2. Mengusulkan penambahan personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dan pengikutsertaan aparatur dalam pendidikan PPNS dan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja.

Sasaran 13 Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya Lokal

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya Lokal*” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2022 telah menetapkan 1 indikator kinerja utama sasaran, Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Sasaran 13

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Seni Budaya dan Tradisi yang Dilestarikan	%	45,00	56,41	125,36	43,00	47,70
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 13				125,36		

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang 2022

Berdasarkan tabel 2.27, tingkat capaian rata-rata untuk sasaran 13 pada Sasaran *Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya Lokal* dengan

kategori memuaskan dengan kategori 125,36 % pada tahun 2022, adapun sasaran ini terdiri 1 Indikator Kinerja yaitu Indikator Kinerja Persentase Seni Budaya dan Tradisi yang Dilestarikan dengan realisasi 56,41 dari target 45.

Indikator Kinerja Persentase Seni Budaya dan Tradisi yang Dilestarikan pada tahun 2022 dengan Realisasi 56,41 % merupakan hasil yang memuaskan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2022 pencapaian kinerja mengalami peningkatan di bandingkan di tahun 2021. Tahun 2022 lebih kepada menunjang kegiatan pemerintah, dengan melaksanakan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) dan pendataan lembaga adat yang ada di Kabupaten Deli Serdang. PKD Sendiri merupakan bentuk dari gambaran kondisi dan situasi Kabupaten Deli Serdang Tempoe Dulu. Selain itu kegiatan *ceremonial* merupakan bentuk dari dukungan Bidang Kebudayaan dalam mensupport seniman (sanggar) dalam mengekspresikan seni melalui kegiatan *ceremonial*. Dalam hal ini, Bidang Kebudayaan melestarikan dan memberi kesempatan kepada 60 Sanggar Aktif untuk berpartisipasi dalam melestarikan budaya dan lima lembaga adat dalam membantu dan memberdayakan tradisi melalui kegiatan PKD. Dengan begitu Indikator Kinerja Persentase Seni Budaya dan Tradisi yang Dilestarikan dapat tercapai dan terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan. Tercapainya target tersebut juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan seperti Pengiriman Tim Kesenian Pada Kegiatan MTQ DAN FSN Kabupaten Deli Serdang, Deli Serdang Culture Night, dan juga Pelestarian Kesenian Tradisional.

Sasaran 14 Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2022 telah menetapkan 2 indikator kinerja utama sasaran, Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Sasaran 14

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	Nilai	71,55	70,18	98,09	64,39	67,08
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 14				99,05		

Sumber : Data Penilaian BPK-RI dan Kemenpan dan RB

Berdasarkan tabel 2.28, tingkat capaian rata-rata untuk sasaran 14 pada Sasaran *Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* dengan kategori memuaskan dengan kategori 99,05 % pada tahun 2022, adapun sasaran ini terdiri 2 Indikator Kinerja yaitu Indikator Kinerja Opini BPK dengan realisasi WTP dari target WTP dan Indikator Kinerja Evaluasi AKIP Kabupaten dengan realisasi penilaian BB (70,18).

Indikator Kinerja Opini BPK dengan Realisasi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) merupakan hasil yang memuaskan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, namun ini masih menggunakan data pada tahun 2021 karena hasil tahun 2022 belum dirilis oleh BPK-RI sampai saat penyusunan laporan ini. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam Laporan Keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemkab Deli Serdang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemkab Deli Serdang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemkab Deli Serdang, serta evaluasi atas penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan, BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK “Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Menurut opini BPK, Kabupaten Deli Serdang menyajikan secara wajar Laporan Keuangan (LK) Pemkab Deli Serdang TA 2021 yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) realisasi kinerja pada indikator kinerja ini sebesar 70,18 untuk tahun 2022. Penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan kepada peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akan tetapi masih banyaknya Perangkat

Daerah belum mengacu kepada sistem yang berlaku, walaupun pelaporan kerjanya telah di laporkan.

Berdasarkan hasil Evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Deli Serdang oleh Kementerian PAN dan RB tahun 2022 menunjukkan secara umum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum secara intensif melakukan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Komponen-komponen AKIP berdasarkan hasil Evaluasi masih mengandung banyak kelemahan meliputi :

1. Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/*measurable*, relevan dan cukup.
2. Penjabaran kinerja belum menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja.
3. Terdapat beberapa target tahun 2022 pada level pusat maupun PD yang lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
4. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
5. Belum terdapat pedoman mengenai pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang lengkap termasuk mekanisme pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja.
6. Pemerintah Daerah telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasilnya belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
7. Pemantauan kinerja telah menggunakan aplikasi e-sakip, namun belum terlihat secara langsung pencapaian secara berkala atas target Bupati.
8. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, maka Kementerian PAN dan RB merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut yaitu :

1. Melakukan rewiu dan perbaikan dokumen perencanaan agar indikator di level PD berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut .
2. Mendorong PD untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
3. Memperbaiki penjabaran kinerja sesuai dengan PermenPANRB NO.86 Tahun 2021.
4. Menyusun pedoman SAKIP Kabupaten Deli Serdang dengan memastikan minimal aspek Perencanaan , pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta evaluasi internal secara komprehensif.
5. Menerapkan kebijakan *reward and punishment* dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi dengan kinerja masing-masing individu.
6. Mengoptimalkan aplikasi e-sakip sebagai alat bantu untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap PD sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya.

7. Menjadikan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan dokumen perencanaan selanjutnya.
8. Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat agar hasil evaluasi akuntabilitas yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja.

Sasaran 15 Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran “*Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah*” Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada awal Tahun 2022 telah menetapkan 1 indikator kinerja utama sasaran, Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Sasaran 15

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021
		Target	Realisasi	%		
				Realisasi		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	71,69	83,58	116,59	64,79	67,21
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 14				116,59		

Sumber : Bagian Organisasi Setdakab Deli Serdang 2022

Berdasarkan tabel 2.29, tingkat capaian rata-rata untuk sasaran 15 pada Sasaran *Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah* dengan kategori memuaskan dengan kategori 116,59% pada tahun 2022, adapun sasaran ini terdiri 1 Indikator Kinerja yaitu Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan realisasi 83,58 dari target 71,69, hal ini menunjukkan capaian yang melebihi target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), realisasi kinerja pada indikator kinerja ini sebesar 83,58 pada tahun 2022 dari target 71,69, dari jumlah perangkat daerah yang melaksanakan indeks kepuasan masyarakat 53 perangkat daerah dan untuk sementara ini yang sudah menyerahkan Laporan IKM dan memiliki kategori baik dan sangat baik berjumlah 46 perangkat daerah. Salah satu pelayanan publik yang dilakukan aparatur pemerintah adalah menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja publik oleh aparatus pemerintah kepada masyarakat, penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan kepadanya, Indeks ini digunakan sebagai tolak ukur dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat, apakah telah memenuhi standar pelayanan yang telah diisyaratkan oleh pemerintah dan Kepuasan Masyarakat dapat diketahui dengan melihat kualitas pelayanan dari masing-masing indikator yang telah ditentukan.

4. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Kabupaten Deli Serdang untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati, RPJMD, berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Untuk periode 2019-2024, RPJMD Kabupaten Deli Serdang disahkan melalui Perda No. 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD juga sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama menjadi pimpinan pemerintahan.

RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2019-2024, dimaksudkan untuk mewujudkan kesepakatan bersama dari segenap *Stakeholders* pembangunan Kabupaten menyangkut strategi, kebijakan dan prioritas program serta kegiatan pembangunan Kabupaten dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu periode 2019-2024. Berdasarkan maksud tersebut maka tujuan pokok penetapan RPJMD Kabupaten Deli Serdang adalah untuk menggambarkan dan mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, untuk mewujudkan cita-cita pembangunan masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) bagi unit kerja dibawah lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati Deli Serdang sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik Perangkat Daerah Kabupaten, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Bupati Deli Serdang yang tertuang dalam RPJMD.

Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan beserta Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir RPJMD sudah memenuhi target RPJMD Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang tertera pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.26

Capaian Sasaran 1 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021	Target Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Rata-rata lama sekolah	%	10,00	10,27	102,70	10,09	10,10	10,04	102,29

Berdasarkan tabel 2.30 Sasaran 1 Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, pada tahun 2022 capaian realisasi sebesar 102,70 %, dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaiannya 102,29 % maka dapat dilihat bahwa capaiannya melebihi 0,41 % dari target akhir RPJMD. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Meningkatnya akses layanan pendidikan dengan bertambahnya daya tampung sekolah
2. Meningkatnya mutu sekolah, lembaga, siswa dan guru.

Lamanya pendidikan seseorang sangat ditentukan oleh kombinasi pengaruh yaitu perbedaan upah atau pendapatan antara sektor modern dengan sektor tradisional, probabilitas keberhasilan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern dengan adanya pendidikan, biaya pendidikan langsung yang harus ditanggung siswa/keluarganya, dan biaya tidak langsung dari pendidikan. Faktor lain yang sangat mempengaruhi tingkat permintaan pendidikan adalah pengaruh tradisi budaya, gender, status sosial, pendidikan orang tua, dan besarnya anggota keluarga atau beban ketergantungan. faktor ekonomi berupa tingkat kemiskinan yang tinggi merupakan salah satu faktor penting penyebab putus sekolah. Pemerataan pendidikan juga terkendala oleh faktor tempat tinggal. Layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penyebab

kedua, keberadaan unit sekolah rata-rata baru pada wilayah kecamatan, sehingga aksesnya relatif jauh dari pemukiman penduduk dan membutuhkan biaya transportasi, Selain biaya pendidikan, tingkat kemiskinan dan tempat tinggal beban ketergantungan juga mempengaruhi pemerataan pendidikan. Permintaan atau hasrat suatu keluarga untuk mendapatkan sejumlah anak ditentukan oleh preferensi keluarga itu sendiri atas sejumlah anak yang dianggap bisa terus bertahan hidup.

Peningkatan kinerja melalui program-program prioritas dan perlunya upaya percepatan peningkatan mutu sarana prasarana Pendidikan PAUD, peningkatan mutu sarana prasarana Pendidikan Sekolah Dasar, meningkatkan mutu sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru serta mutu kompetensi siswa dan Pendidikan Non Formal, capaian kinerja tersebut di atas adalah merupakan kinerja dari Program-program berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan.

Sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir RPJMD hampir memenuhi target RPJMD Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang tertera pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.27

Capaian Sasaran 2 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021	Target Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Umur Harapan Hidup	%	71,70	72,07	100,52	71,73	71,77	71,80	100,38

Berdasarkan tabel 2.31 Sasaran 2 *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* sebagaimana yang tertuang dalam target akhir RPJMD, sampai pada tahun 2024 indikator kinerja Umur Harapan Hidup hampir mencapai target yang ditentukan yaitu hanya selisih 0,14 %, dan masuk kategori Memuaskan. Capaian kinerja tersebut di atas adalah merupakan kinerja dari Program-program berikut ini :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota;
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
5. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;

Sasaran 3 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Sasaran *Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir RPJMD hampir memenuhi target RPJMD Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang tertera pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.28

Capaian Sasaran 3 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50	4,70	85,45	-1,78	2,23	5,66	83,04
PDRB	ADHB/Triliun	146,04	127,55	87,34	110,14	115,31	173,50	73,52
	ADHK/Triliun	78,79	75,58	95,93	70,6	72,18	85,75	88,14
PDRB per Kapita	ADHB/JutaRupiah	62,69	65,28	104,13	57,13	59,40	72,48	90,07
	ADHK/JutaRupiah	35,75	38,68	108,20	36,62	37,18	37,97	101,87

Berdasarkan tabel 2.32 Sasaran 3 *Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan* sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, pada tahun 2022 rata-rata indikator kinerja tidak mencapai target akhir dari RPJMD tahun 2024. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap sasaran strategis RPJMD. Namun rata-rata indikator kinerja pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang akan mengalami peningkatan seiring dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Utara setelah mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang diperkirakan membaik di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut diprediksi dengan terkendalinya secara baik Pandemi Covid-19, yang menyebabkan pergerakan sosial serta aktivitas ekonomi masyarakat kembali menuju ke normal sehingga perekonomian kembali membaik setelah mengalami kemerosotan di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi akan membawa dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang.

Sasaran 4 Meningkatnya Investasi

Sasaran *Meningkatnya Investasi* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir RPJMD yang di reviu hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.29

Capaian Sasaran 4 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	PMDN/ Rp.Juta	1.563.837,20	2.718.192,00	173,82	1.726.633,30	2.704.206,50	1.548.654,20	175,52
	PMA/ US\$	184.996,80	83.092,40	44,92	111.287,90	61.492,70	183.200,60	45,36

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,2022

Berdasarkan tabel 2.33 Sasaran 4 *Meningkatnya Investasi* pada tahun 2022 bahwa iklim investasi PMDN mengalami peningkatan dan nilai investasi PMA mengalami peningkatan juga. Hal ini tentunya patut untuk terus lebih ditingkatkan melalui berbagai langkah dan upaya dalam menarik minat investor untuk mengembangkan usahanya di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan salah satu bentuk nilai lebih yang dapat dijadikan motivator dalam pengembangan investasi adalah posisi wilayah Kabupaten Deli Serdang yang sangat strategis dengan kekayaan sumber daya alam dan luas wilayah yang cukup besar tentunya akan memberikan harapan besar bagi para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran nilai realisasi investasi PMA dan PMDN, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan dana untuk dialokasikan pada kegiatan pengembangan potensi unggulan daerah dan peluang investasi dan pameran investasi baik di dalam daerah luar Propinsi Sumatera Utara maupun ke luar negeri.
2. Perlu penambahan fasilitas pendukung pelayanan yang menyamankan para investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Deli Serdang seperti ruangan khusus yang nyaman, data investasi dan peluang investasi yang lengkap.
3. Perlunya sosialisasi peraturan terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada investor.

Sasaran 5 Meningkatnya Perlindungan dan Kesejahteraan bagi Masyarakat

Sasaran *Meningkatnya Perlindungan dan Kesejahteraan Bagi Masyarakat* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir RPJMD yang di reuiu hal ini dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.30
Capaian Sasaran 5 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021	Target Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Persentase Kemiskinan	%	4,08	3,62	111,27	3,88	4,01	4,06	89,16
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,34	5,47	97,57	9,50	9,13	4,87	112,32

Berdasarkan tabel 2.34 Sasaran 5 *Meningkatnya Perlindungan dan Kesejahteraan Bagi Masyarakat*, pada akhir tahun RPJMD bahwa Persentase Kemiskinan mengalami penurunan dan Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan juga. Dalam hal ini Tingkat Pengangguran Terbuka selaras dengan Persentase Kemiskinan Kabupaten Deli Serdang. Namun dari tabel diatas dapat dilihat Persentase Kemiskinan sudah melebihi target akhir RPJMD, namun Tingkat Pengangguran Terbuka belum mencapai target akhir RPJMD.

Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan dan Irigasi

Sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan dan Irigasi* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir RPJMD memenuhi target akhir RPJMD hal ini dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.31
Capaian Sasaran 6 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Jalan dalam kondisi baik	%	74	74,24	100,32	72,14	73,19	76	97,68
Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	78	78,04	100,05	75,8	76,65	80	97,55

Berdasarkan tabel 2.35 Sasaran 6 *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan dan Irigasi* sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, pada tahun 2024 yang merupakan tahun akhir RPJMD kedua indikator kinerja belum mencapai target yang diharapkan yaitu indikator kinerja Irigasi dalam kondisi baik, dan indikator Irigasi

dalam Kondisi Baik. Kedepannya agar kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2022, ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Tingkat profesionalisme pelaku jasa-jasa konstruksi di bidang jalan dan jembatan.
2. Belum optimalnya kinerja pelaksana teknis dalam hal pengawasan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama masalah ganti rugi tanah dimana dana pemerintah daerah masih minim / kecil untuk memberikan ganti rugi.
4. Adanya perubahan kondisi di lapangan dengan kondisi yang telah diperhitungkan dalam proses perencanaan.
5. Masih terjadinya bencana longsor dan banjir di beberapa lokasi.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu diambil langkah-langkah pemecahan masalah antara lain:

1. Melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam pengelolaan penanganan jalan dan jembatan.
2. Meningkatkan kinerja pelaksana teknis dalam pelaksanaan swakelola melalui pembinaan, pembagian tugas yang jelas, proporsional dan berkesinambungan kepada staf.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan jalan dan pembangunan jembatan.
4. Melakukan Review Design.
5. Melakukan penanganan darurat terhadap lokasi bencana berupa perbaikan jalan, jembatan dan saluran irigasi yang terkena dampak.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 adalah :

1. Terbatasnya anggaran sehingga pembayaran hanya dapat dilakukan untuk panjar upah, panjar sewa alat, dan panjar material.
2. Belum optimalnya kinerja pelaksana teknis dalam hal pengawasan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut, adalah:

1. Mengusulkan penambahan anggaran untuk pembiayaan kegiatan.

2. Meningkatkan kinerja pelaksana teknis dalam pelaksanaan swakelola melalui pembinaan, pembagian tugas yang jelas, proporsional dan berkesinambungan kepada jabatan pelaksanaan/fungsional.

Sasaran 7 Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman

Sasaran *Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir RPJMD yang di rewiu hal ini dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.32
Capaian Sasaran 7 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Cakupan Pelayanan Air Minum	%	77,50	77,29	99,73	75,12	76,17	80	96,61
Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,14	0,15	92,86	0,17	0,14	0,12	125,00
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	87,50	86,75	99,14	84,73	85,60	90	96,39

Berdasarkan tabel 2.36 Sasaran 7 *Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman* sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, sampai pada tahun akhir 2022 berdasarkan realisasi indikator kinerja, 3 (tiga) indikator kinerja belum mencapai target akhir RPJMD. Capaian kinerja tersebut di atas adalah merupakan kinerja dari program berikut ini :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Pengembangan Perumahan;
5. Program Kawasan Permukiman;
6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum;
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
8. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Program Penataan Bangunan Gedung

Sasaran 8 Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Sasaran *Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir RPJMD yang di reviu hal ini dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.33

Capaian Sasaran 8 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Luasan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	%	16,60	15,46	93,13	14,67	15,46	18,30	84,48

Berdasarkan tabel 2.37 Sasaran 8 *Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik* sebagaimana yang tertuang pada target akhir RPJMD, pada tahun 2022 pencapaian realisasinya masih belum berhasil mencapai target akhir RPJMD yaitu Luasan RTH Publik di Wilayah Perkotaan sehingga berdampak pada capaian sasaran strategis dengan capaian adalah 84,48 %.

Sasaran 9 Meningkatnya Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sasaran *Meningkatnya Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir RPJMD yang di reviu hal ini dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.34

Capaian Sasaran 9 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,00	57,37	89,64	61,90	59,00	64,00	89,64

Berdasarkan tabel 2.38 Sasaran 9 *Meningkatnya Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan* sebagaimana yang tertuang pada target akhir RPJMD, pada tahun 2024 pencapaian realisasinya masih belum berhasil mencapai target akhir RPJMD sehingga berdampak pada capaian sasaran strategis dengan capaian adalah 89,64 %.

Sasaran 10 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persampahan

Sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persampahan* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir RPJMD yang di reviu hal ini dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.35
Capaian Sasaran 10 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Persentase Sampah Terkelola 3R	%	30,00	28,00	93,33	20,17	18,09	40,00	70,00

Berdasarkan tabel 2.39 Sasaran 10 *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persampahan* sebagaimana yang tertuang pada target akhir RPJMD, pada tahun 2022 pencapaian realisasinya belum berhasil mencapai target akhir RPJMD sehingga berdampak pada capaian sasaran strategis dengan capaian adalah 70 %. Capaian kinerja tersebut didukung dari program Program Pengelolaan Sampah, Kegiatan Pengelolaan Sampah, dan 3 sub kegiatan yaitu :

1. Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Sasaran 11 Meningkatnya Keterpaduan Rencana Tata Ruang

Sasaran *Meningkatnya Keterpaduan Rencana Tata Ruang* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir RPJMD yang di reviu hal ini dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.36
Capaian Sasaran 11 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Persentase Perencanaan Tata Ruang	%	58,00	64,28	110,83	46,00	57,14	70,00	91,83

Berdasarkan tabel 2.40 Sasaran 11 *Meningkatnya Keterpaduan Rencana Tata Ruang* sebagaimana yang tertuang pada target akhir RPJMD, pada tahun 2024 pencapaian realisasinya belum berhasil mencapai target akhir RPJMD sehingga berdampak pada capaian sasaran strategis dengan capaian adalah 91,83 %.

Sasaran 12 Meningkatnya Nilai-Nilai Keagamaan, Keamanan dan Keterlibatan dalam Kehidupan Bermasyarakat

Sasaran *Meningkatnya Nilai-Nilai Keagamaan, Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir RPJMD yang di reviu hal ini dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.37
Capaian Sasaran 12 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	%	85,00	84,50	99,41	93,50	96,56	95,00	88,95

Berdasarkan tabel 2.41 Sasaran 12 *Meningkatnya Nilai-Nilai Keagamaan, Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat* sebagaimana yang tertuang pada target akhir RPJMD, pada tahun 2024 pencapaian realisasinya belum mencapai target akhir RPJMD sehingga berdampak pada capaian sasaran strategis dengan capaian adalah 88,95 %.

Sasaran 13 Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya Lokal

Sasaran *Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya Lokal* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir RPJMD yang di reviu hal ini dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.38
Capaian Sasaran 13 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Persentase Seni Budaya dan Tradisi yang Dilestarikan	%	45,00	56,41	125,36	43,00	47,70	55,00	102,56

Berdasarkan tabel 2.42 Sasaran 13 *Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya Lokal* sebagaimana yang tertuang pada target akhir RPJMD, pada tahun 2024 pencapaian realisasinya sudah melebihi target akhir RPJMD sehingga berdampak pada capaian sasaran strategis dengan capaian adalah 102,56 %. Capaian kinerja tersebut didukung oleh program berikut ini :

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Sasaran 14 Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran *Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir RPJMD yang di reviu hal ini dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.39

Capaian Sasaran 14 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi				
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	Nilai	71,55	70,18	98,09	64,39	67,08	77,35	90,73

Berdasarkan tabel 2.43 Sasaran 14 *Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* sebagaimana yang tertuang pada target akhir RPJMD, pada tahun 2022 pencapaian realisasi 1 indikator memenuhi target yang ditentukan yaitu Opini BPK berhasil dengan realisasi WTP, sedangkan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) belum berhasil mencapai target akhir RPJMD yaitu 90,73.

Sasaran 15 Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah

Sasaran *Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah* yang terapkan di Kabupaten Deli Serdang di lihat pada capaian akhir RPJMD hal ini dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.40

Capaian Sasaran 15 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2020	Capaian 2021	Kondisi Akhir RPJMD 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Realisasi	%				
				Realisasi				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	71,69	83,58	116,59	64,79	67,21	77,35	108,05

Berdasarkan tabel 2.45, Sasaran 15 “*Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah*” sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, capaian tahun 2022 terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sudah melebihi target yang diharapkan yaitu 108,05. Namun perlu adanya peningkatan kinerja yang lebih baik lagi sesuai dengan hasil yang di capai, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun yang akan datang perlu lebih ditingkatkan lagi untuk yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja, perlu dilaporkan akuntabilitas dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lain yang dijalankan. Sehubungan dengan hal tersebut maka di bawah ini akan diuraikan Laporan Kinerja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022.

Berikut ini adalah realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 terdiri dari :

Tabel 2.41
Realisasi APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
	Pendapatan Daerah :	4.179.153.051.919,00	3.731.001.039.641,21	89,28
1.	a. Pendapatan Asli Daerah	1.504.964.363.832,00	1.041.668.145.481,21	69,22
	b. Pendapatan Transfer	2.674.188.688.087,00	2.687.709.894.160,00	100,51
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	-	1.623.000.000,00	0,00
	Belanja Daerah :	4.353.532.665.140,00	3.748.620.273.210,85	86,11
2.	a. Belanja Operasi	3.115.109.173.175,00	2.641.351.472.407,08	84,79
	b. Belanja Modal	671.766.803.782,00	563.480.586.115,77	83,88
	c. Belanja Tak Terduga	29.500.000.000,00	6.727.247.505,00	22,80
	d. Transfer	537.156.688.183,00	537.060.967.183,00	99,98
	Pembiayaan :			
	Penerimaan Daerah	192.379.613.221,00	192.513.862.275,70	100,07
	Pengeluaran Daerah	18.000.000.000,00	-	0,00
	Pembiayaan Netto	174.379.613.221,00	192.513.862.275,70	110,40

Sumber : BPKAD Deli Serdang 2022 (LRA Unaudited)

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



BAB III

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN**

KABUPATEN DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2022

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan urusan oleh Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintah yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Tugas pembantuan disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan bagi daerah dan desa. Melalui pemberian TP diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai APBN, baik kewenangan pusat yang didesentralisasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat yang ditugaskan kepada daerah. Pengadministrasian Tugas Pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN.

Proses perencanaan TP mengacu pada mekanisme perencanaan APBN. Perencanaan program/kegiatan TP dilakukan oleh satker terkait dengan mengacu/berpedoman pada juknis (petunjuk teknis) serta dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait. Penyusunan rencana dilakukan melalui aplikasi RKA-KL DIPA TA 2016. Selanjutnya hasil RKA-KL tersebut didesk oleh Kementerian/Lembaga terkait. Apabila disetujui oleh Kementerian/Lembaga terkait maka satker kab/kota akan memperoleh DIPA pada awal tahun berjalan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari permintaan laporan realisasi dana bersumber APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Pusat dan Urusan Bersama) tahun 2022, Perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang yang menerima dana yang bersumber dari TP adalah Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang.

Dinas Pertanian mendapatkan Dana TP sebesar Rp. 2.428.088.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.416.277.071,- atau 99,51%, berupa kegiatan:

- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian
- Pendataan, Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi
- Pelaporan Asuransi Pertanian
- Layanan Umum
- Dukungan Penerapan Teknologi CSA Padi dan Non Padi Kompoen A
- Penguatan BPP
- Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar
- Fasilitasi Peralatan Pengolahan Industri Rumah Tangga Hasil Pertanian Pertanian (KWT)
- Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh Kegiatan SIMURP (Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project) dan Manajemen Pengelolaan SIMURP Provinsi.

Mekanisme perencanaan TP dan Dekon, sama prinsipnya dengan perencanaan APBN yang lainnya, yaitu: dengan memperhatikan Prioritas Nasional. Dengan pendekatan perencanaan, yaitu: Tematik (fokus perencanaan yang didetailkan sampai dengan Program Prioritas), *Holistik* (pendekatan menyeluruh dan komprehensif/ dari hulu sampai hilir), *Integratif* (integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan), *Spasial* (Keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi). Usulan kegiatan TP dan Dekon bersifat *top down*, sehingga untuk mendukung TP dan Dekon maka Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan K/L. Anggaran TP

dan Dekon tidak masuk dalam dokumen perencanaan daerah. TP diperuntukan untuk pencapaian target nasional yang dilaksanakan oleh daerah (mengingat hal tersebut lebih efisien dilaksanakan oleh daerah). Sedangkan Dekon untuk koordinasi/bimbingan dan pengawasan. Adapun rincian kegiatan Tugas Pembantuan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rincian Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2022

No	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan		Anggaran			Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Output)				Instansi Penanggung jawab	Lokasi	
				No Loan	PHLN	Rupiah Murni	Total	Sasaran	Realisasi (Rp)	Narasi	Satuan (unit)	Sasaran (%)			Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dinas Pertanian					2.428.088.000	2.428.088.000		2.416.277.071				99,51		
	TP (Tugas Pembantuan)														
	018.08.1.633656 /2022	018.08.H A	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			498.188.000	498.188.000		486.377.071						
		1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian												
		1796.AE A.001	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian			10.000.000	10.000.000		10.000.000				100		
		'053	Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian												
		521211	Belanja Bahan			1.000.000	1.000.000		1.000.000	Penggandaan Dokumen Alsintan	Paket			Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang	
		521213	Belanja Honor Output Kegiatan			3.600.000	3.600.000		3.600.000	Honor Petugas input BAST Online dan Pemanfaatan Alsintan [1 Org x 6 Bulan] dan Honor	OB			Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang	

No	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan		Anggaran			Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Output)				Instansi Penanggung jawab	Lokasi	
				No Loan	PHLN	Rupiah Murni	Total	Sasaran	Realisasi (Rp)	Narasi	Satuan (unit)	Sasaran (%)			Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										Petugas Pemeriksa (1 org x 6 bulan)					
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			2.400.000	2.400.000		2.400.000	Perjalanan Monitoring Pemanfaatan Alsintan dan Pengumpulan Data/Informasi Alsintan dan UPJA	OP			Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang	
		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.000.000	3.000.000		3.000.000	Perjalanan Koordinasi Penyaluran Alsintan/BAST dan Laporan	OH			Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang	
		3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida												
		3993.QA A	Pelayanan Publik kepada masyarakat [Base Line]												
		3993.QA A.001	e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi			251.489.000	251.489.000		251.480.175				100		
		'051	Penyusunan e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi												
		521211	Belanja Bahan			58.489.000	58.489.000		58.480.175	ATK, Perbanyak Pedum serta Dukungan Pulsa/Internet	Thn, OB			Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang	
		521213	Belanja Honor							Honor Admin dan	OB			Dinas Pertanian	

No	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan		Anggaran			Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Output)				Instansi Penanggung jawab	Lokasi	
				No Loan	PHLN	Rupiah Murni	Total	Sasaran	Realisasi (Rp)	Narasi	Satuan (unit)	Sasaran (%)			Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Output Kegiatan			189.000.000	189.000.000		189.000.000	Honor Tim Pendataan Enty dan Updating e- RDKK				Kab. Deli Serdang	
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			4.000.000	4.000.000		4.000.000	Perjalanan Monitoring Penyaluran Pupuk	OP			Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang	
		3993.QAH	Pelayanan Publik Lainnya [Base Line]												
			Lokasi: SUMATERA UTARA												
		3993.QAH.001	Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi			199.070.000	199.070.000		199.017.896				99,97		
		'051	Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi												
		521211	Belanja Bahan			51.820.000	51.820.000		51.817.896	ATK dan Bahan Komputer serta Dukungan Pulsa/Internet Tim Verifikasi dan Validasi Data	THN, OB			Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang	
		521213	Belanja Honor Output Kegiatan			129.250.000	129.250.000		129.250.000	Honor Tim Pembina Kabupatenh dan Honor Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan	OB			Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang	
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			18.000.000	18.000.000		17.950.000	Perjalanan Verifikasi dan Validasi	OP			Dinas Pertanian Kab. Deli	

No	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan		Anggaran				Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Output)				Instansi Penanggung jawab	Lokasi
				No Loan	PHLN	Rupiah Murni	Total	Sasaran	Realisasi (Rp)	Narasi	Satuan (unit)	Sasaran (%)	Realisasi (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										Penyaluran Pupuk Bersubsidi				Serdang	
		3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian												
		3994.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup [Base Line]												
			Lokasi: SUMATERA UTARA												
		3994.RBK.001	Asuransi Pertanian			19.629.000	19.629.000		7.879.000				40,14		
		'051	Persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian												
		D	Kabupaten Deli Serdang												
		521211	Belanja Bahan			2.229.000	2.229.000		1.229.000	ATK serta Peggandaan	THN			Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang	
		521213	Belanja Honor Output Kegiatan			10.000.000	10.000.000		-	Honor Ketua, Anggota serta Petugas Kegiatan AOTP	OB			Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang	
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5.000.000	5.000.000		5.000.000	Perjalanan Koordinasi Aplikasi Sistem IT	OB			Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang	

No	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan		Anggaran				Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Output)				Instansi Penanggung jawab	Lokasi
				No Loan	PHLN	Rupiah Murni	Total	Sasaran	Realisasi (Rp)	Narasi	Satuan (unit)	Sasaran (%)	Realisasi (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.400.000	2.400.000		1.650.000	Perjalanan Pembinaan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi AUDP	OH			Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang	
		1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian												
		1797.EB A	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]												
			Lokasi: SUMATERA UTARA												
		1797.EB A.962	Layanan Umum			18.000.000	18.000.000		18.000.000				100		
		'051	Layanan Umum												
		D	Kab. Deli Serdang												
		521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			15.000.000	15.000.000		15.000.000	Honor Administrasi Teknis Kabupaten yang terdiri dari PPK, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Kegiatan, Staf Pengelola	OB			Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang	

No	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan		Anggaran			Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Output)				Instansi Penanggung jawab	Lokasi	
				No Loan	PHLN	Rupiah Murni	Total	Sasaran	Realisasi (Rp)	Narasi	Satuan (unit)	Sasaran (%)			Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										Keuangan dan Staf Penyusun Pelaporan Online)					
		521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			1.000.000	1.000.000		1.000.000	ATK dan Bahan Komputer	TRW			Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang	
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			2.000.000	2.000.000		2.000.000	Perjalanan Konsultasi Kegiatan Provinsi Dtjen PSP	OP			Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang	
	018.10.417999.2022	1812.QD D.004.05 1.AA.	DUKUNGAN PENERAPAN TEKNOLOGI CSA PADI DAN NON PADI Komponen A			1.209.600.000	1.209.600.000		1.209.600.000				100		
	1812.QDD.004.051.AA.521211		Berlanja Bahan			288.000.000	288.000.000		288.000.000	Jumlah Konsumsi rapat-rapat pertemuan poktan inti dan replikasi	OK		100,00	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	
	1812.QDD.004.051.AA.521219		Belanja Barang Non Operasional Lainnya			921.600.000	921.600.000		921.600.000				100,00	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	
	1812.QDD.004.051.AC.		PENGUATAN BPP			463.000.000	463.000.000		463.000.000				100	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	
	1812.QDD.004.051.AC.521211		Berlanja Bahan			220.200.000	220.200.000		220.200.000	OK,PKT,ORG			100,00	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	

No	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan	Anggaran				Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Output)				Instansi Penanggung jawab	Lokasi
			No Loan	PHLN	Rupiah Murni	Total	Sasaran	Realisasi (Rp)	Narasi	Satuan (unit)	Sasaran (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1812.QDD.004.051.AC.521213	Belanja Honor Output Kegiatan			9.600.000	9.600.000		9.600.000	Jumlah honor admin BPP	BLN		100,00	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	
	1812.QDD.004.051.AC.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			216.400.000	216.400.000		216.400.000	Jumlah langganan internet/paket dan bantuan transport pendamping penyuluh	Bln, OK		100,00	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	
	1812.QDD.004.051.AC.522151	Belanja Jasa Profesi			2.400.000	2.400.000		2.400.000						
	1812.QDD.004.051.AC.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			14.400.000	14.400.000		14.400.000				100,00	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	
	1812.QDD.004.051.AD.	Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar			125.400.000	125.400.000		125.400.000				100		
	1812.QDD.004.051.AD.521211	Berlanja Bahan			14.400.000	14.400.000		14.400.000	Jumlah Konsumsi rapat persiapan, bintek, market linkage	OK		100,00	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	
	1812.QDD.004.051.AD.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			29.400.000	29.400.000		29.400.000	Jumlah bantuan transport Sosialisasi dan penumbuhan market linkage, Transport, pembuatan Video	PKT		100,00	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	

No	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan	Anggaran				Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Output)				Instansi Penanggung jawab	Lokasi
			No Loan	PHLN	Rupiah Murni	Total	Sasaran	Realisasi (Rp)	Narasi	Satuan (unit)	Sasaran (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1812.QDD.004.051.AD.522151	Belanja Jasa Profesi			12.000.000	12.000.000		12.000.000	Honor Narasumber	OJ		100,00	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	
	1812.QDD.004.051.AD.524111	Belanja Perjalanan Dinas			1.200.000	1.200.000		1.200.000						
	1812.QDD.004.051.AD.526312	Belanja Barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karekteristik bantuan pemerintah			68.400.000	68.400.000		68.400.000						
	1812.QDD.004.051.AE	FASILITASI PERALATAN PENGOLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA HASIL PERTANIAN (KWT)			80.000.000	80.000.000		80.000.000				100		
	1812.QDD.004.051.AE.521211	Berlanja Bahan			6.000.000	6.000.000		6.000.000	Konsumsi rapat persiapan	OK		100,00	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	
	1812.QDD.004.051.AE.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			10.000.000	10.000.000		10.000.000	Jumlah Bantuan Transport peserta	PKT		100,00	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	
	1812.QDD.004.051.AE.522151	Belanja Jasa Profesi			4.000.000	4.000.000		4.000.000	Honor Narasumber	OJ		100,00	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	
	1812.QDD.004.051.AE.524111	Belanja Perjalanan Dinas			1.200.000	1.200.000		1.200.000						

No	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan	Anggaran				Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Output)				Instansi Penanggung jawab	Lokasi
			No Loan	PHLN	Rupiah Murni	Total	Sasaran	Realisasi (Rp)	Narasi	Satuan (unit)	Sasaran (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1812.QDD.004.051.AE.526312	Belanja Barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah			58.800.000	58.800.000		58.800.000						
	1812.QDD.004.051.AJ	Pengawasan Dan Pendampingan Penyuluh Kegiatan SIMURP			20.100.000	20.100.000		20.100.000				100		
	1812.QDD.004.051.AJ.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			20.100.000	20.100.000		20.100.000	Jumlah perjalanan Pembinaan,konsultasi dan pembinaan	OP,OK		100,00	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	
	1812.FBA.002.051.	MANAJEMEN PENGELOLAAN SIMURP PROVINSI			31.800.000	31.800.000		31.800.000						
	1812.FBA.002.051.CE	Perencanaan Kabupaten Komponen C/SIMURP			21.800.000	21.800.000		21.800.000				100		
	1812.FBA.002.051.CE.521211	Belanja Bahan			3.600.000	3.600.000		3.600.000	Jumlah penyusunan kegiatan anggaran, penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran simurp	OB,OK		100,00	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	
	1812.FBA.002.051.CE.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			18.200.000	18.200.000		18.200.000	Jumlah perjalanan Konsultasi SIMURP Ke provinsi	OP		100,00	Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang	

No	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan	Anggaran				Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Output)				Instansi Penanggung jawab	Lokasi
			No Loan	PHLN	Rupiah Murni	Total	Sasaran	Realisasi (Rp)	Narasi	Satuan (unit)	Sasaran (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1812.FBA.002.051.CF	Pengorganisasian Kabupaten-Komponen C			10.000.000	10.000.000		10.000.000				100		
	1812.FBA.002.051.CF.521211	Belanja Bahan			10.000.000	10.000.000		10.000.000				100,00		

B. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan TP, antara lain:

- Perencanaan TP masih belum berkesinambungan sehingga menyulitkan daerah dalam menyusun perencanaan. terbatasnya anggaran K/L menyebabkan belum berkesinambungannya perencanaan TP di daerah.
- Masih belum sinkronnya perencanaan antara kegiatan yang dibiayai melalui APBD dengan TP. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi antara K/L dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran TP.
- Terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran TP dikarenakan adanya keterlambatan DIPA, keterlambatan juknis, revisi anggaran dan mutasi pejabat daerah yang menangani kegiatan tugas pembantuan pada saat tahun berjalan.
- Masih adanya kendala dalam penyusunan laporan keuangan TP dan terbatasnya SDM yang menangani pelaksanaan dan pelaporan TP.
- Kurang terpeliharanya Barang Milik Negara (BMN) hasil TP oleh daerah karena belum dihibahkan.

Upaya penyelesaian untuk menghadapi hambatan/permasalahan tersebut, sebagai berikut:

- Mengintensifkan koordinasi/konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga untuk mensinkronkan dan menjaga keberlangsungan TP dengan APBD.
- Mengintensifkan pemantuan terhadap Perangkat Daerah penerima TP. Serta mengkonfirmasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dalam hal ini KPPN Tebing Tinggi.
- Berkoordinasi dan memberikan masukan terhadap Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga untuk mempercepat penyerahan DIPA dan juknisnya.
- Melakukan permintaan laporan TP setiap tahunnya

Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga untuk kejelasan Barang Milik Negara (BMN) hasil TP, apabila memungkinkan dilakukan hibah agar dapat dilakukan pembebanan pemeliharaan melalui APBD.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



BAB IV

**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

KABUPATEN DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2022

B A B IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

A. Urusan Pendidikan

Berikut ini beberapa hal yang dilaporkan pada pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan.

1. Jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan.

2. Target Pencapaian

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pendidikan adalah 100% (seratus persen).

Tabel 4.1

Target Capaian SPM Dinas Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Elemen Data	Target Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 - 15 tahun yang sudah tamat dalam pendidikan dasar atau sedang belajar di pendidikan dasar	100%
			Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Elemen Data	Target Capaian
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
			Jumlah penduduk usia 7-18 tahun	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan satuan pendidikan anak usia dini	100%
			jumlah penduduk usia 5-6 tahun	

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2022 di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dalam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Pagu	Realisasi
Belanja Daerah	1.078.296.749.777	883.899.261.638
Belanja Operasi	1.025.779.472.011	831.999.833.138
Belanja Pegawai	932.739.655.309	747.262.334.996
Belanja Barang dan Jasa	57.916.935.959	50.007.580.692
Belanja Hibah	35.122.880.743	34.729.917.450
Belanja Modal	52.517.277.766	51.899.428.500
Belanja modal peralatan dan mesin	13.603.775.103	13.416.630.550

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.781.513.663	131.989.000
Belanja modal asset tetap lainnya	131.989.000	131.989.000
BOS APBN	153.123.779.226	153.426.087.083

4. Dukungan Personil

Proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dan Kantor Kementerian Agama, dengan sumber daya pendidikan yang tersebar di 22 kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Sumber Daya Kependidikan
di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Status		Total
		PNS	Non PNS	
1	Dinas	126	78	204
2	Pengawas	132	-	132
3	Penilik	35	-	35
4	Pamong	7	-	7
5	Guru			
	a.PAUD	103	1.997	1.997
	b.SD	7.422	3.202	10.624
	c.SMP	2.366	2.682	5.048
	d.Kesetaraan	16	453	469
Total		10.207	8.412	18.619

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang 2023

Tabel 4.4
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Berdasarkan Jabatan

No.	Status Pegawai	Jumlah
1	Struktural	15
2	Jabatan Fungsional	7.291
3	Jabatan Fungsional Umum (pelaksana)	224
Total		7.530

5. Realisasi

Capaian Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan pada tahun 2022 sebesar 97,51% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Capaian Standar Pelayanan Minimal

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA			97.51 %
1	Pendidikan Dasar Usia Dini				95.42 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>30,121</i>	<i>30,121</i>	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.42 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
	1 . Buku gambar	30,121	30,121	0	100.00 %
	2 . Alat mewarnai	30,121	30,121	0	100.00 %
	3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik	1,506	1,506	0	100.00 %
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	957	357	600	37.30 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	3,164	1,522	1,642	48.10 %
	JUMLAH	65,869	63,627	2,242	385.40 %
2	Pendidikan Dasar				99.60 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	275,679	275,679	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19.60 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	98.00 %
	1 . Buku teks pelajaran	275,679	275,679	0	100.00 %
	2 . Perlengkapan belajar	17,356	17,356	0	100.00 %
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	1,259	1,259	0	100.00 %
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1,259	1,259	0	100.00 %
	5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	10,967	10,941	26	99.76 %
	6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	27,568	27,568	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	15,872	14,348	1,524	90.40 %
	8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	1,259	1,181	78	93.80 %
	JUMLAH	351,219	349,591	1,628	783.96 %
3.	Pendidikan Kesetaraan				97.52 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	13,669	13,669	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17.52 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	87.58 %
	1 . Modul belajar	13,669	13,669	0	100.00 %
	2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	428	428	0	100.00 %
	3 . Penyediaan biaya personil peserta didik	342	342	0	100.00 %
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	469	346	123	73.77 %
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	108	108	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	108	108	0	100.00 %
	7 . Perlengkapan belajar	342	342	0	100.00 %
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C	108	29	79	26.85 %
	JUMLAH	15,574	15,372	202	700.62 %

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Deli Serdang baik permasalahan eksternal dan internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut.

a. Permasalahan

- Belum terpenuhinya akses pendidikan PAUD, pendidikan dasar yang berkualitas
- Belum seluruh siswa mendapatkan perlengkapan peserta didik khususnya (buku gambar dan alat mewarnai untuk PAUD dan perlengkapan belajar untuk SD dan SMP)
- Sarana dan prasarana semua jenjang pendidikan yang belum memadai, masih terdapat kekurangan ruang kelas, dan masih terdapat ruang kelas dengan kondisi rusak sedang, dan sarana prasarana pendukung lainnya yang belum sesuai dengan kebutuhan
- Belum terpenuhinya kebutuhan minimal pendidik, dan tenaga pendidikan jenjang PAUD dan Didas di sekolah negeri
- Belum terpenuhinya pendidik yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana(S1) dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini guru
- Belum terpenuhinya jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
- Pendatangan dan verifikasi anak tidak sekolah diseluruh desa belum optimal

b. Solusi

- Meningkatkan daya tampung dan sarana prasarana pendidikan yang memadai dengan melakukan pembangunan USB dan melaksanakan pembangunan ruang kelas baru untuk memenuhi rasio 1 rombel : 1 ruang kelas
- Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan peserta didik berupa buku gambar dan alat mewarnai siswa
- Mengoptimalkan pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan meningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan
- Melakukan pendataan kebutuhan /bazetting pendidik dan tenaga kependidikan disekolh negeri dengan cara melakukan koordinasi

dengan badan kepegawaian daerah dalam rangka rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan

- Mengalokasikan anggaran untuk bantuan kualifikasi pendidikan guru dan PPG dalam jabatan

B. Urusan Kesehatan

Berikut ini beberapa hal yang dilaporkan pada pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan.

1. Jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan daerah Kabupaten terdiri atas:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ);
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

2. Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan harus 100% (seratus persen). Berikut adalah penerima pelayanan dasar bidang kesehatan berdasarkan jenis pelayanannya.

Tabel 4.6
Penerima Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	100%
4	Pelayanan kesehatan Balita	Balita	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak usia pendidikan dasar	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	WNI usia 15-59 tahun	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	WNI usia 60 tahun keatas	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi usia ≥15 tahun	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun	100%
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Penderita ODGJ	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang yang terduga TBC	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Orang yang berisiko terinfeksi HIV	100%

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2022 di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2022

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. DELI SERDANG				19,631,033,558	16,573,698,608	84.43 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				19,631,033,558	16,573,698,608	84.43 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten			19,631,033,558	16,573,698,608	84.43 %
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	3,139,308,176	2,909,190,294	92.67 %
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	2,497,138,446	1,618,840,464	64.83 %
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	527,376,712	450,198,590	85.37 %
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	2,596,001,678	2,511,795,462	96.76 %
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	3,648,388,080	2,526,000,352	69.24 %
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	1,870,493,244	1,552,915,510	83.02 %
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Orang	530,270,746	488,961,760	92.21 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			pada Usia Lanjut				
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	472,073,780	432,851,820	91.69 %
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	72,235,300	72,235,300	100.00 %
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	780,074,292	750,807,660	96.25 %
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	2,903,512,738	2,817,186,396	97.03 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	594,160,366	442,715,000	74.51 %
	JUMLAH INDIKATOR				19,631,033,558	16,573,698,608	84.43 %
	JUMLAH PROGRAM				19,631,033,558	16,573,698,608	84.43 %

4. Dukungan Personil

Dukungan personil sangat berperan dalam keberhasilan pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan. SDMK yang bekerja di Dinas Kesehatan beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada tahun 2022 adalah 2.189 orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 332 orang yang non PNS. Rincian jumlah SDMK yang ada di Puskesmas dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.8
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No	Unit Kerja	Tenaga Kesehatan		Tenaga Pendukung/ Penunjang Kesehatan	
		PNS	Non PNS	PNS	Non PNS
1	Puskesmas Gunung Meriah	64	6	3	15
2	Puskesmas Tiga Johar	44	19	0	0
3	Puskesmas Sibolangit	45	8	2	1
4	Puskesmas Bandar Baru	42	6	2	1
5	Puskesmas Kutalimbaru	59	6	2	5
6	Puskesmas Tuntungan	45	2	1	0
7	Puskesmas Gunung Tinggi	63	12	3	2
8	Puskesmas Namorambe	105	11	2	2
9	Puskesmas Biru-Biru	73	4	1	2
10	Puskesmas Talun Kenas	57	6	3	1
11	Puskesmas Bangun Purba	33	1	1	2
12	Puskesmas Galang	64	12	1	4
13	Puskesmas Petumbukan	40	2	1	0
14	Puskesmas Tanjung Morawa	87	5	2	5
15	Puskesmas Dalu Sepuluh	83	17	2	3
16	Puskesmas Patumbak	75	6	1	4
17	Puskesmas Delitua	71	6	0	0
18	Puskesma Mulyorejo	77	8	0	1
19	Puskesmas Sei Mencirim	70	6	2	0
20	Puskesmas Sei Semayang	40	6	1	0
21	Puskesmas Hamparan	104	5	1	3

No	Unit Kerja	Tenaga Kesehatan		Tenaga Pendukung/ Penunjang Kesehatan	
		PNS	Non PNS	PNS	Non PNS
	Perak				
22	Puskesmas Kota Datar	41	16	1	1
23	Puskesmas Labuham Deli	62	2	1	3
24	Puskesmas Pematang Johar	56	4	2	3
25	Puskesmas Bandar Khalifah	76	10	1	1
26	Puskesmas Kenangan	79	6	2	4
27	Puskesmas Tanjung Rejo	87	8	2	6
28	Puskesmas Batang Kuis	70	1	3	0
29	Puskesmas Pantai Labu	63	14	1	6
30	Puskesmas Araskabu	46	8	2	5
31	Puskesmas Karang Anyer	39	8	1	1
32	Puskesmas Lubuk Pakam	71	0	1	3
33	Puskesmas Pagar Jati	45	2	1	3
34	Puskesmas Pagar Merbau	61	13	3	0
Jumlah		2137	246	52	87

5. Realisasi

Capaian Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan pada tahun 2022 sebesar 88.47% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Capaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MADYA			88.47 %
01.00	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				95.72 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.34 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	46,599	45,634	965	98%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17.37 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	86.87 %
		-1	-2	-3	
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td) - (Unit)	4,66	4,66	0	100.00 %
	2 . Tablet tambah darah	4,193,910	3,972,240	221,67	94.71 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	46,599	46,599	0	100.00 %
	4 . Kartu ibu/rekam medis ibu	46,599	46,599	0	100.00 %
	5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	46,599	100	46,499	0.21 %
	6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan	34	34	0	100.00 %
	7 . Bidan	462	462	0	100.00 %
	8 . Perawat	34	34	0	100.00 %
	JUMLAH	4,338,897	4,070,728	268,169	694.92 %
02.00	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				96.64 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.97 %
	• Jumlah yang Harus	44,482	44,465	17	100%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Dilayani :				
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.67 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	83.37 %
		-1	-2	-3	
	1 . Formulir Partograf	44,482	44,482	0	100.00 %
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	46,599	46,599	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	46,599	100	46,499	0.21 %
	4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	34	34	0	100.00 %
	5 . Bidan	462	462	0	100.00 %
	6 . Perawat	34	34	0	100.00 %
	JUMLAH	138,21	91,711	46,499	500.21 %
03.00	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				93.13 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.81 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	42,363	40,146	2,217	95%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17.32 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	86.59 %
		-1	-2	-3	
	1 . Vaksin Hepatitis B0	42,363	40,146	2,217	94.77 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	42,363	40,146	2,217	94.77 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotic	42,363	40,146	2,217	94.77 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	42,363	40,146	2,217	94.77 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	127,089	127,089	0	100.00 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	46,599	100	46,499	0.21 %
	7 . Dokter/dokter spesialis Anak	34	34	0	100.00 %
	8 . Bidan	68	68	0	100.00 %
	9 . Perawat	34	34	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	JUMLAH	343,276	287,909	55,367	779.29 %
04.00	Pelayanan Kesehatan Balita				88.21 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	71.44 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<i>164,145</i>	<i>146,577</i>	17,568	89%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.77 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	83.86 %
		-1	-2	-3	
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	409,898	214,376	195,522	52.30 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	491,508	214,528	276,98	43.65 %
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	46,599	100	46,499	0.21 %
	4 . Vitamin A Biru	31,957	30,376	1,581	95.05 %
	5 . Vitamin A Merah	64,113	63,343	770	98.80 %
	6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	164,145	146,577	17,568	89.30 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	164,145	146,577	17,568	89.30 %
	8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	164,145	146,577	17,568	89.30 %
	9 . Peralatan Anafilaktik	34	34	0	100.00 %
	10 . Bidan	68	68	0	100.00 %
	11 . Dokter	34	34	0	100.00 %
	12 . Perawat	34	34	0	100.00 %
	13 . Ahli Gizi	34	34	0	100.00 %
	14 . Guru PAUD	1,458	1,458	0	100.00 %
	15 . Kader Kesehatan	34	34	0	100.00 %
	JUMLAH	1,538,206	964,15	574,056	1,257.91 %
05.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				94.20 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				76.86 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	366,214	351,825	14,389	96%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17.34 %
		Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang Terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	86.70 %
	1 . Buku raport sehatanku	366,214	10	366,204	0.00 %
	2 . Buku pemantauan kesehatan	366,214	219,72	146,494	60.00 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	366,214	351,825	14,389	96.07 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	128,959	118,694	10,265	92.04 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	128,595	118,694	9,901	92.30 %
	6 . Dokter/Dokter gigi	34	34	0	100.00 %
	7 . Bidan	34	34	0	100.00 %
	8 . Perawat	34	34	0	100.00 %
	9 . Ahli Gizi	34	34	0	100.00 %
	10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	34	34	0	100.00 %
	11 . Guru	1,458	1,458	0	100.00 %
	12 . Kader Kesehatan	34	34	0	100.00 %
	JUMLAH	1,357,858	810,605	547,253	1,040.41 %
06.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				82.94 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				64.15 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1,562,484	1,252,920	309,564	80%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.79 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
		-1	-2	-3	93.97 %
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	68	68	0	100.00 %
	2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	396	181	215	45.71 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	34	34	0	100.00 %
	4 . Dokter	34	34	0	100.00 %
	5 . Bidan	34	34	0	100.00 %
	6 . Perawat	34	34	0	100.00 %
	7 . Ahli Gizi	34	34	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	34	34	0	100.00 %
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	34	34	0	100.00 %
	JUMLAH	702	487	215	845.71 %
07.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				97.87 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.04 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	191,651	186,948	4,703	98%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19.84 %
		Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang Terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	99.18 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	191,651	186,948	4,703	97.55 %
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	191,651	186,948	4,703	97.55 %
	3 . Buku kesehatan lansia	191,651	186,948	4,703	97.55 %
	4 . Dokter	34	34	0	100.00 %
	5 . Bidan	34	34	0	100.00 %
	6 . Perawat	34	34	0	100.00 %
	7 . Ahli Gizi	34	34	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	34	34	0	100.00 %
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	34	34	0	100.00 %
	JUMLAH	575,157	561,048	14,109	892.65 %
08.00	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				87.86 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	67.86 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	550,798	467,187	83,611	85%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		-1	-2	-3	
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	68	68	0	100.00 %
	2 . Tensimeter	34	34	0	100.00 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak	10	10	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Menular (SIPTM)				
	4 . Dokter	34	34	0	100.00 %
	5 . Bidan	34	34	0	100.00 %
	6 . Perawat	34	34	0	100.00 %
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	34	34	0	100.00 %
	JUMLAH	10,238	10,238	0	700.00 %
09.00	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				87.90 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69.26 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	43,853	37,966	5,887	87%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.64 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	93.21 %
		-1	-2	-3	
	1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	1,562,484	714	848,484	45.70 %
	2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	10	10	0	100.00 %
	3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	68	68	0	100.00 %
	4 . Dokter	34	34	0	100.00 %
	5 . Bidan	34	34	0	100.00 %
	6 . Perawat	34	34	0	100.00 %
	7 . Ahli Gizi	34	34	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	34	34	0	100.00 %
	JUMLAH	1,572,722	724,238	848,484	745.70 %
10.00	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				82.11 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	62.11 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	3,314	2,573	741	78%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		-1	-2	-3	
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	34	34	0	100.00 %
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	34	34	0	100.00 %
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	408	408	0	100.00 %
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	3,4	3,4	0	100.00 %
	5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	68	68	0	100.00 %
	JUMLAH	3,944	3,944	0	500.00 %
11.00	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	48,497	48,497	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		-1	-2	-3	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	34	34	0	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	1,5	1,5	0	100.00 %
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	48,497	48,497	0	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	256	256	0	100.00 %
	5 . Catridge tes cepat molekuler	48,497	48,497	0	100.00 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	34	34	0	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	34	34	0	100.00 %
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	34	34	0	100.00 %
	9 . Perawat	34	34	0	100.00 %
	10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	34	34	0	100.00 %
	11 . Penata Rontgen	22	22	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	34	34	0	100.00 %
	13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	102	102	0	100.00 %
	JUMLAH	354,856	354,856	0	1,300.00 %
12.00	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				55.07 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	39.29 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	59,16	29,053	30,107	49%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.78 %
		Jumlah yang harus	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum	78.90 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		dilayani -1	-2	terlayani -3	
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	34	34	0	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	59,16	17,547	41,613	29.66 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	59,16	17,547	41,613	29.66 %
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	59,16	17,547	41,613	29.66 %
	5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	34	34	0	100.00 %
	6 . Perawat	34	34	0	100.00 %
	7 . Bidan	34	34	0	100.00 %
	8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	34	34	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	34	34	0	100.00 %
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	68	68	0	100.00 %
	JUMLAH	177,752	52,913	124,839	788.98 %

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM bidang Kesehatan tahun 2022 di Kabupaten Deli Serdang baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.10
Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan kesehatan ibu hamil yang dilakukan belum memenuhi standar kualitas pelayanan antenatal 10 T terutama kualitas tes	Menyiapkan sarana dan prasana pendukung Antenatal care yang terstandar dan berkualitas	Membuat usulan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pemeriksaa n ANC yang memenuhi standar	Laporan bulanan rutin dari jejaring Puskesmas seperti rumah sakit dan klinik belum maksimal	Melakukan koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberika n laporan tepat waktu	Membuat pertemuan yang mengundan g jejaring Puskesmas untuk membahas laporan ANC	Masih minimnya sarana dan SDM terlatih dalam penggunaa n alat Ultasonogra fi (USG) yang menunjang	Membuat master plan untuk menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang akan melayani pemeriksaan kehamilan	Mengusulkan pengadaan USG di Puskesmas bersumber dana DAK

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
		laboratorium (pemeriksaan Hb, golongan darah, dan glukoprotein)						pemeriksaan terutama dalam memenuhi standar kualitas penentuan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ)	menggunakan alat USG	

2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin belum maksimal terutama pada kegiatan pelayanan persalinan dan pemanfaatan Buku KIA	Memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan ibu hamil	Membuat usulan pengadaan barang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan ibu bersalin seperti ketersediaan alat kesehatan (set persalinan, set resusitasi bayi, dan set perawatan pasca	Laporan bulanan rutin dari jejaring Puskesmas seperti rumah sakit dan klinik belum maksimal	Melakukan koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan tepat waktu	Membuat surat edaran dan melakukan koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan tepat waktu	Keterbatasan anggaran dalam mengadakan alat kesehatan, obat, dan BHP dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin	Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan ibu bersalin pada tahun berikutnya	Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan bersalin bersumber dana BOK Puskesmas dan dana desa
---	----------------------------------	---	---	--	---	---	--	---	---	---

				persalinan), paket obat dan Bahan Habis Pakai (BHP), dan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)						
					Koordinasi dengan program terkait seperti program imunisasi, program Penyakit Tidak Menular (PTM), program HIV,	Memperku at koordinasi dengan petugas yang menangani program terkait dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin	Membuat pertemuan koordinasi dengan pemegang program terkait untuk memaksima lkan capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin			

					program hepatitis, program TB, dan program malaria belum maksimal					
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BBL)	Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir belum maksimal	Memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Membuat usulan pengadaan barang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir seperti vaksin hepatitis B0, vitamin	Laporan bulanan rutin dari jejaring Puskesmas seperti rumah sakit dan klinik belum maksimal	Melakukan koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan tepat waktu	Melaksanakan monitoring dan evaluasi baik ke Puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk meningkatkan pendataan	Keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan yang diusulkan dalam sub kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tidak dapat	Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun berikutnya	Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir bersumber dana BOK Puskesmas dan dana desa

				K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotik dan alat kesehatan penunjang pelayanan			pelayanan kesehatan bayi baru lahir	teralisasi		
					Koordinasi dengan program terkait seperti program imunisasi belum maksimal	Memperkuat koordinasi dengan petugas yang menangani program terkait dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Membuat pertemuan koordinasi dengan pemegang program imunisasi untuk memaksimalkan capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Keterbatasan anggaran menyebabkan seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi	Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan Balita pada tahun berikutnya	Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan Balita bersumber dana BOK Puskesmas dan dana desa

4	Pelayanan Kesehatan Balita	Data sasaran Balita yang tidak sesuai dengan jumlah Balita di lapangan	Data sasaran disesuaikan dengan jumlah Balita di lapangan	Pro aktif dalam melakukan pemutakhiran data Balita yang datang ke fasyankes jejaring Puskesmas	Laporan bulanan rutin dari jejaring Puskesmas seperti rumah sakit dan klinik belum maksimal	Melakukan koordinasi dengan jejaring Puskesmas untuk memberikan laporan tepat waktu	Melaksanakan monitoring dan evaluasi baik ke Puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk meningkatkan pendataan pelayanan kesehatan Balita	Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi	Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan Balita pada tahun berikutnya	Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan Balita bersumber dana BOK Puskesmas dan dana desa
		Masih kurangnya kepedulian ibu yang memiliki Balita untuk	Membuat inovasi yang dapat meningkatkan	Membuat jadwal kunjungan rumah Balita	Koordinasi dengan program terkait seperti	Memperkuat koordinasi dengan petugas	Melaksanakan monitoring dan evaluasi baik ke			

		datang ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Balita	kan minat ibu untuk tetap memantau tumbuh kembang Balita		program imunisasi belum maksimal	yang menangani program terkait dalam pelayanan kesehatan Balita	Puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk meningkatkan pendataan pelayanan kesehatan Balita			
		Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan Balita belum maksimal	Memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan	Membuat usulan pengadaan barang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan bayi baru						

		terutama dalam pelayanan stimulasi deteksi dini tumbuh kembang Balita dan manajemen terpadu Balita sakit	kesehatan Balita	lahir seperti vaksin, vitamin, dan lain-lain						
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Belum sinkronnya sasaran pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (anak sekolah kelas 1 sampai dengan kelas 9)	Menetapkan sasaran pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tidak dilakukan penjangk	Menyebarluaskan data sasaran yang ditetapkan oleh Pusdatin Kemkes ke seluruh Puskesmas dan mengoordin	Masih rendahnya kerjasama pengelola program dengan pihak sekolah dalam kegiatan anak usia pendidikan	Koordinasi dengan pihak sekolah dan melakukan penjadwalan kunjungan ke sekolah dalam pelayanan	Koordinasi dengan petugas UKS di sekolah dan lintas sektor seperti pondok pesantren, dll untuk menentuka	Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi	Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar pada tahun berikutnya	Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar bersumber dana

			n pada kelas 1 namun dilakukan pada anak di kelas 1 sampai dengan kelas 9	asikan ke sekolah agar data sasaran dengan data real dapat dipenuhi	dasar	kesehatan (skrining)	n jadwal pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah dan melakukan koordinasi lintas sektor untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan di luar sekolah seperti pondok pesantren, panti, lapas, dan lain-lain			BOK Puskesmas
--	--	--	---	---	-------	----------------------	--	--	--	---------------

		Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan pendidikan dasar belum maksimal	Memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan Balita	Membuat usulan pengadaan barang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir seperti pengadaan buku rapor kesehatan dan buku pemantaua n kesehatan	Keterbatasan waktu petugas karena merangkap tugas lain sehingga siswa yang tidak hadir pada saat jadwal pemeriksaan atau pelayanan kesehatan dilakukan tidak mendapat skrining	Seluruh siswa harus hadir pada saat pelayanan kesehatan dilakukan	Koordinasi dengan pihak sekolah untuk membuat surat kepada orang tua siswa untuk menghadirkan siswa pada saat jadwal pemeriksaan atau pelayanan kesehatan di sekolah			
6	Pelayanan	Kunjungan pelayanan	Meningkatkan	Melakukan sosialisasi	Koordinasi lintas	Melakukan promosi	Melakukan sosialisasi	Keterbatasan	Memprioritaskan kegiatan-	Menguatkan

	Kesehatan pada Usia Produktif	kesehatan usia produktif ke fasilitas pelayanan kesehatan belum maksimal	kunjungan masyarakat usia produktif ke fasilitas pelayanan kesehatan	agar masyarakat yang berusia 15 tahun sampai 59 tahun dapat memeriksa kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan dan melakukan inovasi untuk menjangkau seluruh sasaran yang telah	sektor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama usia produktif untuk memeriksa kesehatannya	kesehatan /penyuluhan terkait pelayanan kesehatan usia produktif	dan advokasi lintas program dan lintas sektor untuk melakukan promosi kesehatan/ penyuluhan terkait pelayanan kesehatan usia produktif	anggaran menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi	kegiatan yang menunjang pencapaian pelayanan kesehatan pada usia produktif	pembiayaan pelayanan kesehatan usia produktif bersumber dana BOK Puskesmas
--	-------------------------------	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				ditetapkan						
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan lanjut usia dasar belum maksimal	Memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan lanjut usia	Membuat usulan pengadaan barang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan usia lanjut seperti strip uji pemeriksaan (Usila kit) dan buku kesehatan	Usia lanjut yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagian masih harus didampingi oleh keluarga sehingga angka kunjungan ke fasilitas	Membuat kunjungan rumah agar sasaran pelayanan kesehatan usia lanjut dapat dijaring	Meningkatkan koordinasi antara petugas kesehatan dan para kader Posyandu Lansia untuk melakukan kunjungan rumah dalam pelayanan	Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi	Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan usia produktif bersumber dana BOK Puskesmas

				Lansia	pelayanan kesehatan belum maksimal		kesehatan usia lanjut sehingga capaian dapat ditingkatkan			
					Koordinasi dengan lintas program terkait pelayanan kesehatan usia lanjut belum maksimal	Meningkatkan koordinasi dengan program di Bidang P2P	Berkoordinasi dengan pemegang program agar mengintegrasikan kegiatan deteksi dini dengan skrining faktor risiko penyakit			
8	Pelayanan Kesehatan	Kunjungan pelayanan kesehatan	Meningkatkan kunjungan	Melakukan sosialisasi agar	Koordinasi lintas sektor	Melakukan promosi kesehatan	Koordinasi lintas sektor untuk	Keterbatasan anggaran	Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang	Menguatkan pembiayaan

	an pada Penderita Hipertensi	penderita hipertensi ke fasilitas pelayanan kesehatan belum maksimal	n penderita hipertensi ke fasilitas pelayanan kesehatan	penderita hipertensi dapat memeriksa kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan dan melakukan inovasi	dalam pelayanan kesehatan penderita hipertensi belum maksimal	/penyuluhan terkait pelayanan kesehatan penderita hipertensi	meningkatkan kesadaran penderita hipertensi memeriksakan kesehatannya minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan	menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi	menunjang pencapaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi	an pelayanan kesehatan penderita hipertensi bersumber dana BOK Puskesmas
		Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan kesehatan penderita	Memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dalam	Membuat usulan pengadaan barang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan						

		hipertensi belum maksimal	pelayanan kesehatan penderita hipertensi	usia lanjut seperti Posbindu kit, obat hipertensi, media KIE, dan lain-lain						
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus (DM)	Kunjungan penderita DM ke fasilitas pelayanan kesehatan belum maksimal	Membuat perencanaan untuk meningkatkan deteksi dini penyakit DM	Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat pada saat pelayanan kesehatan luar gedung untuk menjangkau seluruh sasaran agar	Minimnya pengetahuan penderita DM tentang farmakologi obat sehingga berpikir rutin minum obat DM akan	Meningkatkan pengetahuan penderita hipertensi mengenai pengobatan DM yang tepat	Koordinasi dengan program farmasi untuk melakukan sosialisasi obat rasional untuk meminimalisir efek samping interaksi	Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi	Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian pelayanan kesehatan penderita DM	Menguatkan pembiayaan pelayanan kesehatan penderita DM bersumber dana BOK Puskesmas

				memeriksa kan gula darah minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan	merusak ginjal					
10	Pelayan an Kesehat an Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 tidak dapat terpenuhi	Data sasaran harus sesuai dengan data riil penderita ODGJ berat yang ada di wilayah kerja Puskesmas	Menghitun g ulang data sasaran sehingga pada tahun berikutnya seluruh penderita ODGJ berat dapat terjaring	Koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan ODGJ belum maksimal	Penguatan komitmen untuk tetap mempriorit askan pelaksanaa n pelayanan kesehatan	Mengadaka n pertemuan lintas program dan lintas sektor secara berkala tingkat kabupaten dalam upaya	Keterbatas an anggaran menyebab kan beberapa kegiatan yang diusulkan tidak dapat ditampun g dalam	Memprioritask an kegiatan- kegiatan yang menunjang pencapaian pelayanan kesehatan ODGJ dan berkoordinasi dengan OPD lain terkait pendanaan penanganan	Menguatk an pembiaya an pelayana n kesehata n ODGJ bersumbe r dana BOK dan melakuka n

			s				penjaringan kasus ODGJ	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga target program tidak tercapai secara maksimal	ODGJ	advokasi agar pembiayaan penderita ODGJ berat dapat direncanakan secara <i>cross cutting</i> dengan OPD terkait seperti dinas sosial dan rumah sakit
--	--	--	---	--	--	--	------------------------	---	------	--

11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dana Desa belum digunakan untuk kegiatan penanggulangan penyakit TBC di masyarakat sesuai dengan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023	Melakukan sosialisasi ke Dinas PMD, seluruh kecamatan dan seluruh desa tentang Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dimana	Membuat pertemuan lintas sektor terkait Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dalam hal penanggulangan tuberkulosis	Kerjasama lintas program dan lintas sektor belum maksimal dalam penanggulangan tuberkulosis sesuai Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis	Meningkatkan penguatan kerjasama jejaring internal dan eksternal tingkat kabupaten /kecamatan	Membentuk FGD (Focus Group Discussion) dan KOPI TB dan DPPM	Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa kegiatan yang diusulkan tidak dapat ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Meningkatkan jumlah anggaran dan kesesuaian waktu pencairan anggaran	Melakukan koordinasi dengan perencanaan dan keuangan dalam hal prioritas anggaran kegiatan penunjang SPM dan aliran kas agar anggaran dicairkan tepat waktu
----	--	---	--	--	--	---	---	---	--	---

			penyakit TBC masuk dalam salah satu prioritas							
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Melakukan koordinasi dengan perencanaan dan keuangan dalam hal prioritas anggaran kegiatan penunjang SPM dan aliran kas agar anggaran dicairkan tepat waktu	Meningkatkan pendampingan melalui lembaga swadaya masyarakat	Menjalin kerjasama (MOU) antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan LSM Pendamping	Kurangnya koordinasi antara petugas program dalam pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor	Melakukan supervisi serta monitoring dan evaluasi ke fasilitas pelayanan kesehatan bersama lintas program	Minimnya anggaran untuk skrinning maupun penjangkauan terhadap ODHIV	Ketersediaan dana pendukung dalam skrinning dan penjangkauan ODHIV	Meningkatkan pembiayaan terkait pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang masih sangat rendah

		Skrinning HIV di fasilitas pelayanan kesehatan belum maksimal	Melakukan mobile clinic ke hotspot kelompok kunci di wilayah fasilitas pelayanan kesehatan	Menjalin kerjasama (MOU) antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan LSM penjangkau						
		Sasara yang ditetapkan berdasarkan delapan kelompok sasaran masih terlalu tinggi	Menghitung ulang sasaran yang ditetapkan	Menetapkan sasaran pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV						

C. Urusan Pekerjaan Umum

Berikut ini beberapa hal yang dilaporkan pada pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pekerjaan umum.

1. Jenis Pelayanan

Pelayanan dasar yang dilaksanakan urusan pekerjaan umum terbagi 2 (dua) yaitu Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, dan komponen pelayanan yang diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang berdasarkan kepada indikator persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum yaitu melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.
- b. Jenis pelayanan untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga Negara dan diberikan melalui dua cara yang terdiri dari:
 - 1) Sistem Pengolahan air limbah domestik setempat (SPALD-S) yang berupa pembangunan unit pengolahan setempat skala individual dan komunal, jasa layanan sedot tinja dan pembangunan IPLT.

Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) yang berupa sub-sistem pengolahan terpusat

2. Target Pencapaian SPM

Target capaian berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11

Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Nilai (%)
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

Sumber data: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2023

3. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2022 sebesar Rp. 27.640.575.258,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.12
Alokasi Anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Tahun Anggaran 2022

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1		-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. DELI SERDANG				27,640,575,258	27,640,575,258	100.00 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				18,640,392,258	18,640,392,258	100.00 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				18,640,392,258	100.00 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	384,156,028	384,156,028	100.00 %
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	29,132,000	29,132,000	100.00 %
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	5,637,421,817	5,637,421,817	100.00 %
		4	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	3,204,309,448	3,204,309,448	100.00 %
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		965,854,944	965,854,944	100.00 %
		6	Perluasan SPAM	SR	1,199,334,036	1,199,334,036	100.00 %

			jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan				
		7	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		7,220,183,985	7,220,183,985	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				18,640,392,258	18,640,392,258	100.00 %
	JUMLAH PROGRAM				18,640,392,258	18,640,392,258	100.00 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				9,000,183,000	9,000,183,000	100.00 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K20220131034234			9,000,183,000	9,000,183,000	100.00 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	107,800,000	107,800,000	100.00 %
		2	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	4,532,200,000	4,532,200,000	100.00 %
		3	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan /perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala		144,000,000	144,000,000	100.00 %

			permukiman				
		4	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	3,600,000,000	3,600,000,000	100.00 %
		5	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	105,000,000	105,000,000	100.00 %
		6	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	511,183,000	511,183,000	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				9,000,183,000	9,000,183,000	100.00 %
	JUMLAH PROGRAM				9,000,183,000	9,000,183,000	100.00 %

4. Dukungan Personil

Rincian PNS/non PNS Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang menangani urusan pekerjaan umum dengan jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan PNS adalah sebagai berikut:

a. Pangkat dan golongan PNS

Tabel 4.13

Komposisi Personil Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	1
2.	Golongan III	28
3.	Golongan II	5
Jumlah		34

Sumber data: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Deli Serdang 2023

5. Realisasi

Capaian Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum pada tahun 2022 sebesar 74,75% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Capaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				74.75 %
01.00	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				78.98 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	61.32 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	590,955	452,932	138,023	77%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17.66 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
		-1	-2	-3	88.32 %
	1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	590,955	452,932	138,023	76.64 %
	2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	590,955	452,932	138,023	76.64 %
	3 . Jaringan perpipaan	34,667	34,667	0	100.00 %
	4 . Jaringan bukan perpipaan	411,8	411,8	0	100.00 %

	JUMLAH	1,628,377	1,352,331	276,046	353.28 %
02.00	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				70.52 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	52.79 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	590,955	389,931	201,024	66%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17.73 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
		-1	-2	-3	88.66 %
	1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestic	590,955	389,931	201,024	65.98 %
	2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik	590,955	389,931	201,024	65.98 %
	3 . Sub-Sistem pengolahan setempat	731	731	0	100.00 %
	4 . Sub-sistem pengangkutan	4	4	0	100.00 %
	5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	2	2	0	100.00 %
	6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	8	8	0	100.00 %
	JUMLAH	1,182,655	780,607	402,048	531.96 %

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Deli Serdang baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan

1. Keterbatasan air baku aman (Sungai, Mata Air, Sumur Bor)
2. Database pengguna air minum/air bersih yang ada belum relevan dengan kondisi saat ini
3. Sulitnya mendapat tanah hibah pembangunan IPAL Komunal
4. Belum tersedianya data jumlah rumah yang membutuhkan pelayanan IPAL Komunal
5. Dengan adanya pandemi Covid-19 terjadi pengurangan anggaran baik di tingkat pemerintah di pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang mempengaruhi capaian pelayanan air minum/ air limbah.

b. Solusi

1. Untuk mengatasi masalah keterbatasan air baku aman, maka diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penyediaan Air Baku Aman
2. Untuk mengatasi masalah data pengguna air minum/ air bersih yang belum relevan, maka diperlukan updating pendataan sarana air minum/bersih di Kabupaten Deli Serdang
3. Sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan air limbah bagi masyarakat
4. Melakukan pendataan kepada masyarakat yang membutuhkan IPAL Komunal

Perlunya tim penerapan SPM kabupaten yang lebih aktif menjadi koordinator pencapaian SPM di OPD mengingat ada pencapaian SPM yang bersinergi antar OPD.

D. Urusan Perumahan Rakyat

Berikut ini beberapa hal yang dilaporkan pada pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan perumahan rakyat.

1. Jenis Pelayanan

Pelayanan dasar yang dilaksanakan berdasarkan bidang urusan perumahan rakyat terbagi 2 yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota sedangkan komponen pelayanan yang di berikan adalah sebagai berikut:

1. Jenis pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana antara lain:
 - (1) Pembangunan baru/pembangunan kembali rumah yang terkena bencana.
 - (2) Pembangunan baru rumah yang layak huni yang harus di relokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
 - (3) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat pada lokasi yang sama.
 - (4) Rehabilitasi dengan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
 - (5) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana.
2. Jenis pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah antara lain:
 - (1) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah dalam rangka mendukung:
 - Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha dan atau
 - Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

2. Target Pencapaian SPM

Target capaian berdasarkan indikator standar pelayanan minimal bidang urusan perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15

Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Nilai (%)
1	Penyediaan dan	Jumlah warga Negara	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Nilai (%)
	rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	korban yang bencana yang memperoleh rumah layak huni	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100

3. Sumber data: Dinas PKPP Kab. Deli Serdang 2023

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka pencapaian target SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah Rp. 1.033.987.872,-. Alokasi Anggaran tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.16

Alokasi Anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN	
	KAB. DELI SERDANG				1,033,987,872	388,210,300	37.54 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1,033,987,872	388,210,300	37.54 %
		1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		44,084,296	18,876,750	42.82 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi	Dokumen	44,084,296	18,876,750	42.82 %

			program Kabupaten/Kota				
	JUMLAH INDIKATOR				44,084,296	18,876,750	42.82 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			989,903,576	369,333,550	37.31 %
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah		526,674,240	272,063,750	51.66 %
	2	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah		463,229,336	97,269,800	21.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				989,903,576	369,333,550	37.31 %
	JUMLAH PROGRAM				1,033,987,872	388,210,300	37.54 %

4. Dukungan Personil

Rincian PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dengan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan PNS adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi Pendidikan

Tabel 4.17

**Jumlah SDM Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Serta Pertanahan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S-3	-
2	S-2	-
3	S-1	14
4	Diploma III	1
5	SMA	8
6	SMP	23

Jumlah	23
---------------	-----------

2. Pangkat dan Golongan PNS

Tabel 4.18

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	-
2	Golongan III	5
3	Golongan II	2
4	Golongan I	-
5	Non PNS	16
Jumlah		23

5. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 sebesar 60 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.19

Capaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MUDA			60.00 %
01.00	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00 %
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	63	63	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN				20.00 %

DASAR (20%)					
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
					100.00 %
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	60	60	0	100.00 %
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	3	3	0	100.00 %
	JUMLAH	63	63	0	100.00 %

6. Permasalahan dan Solusi

Kabupaten Deli Serdang yang topografinya terdiri dari dataran rendah, dataran pantai dan dataran tinggi mengalami beberapa jenis bencana alam hampir setiap tahunnya. Berdasarkan data dari BPS tahun 2021, frekuensi bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Deli Serdang adalah banjir, piting beliung dan longsor. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan memiliki beberapa permasalahan dalam menangani bencana alam tersebut. Masalah yang adalah sebagai berikut.

1. Permasalahan

Berdasarkan identifikasi risiko operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Data perumahan di lokasi rawan bencana yang tidak valid. Masalah ini disebabkan belum terlaksananya pendataan secara koheren pada setiap perumahan dan kawasan permukiman di lokasi rawan bencana. Dampak dari masalah ini adalah tindakan preventif dalam mencegah terjadinya kerusakan berulang pada perumahan dan kawasan permukiman yang berada pada lokasi rawan bencana.
- b. Bantuan material tidak tepat jenis, jumlah dan mutu. Penyebab dari masalah ini adalah kurangnya koordinasi dengan pihak terkait penanganan bencana dan performa penyedia kurang baik. Dampak dari masalah ini adalah kualitas konstruksi tidak sesuai standar.

2. Solusi

- a. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pihak desa atau kelurahan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.
- b. Melakukan survey ke lapangan secara berkala mengingat masyarakat yang masih mendirikan rumah atau tempat tinggal di lokasi rawan bencana dikarenakan masyarakat tidak sepenuhnya mengerti akan bahayanya mendirikan bangunan di lokasi rawan bencana.
- c. Bantuan rumah bencana yang terlambat atau tidak tersalurkan merupakan masalah yang terjadi pada tahap pelaksanaan, maka perlu adanya koordinasi antar berbagai pihak terkait agar kerusakan rumah korban bencana dapat tertangani dengan baik.
- d. Bantuan material tidak tepat jenis, jumlah dan mutu merupakan masalah yang terjadi pada tahap monitoring dan evaluasi, maka perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait penanganan bencana agar material sesuai dengan yang dibutuhkan pada rumah korban bencana.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berikut ini beberapa hal yang dilaporkan pada pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

1. Jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal urusan Trantibumlinmas adalah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- 3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

2. Target Pencapaian SPM

Pencapaian SPM urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas 100% sebagai berikut:

Tabel 4.20
Target Pencapaian SPM dan Perangkat Daerah yang Menangani

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Perangkat Daerah
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	Satpol PP
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	BPBD
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	BPBD
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	BPBD
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sumber data: Satpol PP, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2023

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Satpol Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang

bersifat pelayanan pada urusan bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran Tahun 2022 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 4.21
Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. DELI SERDANG				4,560,850,174	4,489,932,299	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				4,560,850,174	4,489,932,299	99,33%
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			4,560,850,174	4,489,932,299	99,33 %
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	566,800,000	566,800,000	100%
		5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi	Orang	3,319,050,174	3,248,132,299	98%

			Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				
		6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	675,000,000	675,000,000	100%

Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.22

Alokasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN	
1							
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			12,879,990	0	0.00 %

		1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	12,879,990	0	0%
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			14,879,990	0	0.00 %
		1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	14,879,990	0	0%
		2	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			245,000,000	0	0.00 %
		1	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	245,000,000	0	0%
KEGIATAN LAINNYA							
1	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
	01.00	Belanja Tak Terduga (BTT)			2,392,515,809	2,392,515,809	100.0 0 %

Alokasi anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada

urusan bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran tahun 2022 sebesar Rp. 4,073,064,280 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.23

Alokasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN		
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				4,073,064,280	4,073,064,280	100.00 %	
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				3,988,519,280	3,988,519,280	100.00 %
		1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3,624,272,320	3,624,272,320	100.00 %	
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	40,000,000	40,000,000	100.00 %	
		3	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran	Dokumen	154,744,960	154,744,960	100.00 %	

			dan Alat Pelindung Diri				
		4	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	169,502,000	169,502,000	100.00 %
	2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			84,545,000	84,545,000	100.00 %
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	54,545,000	54,545,000	100.00 %
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	30,000,000	30,000,000	100.00 %

4. Dukungan Personil

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) perangkat daerah yaitu:

1. Satuan Polisi Pamong Praja
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Pemadam Kebakaran

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja didukung oleh personil sebanyak 179 orang. Jumlah Pegawai Satpol PP Januari s.d Bulan Desember 2021 adalah 154 orang dengan status sebagai berikut :

- a) Pegawai Negeri Sipil : 63 Orang
- b) Non Pegawai Negeri Sipil : 116 Orang
- c) PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 6 Orang
- d) PPNS Unit Kerja lainnya : 0 Orang

Rincian Pegawai Satpol PP dengan tingkat pendidikan dan pangkat/ golongan PNS

- a) Kualifikasi Pendidikan

Tabel 4.24
Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	PNS)	NON PNS	Jumlah (orang)
1.	S-3	-	-	-
2.	S-2	4	-	4
3.	S-1	27	16	43
4.	Diploma III	1	5	6
5.	SLTA	31	92	123
6.	SLTP	-	1	1
7.	SD	-	2	2
Jumlah		154	116	179

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang 2023

- b) Pangkat dan Golongan PNS

Tabel 4.25
Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah(Orang)
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	28
3.	Golongan II	31
4.	Golongan I	1
Jumlah		63

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang 2023

c) Jumlah eselon :

- 1) Eselon II : 1 orang
- 2) Eselon III: 5 orang
- 3) Eselon IV: 14 orang

Pelaksanaan SPM urusan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2022 didukung oleh personil ASN sebanyak 16 orang, non PNS sebanyak 14 orang dan relawan satgas sebanyak 12 orang.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran pada Tahun 2021 di 7 pos yang ada didukung oleh personil sebanyak 105 orang. Jumlah keseluruhan Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang per Januari sampai dengan bulan Desember 2021 adalah 138 Orang dengan status sebagai berikut:

- a) Pegawai negeri Sipil : 58 Orang
- b) Non Pegawai Negeri Sipil : 97 Orang

Rincian Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang dengan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan PNS:

a) Kualifikasi Pendidikan

Tabel 4.26
Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	4
2	S 1	27
3	D III	2
4	SLTA	24
5	SLTP	1
	Jumlah	58

b). Jumlah eselon

Tabel 4.27
Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah orang
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kabid	4
4	Kasi	8
5	Kasubbag	3
6	Jabatan Fungsional	3
	Jumlah	20

c). Pangkat/Golongan PNS

Tabel 4.28
Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Berdasarkan Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	1	-	1	
3	IV/a	3	-	3	
4	III/d	2	2	4	
5	III/c	8	3	11	
6	III/b	1	-	1	
7	III/a	14	-	14	
8	II/d	19	-	19	
9	II/c	2	-	2	
10	II/b	1	-	1	
11	II/a	-	-	-	

12	I/d	1	-	1	
13	1/a	-	-	-	
	Jumlah PNS	53	5	58	
	Non PNS				
14	Honorar	95	2	97	
	Jumlah Non PNS	95	2	97	
	Jml PNS + Honorar + Tenaga Kontrak	148	7	155	

5. Realisasi

Capaian Standar Pelayanan Minimal urusan Trantibumlinmas pada tahun 2022 sebesar 97,82 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.29

Capaian Standar Pelayanan Minimal

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2				-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS UTAMA			97.82 %
01000	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				97.82 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	18	18	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17.82 %
		Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	89.09 %

	1 . Standar operasional prosedur Satpol PP	4	4	0	100.00 %
	2 . Standar sarana prasarana Satpol PP	120	116	4	96.67 %
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	300	179	121	59.67 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	2	2	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					
N o	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		BELUM TUNTAS			49.54 %
0 1. 0 0	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				52.17 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	36.18 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	118,855	53,745	65110	45.22 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.99 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / /	Jumlah Mutu Barang / /	Jumlah Mutu Barang / /	Jasa Yang Belum Tersedia
		Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	79.95 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	22	12	10	54.55 %

	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	118,855	118,855	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	118,855	53,745	65110	45.22 %
	4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	37	37	0	100.00 %
	5 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	63,433	63,433	0	100.00 %
0	2. Pelayanan Pencegahan dan				
0	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
0	(KEBENCANAAN)				48.68 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	36.18 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	118,855	53,745	65110	45.22 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				12.50 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	62.50 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	100	25	75	25.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	44	44	0	100.00 %
0	3. Pelayanan Penyelamatan dan				
0	Evakuasi Korban Bencana				
0	(KEBENCANAAN)				47.79 %
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN	Jumlah	Jumlah	Yang	36.18 %

PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Total Yang Harus Dilayani	Total Yang Terlayani	Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	118,855	53,745	65110	45.22 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				11.62 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang / /	Jumlah Mutu Barang / /
	Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia
				58.09 %
1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	10	10	0	100.00 %
2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	118,855	53,745	65110	45.22 %
3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	118,855	53,745	65110	45.22 %
4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0	0	0%
5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	53,745	53,745	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR				
N	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
-1	-2	-3		-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS UTAMA		98.70 %
0	1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)			98.70 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani
				80.00 %

A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	200	200	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.70 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / /	Jumlah Mutu Barang / /	Jumlah Mutu Barang / /	Jumlah Mutu Barang / /
	Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	93.50 %
1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	200	148	52	74.00 %
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	76	76	0	100.00 %
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	44	44	0	100.00 %
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	13	13	0	100.00 %

6. Permasalahan dan Solusi

a. Satuan Polisi Pamong Praja

1) Permasalahan

- Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli wilayah se Kabupaten Deli Serdang.
- Jumlah PPNS dan PNS dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang yang minim/kurang memadai.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada.

2) Solusi

- Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun pemerintah provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah.

- Merencanakan penambahan personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dan pengikutsertaan aparatur dalam pendidikan PPNS dan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja.
 - Mengadakan pembinaan dan sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat.
- 3) Rencana Tindak Lanjut
- Mengusulkan penambahan anggaran sesuai Permendagri No 114 dan 121 tahun 2018.
 - Mengusulkan penambahan personil sesuai dengan Permendagri 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Jumlah Polisi Pamong Praja.
 - Merencanakan penganggaran kegiatan sosialisasi Perda dan Perkada

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 di Kabupaten Deli Serdang baik permasalahan internal maupun eksternal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.30
Permasalahan dan Solusi Penerapan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	P5rmasalahan dan Solusi Penerapan SPM								
		Perencanaan			Koordinasi			Pendanaan		
		Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Kurangnya informasi rawan bencana kepada masyarakat	Menyiapkan sarana dan prasarana informasi rawan bencana	Membuat usulan pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi rawan bencana kepada masyarakat	Belum maksimalnya koordinasi dengan OPD dan stake holder terkait untuk melakukan pengembangan informasi rawan bencana	Melakukan koordinasi dengan OPD dan stake holder terkait untuk melakukan perkembangan informasi rawan bencana	Melakukan rapat koordinasi dengan OPD dan stake holder untuk membahas pelayanan informasi bencana kepada masyarakat	Keterbatasan anggaran akibat refocussing	Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung pelayanan informasi rawan bencana pada tahun berikutnya	Menguatkan pembiayaan pelayanan informasi rawan bencana dari pihak ketiga
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Kurangnya pencegahan dan kesiapsiagaan	Menyiapkan sarana dan prasarana	Membuat usulan pengadaan sarana	Belum maksimalnya koordinnasi dengan OPD	Melakukan koordinasi dengan OPD dan	Melakukan rapat koordinasi dengan OPD	Keterbatasan anggaran akibat refocussing	Merencanakan kembali kegiatan yang mendukung	Menguatkan pembiayaan dengan pihak ketiga dalam

	aan terhadap bencana	terhadap bencana	untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	pendukung untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	dan stake holder terkait dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	stake holder terkait dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	dan stake holder terkait untuk membahas pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kurangnya perlengkapan dan peralatan serta personil penanggulangan bencana	Menambah perlengkapan dan peralatan serta personil penanggulangan bencana	Membuat usulan pengadaan perlengkapan dan peralatan serta penambahan personil penanggulangan bencana	Belum maksimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana dengan OPD dan stake holder terkait	Melakukan koordinasi dengan OPD dan stake holder terkait dalam penanggulangan bencana	Melakukan Latihan Gabungan Penanggulangan Bencana	Keterbatasan anggaran akibat refocussing	Merencanakan kembali yang mendukung pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Menguatkan pembiayaan dengan pihak ketiga dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana

a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel 4.31
Permasalahan dan Solusi Penerapan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
Sarana prasarana yang belum memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan pemadaman dan penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan non Kebakaran.	Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana prasarana tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun pemerintah provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah.	Mengusulkan penambahan anggaran sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2021 dan Nomor 114 Tahun 2018
Jumlah PNS dan P2K dalam lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang yang minim/kurang memadai dan belum memiliki sertifikasi/kompetensi yang menunjang pelaksanaan tugas pelayanan;	Merencanakan, penambahan personil anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang dan pengikutsertaan aparatur dalam Pendidikan /diklat dasar Pemadam Kebakaran;	Mengusulkan penambahan personil sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018;
Jauhnya jangkauan wilayah manajemen kebakaran dari pos pemadam yang tersedia;	Mengadakan sosialisasi terkait relawan pemadam kebakaran ke kecamatan dan pemberdayaan masyarakat;	Meningkatkan koordinasi yang baik dengan daerah perbatasan, pemadam kebakaran tingkat provinsi, Kab/Kota;

F. Urusan Sosial

Berikut ini beberapa hal yang dilaporkan pada pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial.

1. Jenis Pelayanan

Pelayanan dasar yang dilaksanakan bidang sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, ada 5 (lima) jenis pelayanan dasar bidang sosial daerah penyangang dasar bidang sosial kabupaten/kota yaitu:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantr diluar panti sosial;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial;
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pad saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana derah kabupaten/kota.

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar diluar panti yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat dengan cara memberikan dukungan layanan pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan/pendampingan kepada penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan pengemis.

Sedangkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah dilakukan dalam bentuk layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana, dimana kebutuhan dasar disesuaikan dengan kebutuhan penerima layanan berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial

2. Target Pencapaian SPM

Dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial dengan mempedomani Peraturan Kementerian Sosial yang telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 4.32**Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Target (%)
		Indikator	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti	100
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia di luar panti	100
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di luar Panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan pengemis di luar panti	100
		Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Target (%)
		Indikator	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	

Sumber data: Dinas Sosial Kab. Deli Serdang 2023

Adapun pembiayaan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dipergunakan dalam bentuk pelayanan:

- a. Layanan Data dan Pengaduan;
- b. Layanan Kedaruratan;
- c. Penyediaan Permakanan;
- d. Penyediaan Alat Bantu;
- e. Fasilitasi pembuatan akte kelahiran;
- f. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga untuk tujuan reunifikasi; dan
- g. Layanan Rujukan

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.33

Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. DELI SERDANG				732,893,954	226,617,770	30.92 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				732,893,954	226,617,770	30.92 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
	1				362,238,200	85,448,250	23.59 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	88,151,000	27,466,500	31.16 %

					41,747,600	0	
		2	Penyediaan sandang	Orang			0%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	105,850,000	57,981,750	54.78 %
		4	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	126,489,600	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				362,238,200	85,448,250	23.59 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K20220131040943			370,655,754	141,169,520	38.09 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	224,397,706	141,169,520	62.91 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	142,507,320	0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	3,750,728	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				370,655,754	141,169,520	38.09 %
	JUMLAH PROGRAM				732,893,954	226,617,770	30.92 %

4. Dukungan Personil

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Deli Serdang yang berperan aktif membantu memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas sosial Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.34

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2022

No	PSKS	Jumlah
1	Pendamping PKH	118
2	Pekerja Sosial Profesional	2
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	22
4	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	35
5	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	43
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	19
7	Karang Taruna	106
8	LKS	111

Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) internal pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial dari kondisi jumlah pegawai berdasarkan data sampai dengan bulan Desember 2022, jumlah pegawai Dinas sosial sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.35
Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

No	Uraian	Laki -Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pejabat Struktural			
	- Eselon II	1	-	1
	- Eselon III	3	2	5
	- Eselon IV	1	1	2
2	Pejabat Fungsional	2	10	12
3	Staf	4	3	7
Jumlah		11	16	27

Komposisi Sumber daya Manusia (SDM) berdasarkan strata pendidikan adalah seperti tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 4.36
Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

No	Uraian	Laki -Laki	Perempuan	Jumlah
1	S-2	1	1	2
2	S-1	9	13	22
3	Diploma III	-	1	1
4	Diploma IV	-	-	-
2	SLTA	1	1	2
3	Staf	4	3	7
Jumlah		11	16	27

5. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 sebesar 89,29% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.37
Capaian Standar Pelayanan Minimal

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MADYA			89.29 %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				84.32 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69.82 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	55	48	7	87%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				14.50 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	72.48 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	5	5	0	100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan	5	5	0	100.00 %
	3 . Penyediaan sandang	1	1	0	100.00 %
	4. Penyediaan alat bantu	55	48	7	87.27 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	2	2	0	100.00 %
	6 . Pemberian	2	2	0	100.00 %

	bimbingan fisik, mental, spiritual				
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	2	2	0	100.00 %
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	100.00 %
	9 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	2	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100.00 %
	11 . Layanan rujukan	2	2	0	100.00 %
	JUMLAH	78	71	7	1,087.27 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				92.79 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	22	22	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				12.79 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
		-1	-2	-3	63.97 %
	1 . Layanan data dan	22	22	0	100.00 %

	pengaduan				
	2 . Penyediaan permakanaan	20	20	0	100.00 %
	3 . Penyediaan sandang	9	9	0	100.00 %
	4 . Penyediaan perbekalan kesehatan	11	11	0	100.00 %
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	4	4	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	21	21	0	100.00 %
	7 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	16	9	7	56.25 %
	8 . Akses ke layanan pendidikan	10	3	7	30.00 %
	9 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	13	13	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15	11	4	73.33 %
	11 . Layanan rujukan	14	14	0	100.00 %
	JUMLAH	155	137	18	959.58 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				93.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang	Jumlah Total Yang	Yang Belum Terlayani	80.00 %

	Harus Dilayani	Terlayani		
• Jumlah yang Harus Dilayani :	6	6	0	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				13.33 %
	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	-1	-2	-3	66.67 %
1 . Layanan data dan pengaduan	6	6	0	100.00 %
2 . Penyediaan permakanan	4	4	0	100.00 %
3 . Penyediaan sandang	4	4	0	100.00 %
4 . Penyediaan perbekalan kesehatan	2	2	0	100.00 %
5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	4	4	0	100.00 %
6 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	3	3	0	100.00 %
7 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	100.00 %
8 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	5	0	100.00 %
9 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100.00 %

	10 . Layanan rujukan	5	5	0	100.00 %
	JUMLAH	35	35	0	1,000.00 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				92.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	18	18	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				12.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
		-1	-2	-3	60.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	18	18	0	100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan	18	18	0	100.00 %
	3 . Penyediaan sandang	18	18	0	100.00 %
	4 . Penyediaan perbekalan kesehatan	6	6	0	100.00 %
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	10	10	0	100.00 %
	6 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu	14	14	0	100.00 %

	Identitas Anak				
	7 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	5	0	100.00 %
	8 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	0	100.00 %
	9 . Layanan rujukan	11	11	0	100.00 %
	JUMLAH	103	103	0	900.00 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				84.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	7,488	7,488	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				4.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
		-1	-2	-3	20.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	7,488	7,488	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	100	0	100	0%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	4	0	4	0%
	4 . Pelayanan dukungan Psikososial	0	0	0	0%

	JUMLAH	7,592	7,488	104	100.00 %
--	---------------	--------------	--------------	------------	-----------------

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Belum ada database Pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS), khususnya data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis se Kabupaten Deli Serdang yang valid dan akurat.
- b. Kurangnya pendidikan dan pelatihan terhadap SDM dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang sosial.
- c. Keterbatasan SDM dalam menghitung target penerimaan layanan dan mutu layanan.
- d. Keterbatasan SDM sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data.
- e. Belum optimalnya peran potensi dan Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial.
- f. Penghitungan biaya kebutuhan penerapan SPM yang belum didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya.
- g. Penanganan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang masih belum optimal.

Solusi:

- a. Perlu adanya pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS), khususnya data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis yang dilakukan pada 22 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.
- b. Mengajukan usulan ke instansi terkait untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pelayanan kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan pembinaan kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- d. Perlu adanya regulasi khusus mengenai penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Deli Serdang.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



**BAB V
PENUTUP**

**KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2022**

BAB V

PENUTUP

Salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Uraian yang telah dikemukakan pada Bab-bab Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 ini, maka diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang. Laporan yang telah disusun juga diharapkan sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas-tugas pemerintahan.

Laporan ini merupakan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta merupakan gambaran pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana indikator yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga merupakan informasi bagi pemerintah atasan dan masyarakat tentang berbagai masalah yang masih perlu diperbaiki pada masa yang akan datang.

Pada tahun 2022 dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) sudah mulai berkurang namun di penghujung tahun 2022 adanya Pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang memberi sinyal positif dan memberi kepercayaan bagi masyarakat bahwa pandemi telah berubah menjadi endemi yang diharapkan mampu berdampak signifikan bagi perekonomian Nasional. Dengan adanya perubahan dan pergerakan ekonomi pembangunan yang mulai membaik diharapkan pemerintah daerah bisa menyesuaikan terhadap target prioritas pembangunan yang selama ini terkendala akibat dampak dari Covid-19 selama ini.

Kami menyadari bahwa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun 2022 masih terdapat berbagai kekurangan untuk menyahuti aspirasi masyarakat namun dengan semangat pengabdian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan berkat dukungan berbagai pihak terus berupaya mewujudkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kiranya LPPD ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya pada kurun waktu tahun 2022.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini kami perbuat sebagai salah satu kewajiban konstitusional Kepala Daerah kepada Pemerintah. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua.